

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi tentang konflik dalam relasi antara buruh, pengusaha dan negara di sektor industri, terutama sektor manufaktur telah cukup banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di beberapa negara berkembang.¹ Berbagai penelitian tentang konflik industrial yang telah dilakukan umumnya mengkaji masalah konflik dalam industri dari perspektif ekonomi, kebijakan publik dan konflik kelas, class actions dan beberapa studi yang lain tentang intensitas konflik dan ekonomi politik secara terpisah. Akan tetapi, studi yang mengkaji konflik yang melibatkan buruh dan pengusaha, dengan teori ritual interaksi (Interaction Ritual Theory/IRT) atau lebih dikenal dengan teori konflik interaksional yang dikembangkan Collins relatif masih sedikit dilakukan. Konsep dasar teori ini adalah keterlibatan individu dengan individu lain dalam jaringan mereka, untuk mendapatkan suatu energi emosi (emotional energy/EE). Keterlibatan itu bentuknya adalah ritual interaksi (IR). Collins mencontohkan jaringan intelektual, ritual interaksi terjadi dalam hal pengajaran, rapat organisasi akademik, dan berbagai macam bentuk pemberian dan pengambilan keputusan intelektual lainnya. Dalam kaitannya

¹ Studi tentang konflik industrial yang telah dilakukan antara lain: Susetiawan: Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Monique J. Borrel (2004): Industrial Conflict, Mass Demonstrations, and Economic Political Change in Postwar France: An Econometric Model (Barkeley Electronic Press, 2009), Marcus E. Ethridge (1987): Collective Action, Publik Policy, and Class Conflict (Jstor, 2008); Douglas A. Hibbs, Jr.(1976): Industrial Conflict in Advanced Industrial Societies, (Jstor, 2003); Robert Hebdon dan Maurice Amazerolle: Regulating Conflict In Publik Sektor Labour Relations: The Ontario Experience (1984-1993); Carlo Altavilla, Benoit Mahy and Francois Rycx: Labour Contracts, Wages and Employment (International Journal of Manpower, 2007)

dengan studi ini, keterlibatan buruh dalam serikat buruh, keterlibatan buruh dan pengusaha (manajemen) di lingkungan tempat kerja, dan asosiasi pengusaha (merupakan jaringan antar pengusaha seperti APINDO), dan Dewan Pengupahan merupakan bentuk keterlibatan buruh dan pengusaha dalam ritual interaksi (IR). Ritual interaksi ini dapat terjadi dalam rapat organisasi, hubungan kerja, dan berbagai bentuk pengambilan keputusan seperti penentuan besarnya upah di Dewan Pengupahan. Keterlibatannya dalam berbagai ritual interaksi seperti buruh yang menjadi anggota serikat sekaligus sebagai buruh pabrik, pengusaha sebagai pemilik usaha dan tergabung dalam APINDO memiliki perasaan sebagai anggota organisasi dan sangat menghormati simbol organisasi tersebut, sehingga muncul rasa memiliki baik terhadap organisasi maupun pekerjaan. Dengan berpartisipasi dalam berbagai ritual interaksi maka individu dapat menghasilkan energi emosi (emotional energy).² Dalam hubungan antara buruh dan pengusaha, atau buruh dengan buruh yang lain, tentu ada sejumlah orang yang memiliki energi yang lebih untuk bekerja obsesif dalam waktu yang lama, sangat antusias dan tahu bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. Dalam kasus penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) misalnya, seringkali menemui jalan buntu, karena pengusaha tidak hadir dalam pengambilan keputusan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa mereka yang berposisi dominan (pengusaha) memperlihatkan kekuatannya pada orang lain (buruh), memperlihatkan dominasi dan memelihara serta memperkuat ikatan emosional para subordinat (buruh-buruh) agar mematuhi aturan yang ada. Apabila tidak mematuhi konsekuensinya akan terkena PHK. Sementara buruh yang posisinya

² Randall Collins. *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. New York: Academic Press, 1975: 267-268

subordinat akan mengembangkan perilaku dan gaya interaksi yang menunjukkan usaha mempertahankan dan meningkatkan kemerdekaan atau otonominya, dan buruh akan tunduk agar terpenuhi kebutuhannya, tetapi secara emosional tidak memiliki komitmen terhadap aturan yang ada. Oleh karena hubungan yang asimetris, maka pengusaha pun mampu berbuat apa saja terhadap buruh, sehingga pilihannya adalah tetap bekerja tapi tunduk pada aturan, atau tidak patuh aturan dengan konsekuensi PHK. Cara berinteraksi dengan melakukan berbagai aksi unjuk rasa, demonstrasi atau mogok kerja merupakan usaha yang dilakukan buruh untuk mempertahankan agar tetap bekerja dan mendapatkan upah. Dalam berbagai aktivitas dan aksi, hampir tidak pernah pengusaha itu datang menemui buruh, pada saat itulah pengusaha menunjukkan kekuatannya dan mengetahui bahwa kesempatan kerja sangat terbatas, sementara pencari kerja atau tenaga kerja yang ada sangat berlimpah. Situasi semacam itu mengakibatkan konflik antara buruh dan pengusaha atau konflik industrial menjadi sulit dihindarkan.

Perspektif teori ritual interaksi (Interaction ritual theory) ini lebih menekankan analisisnya pada tingkat individu sebagaimana Weber dengan metode *verstehen*-nya (memberi makna yang mendalam), menurutnya setiap tindakan individu sangat menentukan sistem sosial. Oleh karena itu, dalam menjelaskan fakta atau realitas sosial, faktor tindakan individu sangat menentukan.

Ada sejumlah teoritis konflik yang ada dalam perspektif non-Marxian antara lain adalah Dahrendorf, Coser, Weber, Simmel dan Collins. Akan tetapi, studi ini lebih menekankan pada teori konflik interaksional (Interaction ritual theory) yang dikembangkan oleh Collins. Teori konflik Collins ini memiliki

kelebihan sekaligus kontribusi yang sangat penting terutama terletak pada pendekatan integratifnya yaitu melakukan sintesis mikro-makro. Artinya teori konflik yang selama ini memusatkan perhatian pada tingkat struktur (makro), menjadi lebih komprehensif karena teori konflik interaksional ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya ritual interaksi yang tidak berhasil.

Beberapa studi tentang konflik industrial yang selama ini telah dilakukan banyak yang menggunakan perspektif Marxian, dan lebih mengedepankan faktor materi. Marx mengembangkan teorinya pada tingkat struktur sosial, tidak fokus pada kajian tentang cara individu menyesuaikan diri, melainkan pada posisi individu yang berlandaskan pada materi. Selain itu, Marx memberi esensi akademis mengenai realitas kekuasaan kelas terhadap kelas lain yang lemah dan konflik kelas atas fakta eksploitasi.

Studi yang dilakukan Monique J. Borrel³ pada tahun 1996, tentang Konflik Industri, Demonstrasi Massa, serta Perubahan Ekonomi dan Politik di Perancis pasca perang, misalnya menunjukkan bahwa dari tahun 1950 hingga awal 1980-an, pemogokan liar serta demonstrasi besar-besaran (massa) di Prancis lebih memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perubahan ekonomi dan sosiopolitik daripada di negara-negara industri maju di Eropa bagian barat dan di Amerika Serikat. Studi ini mendasarkan analisis teoretisnya pada empat kategori konflik; pemogokan lokal, pemogokan umum, gelombang pemogokan, serta pemogokan demonstrasi nasional. Borrel berargumen bahwa: (i) para pekerja melakukan pemogokan lokal untuk memperoleh kenaikan dalam pekerjaan dan tunjangan hidup, terutama kenaikan gaji yang sifatnya sementara; (ii) pekerja

³ Monique J. Borrel: "Industrial Conflict, Mass Demonstrations, and Economic Political Change in Postwar France: An Econometric Mode", 2004 dalam Barkeley Electronic Press, 2004: 1-2

menerapkan pemogokan umum dan gelombang pemogokan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan yang bersifat tetap dan terlembaga seperti peningkatan keuntungan sosial yang bervariasi, upah minimum, asuransi, serta pengurangan jam kerja; dan (iii) para pekerja berpartisipasi dalam pemogokan demonstrasi nasional untuk mendukung partai-partai sayap kiri serta strategi serikat kerja yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan politik. Dengan demikian, tujuan utama pekerja melakukan pemogokan adalah untuk memperjuangkan perbaikan yang permanen dan tidak lagi mementingkan kegiatan politik yang menyimpang.⁴

Dalam studinya tersebut, Borrel juga menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi aksi pemogokan yang terjadi pada tahun 1950-1980, yaitu: 1) pemogokan lokal berhubungan dengan upah, pengangguran, mobilisasi buruh, serta krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1974; 2) pemogokan umum dipengaruhi oleh gaji bersih pekerja, perbedaan gaji antara pekerja dan eksekutif senior, serta mobilisasi buruh; dan 3) pemogokan demonstrasi nasional yang tergantung pada koordinasi strategi-strategi sayap kiri, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1974, serta tren umum pada kebijakan sosial. Borrel juga menjelaskan dampak pemogokan terhadap kehidupan perekonomian dan masyarakat, yaitu: (1) konflik industri pada level perusahaan (pabrik), bukan perundingan kolektif, berdampak pada kenaikan gaji secara signifikan; (2) pemogokan multi pabrik, multi majikan, dan gelombang pemogokan mengakibatkan banyak negara yang mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan upah minimum secara cepat, serta pengurangan jam kerja tanpa kehilangan upah; dan (3) gelombang pemogokan dan pemogokan umum

⁴ Monique J. Borrel: *ibid*: 2-3

mendorong partai-partai sayap kiri dan serikat pekerja untuk menyusun pemogokan demonstrasi nasional yang memicu timbulnya mayoritas pemilih sayap kiri pada tahun 1970-an.⁵ Temuan studi Borrel ini, menunjukkan bahwa tiap tipe aksi pemogokan dipengaruhi oleh faktor tertentu dan dampak yang berbeda pula, ada pemogokan yang didorong untuk kenaikan upah, tunjangan hidup dan gaji yang bersifat sementara, tetapi ada pula aksi pemogokan yang bertujuan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih bersifat tetap dan terlembaga.

Sementara studi yang dilakukan Douglas A. Hibbs, Jr. tentang Konflik Industrial di Masyarakat Industri Modern, memfokuskan pada aktivitas pemogokan selama periode tahun 1950-1969 di sepuluh masyarakat industri modern, yakni Belgia, Kanada, Perancis, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Swedia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Studi tentang konflik industrial selama periode pasca perang ini dirancang untuk mengungkap argumentasi pemogokan tersebut serta militansi pekerja yang “ganjil” di sepuluh masyarakat industri modern ini. Bagian ketiga, sekaligus bagian yang paling penting dari studi ini, memuat sejumlah model statistikal teoritis untuk menjelaskan fluktuasi jangka-pendek pada saat pemogokan. Model yang diselidiki pada bagian ini menggabungkan faktor ekonomi dan politik yang secara umum mempengaruhi aktivitas pemogokan. Faktor ekonomi meliputi: (1) gerakan untuk upah nyata; (2) permintaan atas pekerja, seperti di-indeks-kan oleh tingkat pengangguran, dan (3) perubahan pada rasio laba agregat terhadap kompensasi total pekerja, yakni perubahan pada pangsa pekerja versus modal dalam pendapatan nasional. Sedangkan pengaruh politik paling penting dalam model ini adalah (1) insentif

⁵ Monique J. Borrel: *ibid*: 4

partai-partai sosialis yang berorientasi pada pekerja untuk mengurangi aktivitas pemogokan dari konstituen kelas pekerja; dan (2) ukuran relatif dari partai Komunis, yang dilihat sebagai agensi utama untuk mobilisasi diskonten pekerja. Bagian keempat yang juga bagian kesimpulan dari karya Douglas A. Hibbs, Jr ini mengulas bukti yang ada kaitannya dengan dampak faktor ekonomi dan politik pada fluktuasi konflik industrial sekaligus mengembangkan beberapa implikasi dari hasil statistik untuk militansi pekerja di masyarakat industri maju dan rasionalitas kelas pekerja yang memanfaatkan pemogokan sebagai senjata.⁶

Dua studi sebagaimana yang dilakukan oleh Borrel dan Hibbs, Jr tersebut lebih memusatkan perhatiannya pada faktor sosio-ekonomi dan politik sebagai penyebab terjadinya konflik industrial. Buruh/pekerja melakukan pemogokan sebagai bentuk konflik industrial untuk menuntut upah, tunjangan atau kesejahteraan secara umum, karena adanya ketimpangan yang sangat tinggi dibanding dengan manajemen.

Studi-studi hubungan dan konflik industrial di Indonesia sebagian besar dilakukan pada masa Orde Baru, di mana situasi pada saat itu sangat represif, sikap kritis pekerja seringkali dikendalikan oleh kekuatan, kekuasaan dan senjata. Pada saat itu kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat hampir tidak ada, akibat adanya tindakan represif dalam bentuk kekerasan, penculikan. Dengan kata lain, selama masa Orde Baru ritual interaksi antara buruh dan pengusaha serta antar sesama buruh tidak terjadi.

⁶ Douglas A. Hibbs, Jr.: "Industrial Conflict in Advanced Industrial Societies", 1976 dalam Jstor, 2003: 103

Studi tentang konflik yang bersifat mikro adalah studi yang dilakukan oleh Susetiawan dalam disertasinya berjudul *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*⁷. Menggunakan teori Rasionalitas Tindakan Weber, antara lain menemukan bahwa untuk memahami Hubungan Industrial Pancasila (pada masa Orde Baru) terdapat dua elemen utama yaitu prinsip ‘harmoni’ serta ‘eliminasi terhadap konflik’. Kedua nilai tersebut diinterpretasikan secara berbeda oleh majikan dan manajemen di satu sisi dan buruh/pekerja di sisi yang lain. Bagi majikan dan manajemen harmoni mengandung kondisi ‘ketenteraman industrial’, di mana konflik tidak ada. Konflik dianggap sebagai ‘deviasi patologis’ dari sebuah tipe ideal hubungan industrial yang damai, sehingga jika terjadi konflik harus dieliminasi dengan segala cara. Hal itu mendorong munculnya dan legitimasi terhadap kontrol ketat manajemen dan intervensi negara dalam hubungan industrial dengan tujuan untuk mengeliminasi terjadinya konflik dan membangun kembali harmoni.⁸ Selain itu, hubungan industrial di Indonesia dicirikan oleh frekuensi tingginya pelanggaran aturan ketenagakerjaan oleh majikan dan manajemen, pemerintah cenderung melindungi kepentingan majikan daripada pekerja dalam realitas ‘Hubungan Industrial Pancasila’. Sementara dari sisi buruh, hubungan ini belum menghasilkan manfaat yang optimal.

Sementara Hadiz⁹ dalam studi yang dilakukan pertengahan tahun 1990-an, membahas kemunculan kelompok pekerja industri di Indonesia beserta

⁷ Susetiawan, *Konflik Sosial: kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000: x. Penelitian lapangan dilakukan pada tahun 1992

⁸ Susetiawan, *ibid*: 324

⁹ Vedi R. Hadiz, *Workers And The State In New Order Indonesia*, London and New York, Routledge Asia, 1997: 109-110

implikasinya untuk mempertahankan model akomodasi antara negara, modal dan pekerja yang ditandai dengan pengawasan dan demobilisasi pekerja sebagai kekuatan sosial. Studi ini menunjukkan bagaimana kontrol yang sangat ketat terhadap buruh di Indonesia merupakan warisan perjuangan antara tentara dan buruh selama Orde Baru serta kerangka kerja korporatis sosial dan politik untuk menghambat perkembangan gerakan buruh. Hal ini dilakukan dengan pengembangan lembaga korporatis yang disponsori negara serta pengembangan kapasitas lembaga-lembaga yang berorientasi keamanan untuk menangani kerusuhan industri. Dengan kata lain bahwa pada masa Orde Baru, buruh benar-benar dikekang oleh lembaga keamanan yang secara sengaja ditugaskan untuk menangani permasalahan buruh di sektor industri, agar tercapai stabilitas nasional.

Seperti diketahui bahwa selama Orde Baru¹⁰, Indonesia belum pernah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur hubungan industrial (perburuhan), yang ada barulah peraturan-praturan pemerintah yang lebih mengedepankan stabilitas nasional dan nasib buruh seringkali dikorbankan demi mewujudkan stabilitas nasional.¹¹ Menurut Dunlop bahwa operasionalisasi hubungan industrial tergantung pada environmental setting masing-masing negara atau masyarakat. Secara teoretis operasionalisasi hubungan industrial berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem politik yang dianut oleh pelaku hubungan industrial.¹² Pada masa Orde Baru, Indonesia mengembangkan konsep Hubungan

¹⁰ Abdul Jalil. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: LKiS, 2008: 46

¹¹ Agnes Widanti. "Buruh di sektor Industri dalam Perdagangan Global". Makalah disampaikan pada *Sarasehan Nasional dan Kongres Forum Mahasiswa Syari'ah seluruh Indonesia (FORMASI)* Semarang, 27 Maret 1997. Beberapa peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dge perantara (P4); 3) Permen No. 1109/1986 tentang pembentukan Unit Kerja (UK) di perusahaan harus melibatkan pengusaha; dan 4) Permen No. 94 /1986 tentang pemberian ijin kepada pihak majikan untuk merumahkan buruh sewaktu-waktu tanpa menunggu P4.

¹² Dunlop, JT. *Industrial Relations Sistem*. New York, USA: Holt: 1958: 15

Industrial Pancasila (HIP) yang diharapkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) ini, menekankan pada kemitraan antar pelaku hubungan industrial terutama antara manajemen dan buruh, sedangkan pemerintah dituntut sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung dan pendamai.

Dengan kerangka berpikir HIP, maka tidak ada saling berhadapan antarsetiap pelaku hubungan industrial dan tidak ada penindasan terhadap yang lemah. Dalam konsep HIP, hubungan antara buruh dan pengusaha menekankan pada kebersamaan, kemitraan, dan keharmonisan antar pelaku hubungan industrial. Akan tetapi dalam kenyataan, intervensi militer dalam perselisihan perburuhan di Indonesia pun semakin meluas. Manajemen dan buruh tidak menghasilkan sebuah konsensus atas dasar norma sosial dan legal, tetapi berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk meligitimasi sistem kontrol yang berorientasi pada profit ekonomi pemilik (pengusaha), dan manajemen akan mengancam PHK jika menentang keputusan atasan.¹³

Studi-studi yang dilakukan pada saat itu menemukan bahwa Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang dikembangkan di Indonesia, dalam pelaksanaannya justru melahirkan hubungan industrial yang kurang kondusif, karena adanya militerisme sebagaimana tercantum dalam Permen no 342 Tahun 1986 tentang intervensi militer sebagai perantara dalam perselisihan perburuhan.

Sementara studi yang dilakukan Cosmas Batubara pada tahun 2008 juga mengkaji hubungan industrial di Indonesia selama masa pemerintahan Suharto dan sesudahnya, khususnya sekitar dekade sembilan puluhan dengan segala social

¹³ Susetiawan, *ibid*: 325

setting-nya.¹⁴ Studi Cosmas Batubara ini menunjukkan bahwa masalah mogok dan upah merupakan dua hal yang dapat menimbulkan konflik industrial. Temuan lain studi ini adalah bahwa isi tuntutan buruh dalam konflik juga mengalami peningkatan, dari tuntutan buruh yang bersifat normatif sebagaimana sudah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan, kemudian tuntutan berkembang ke arah hal-hal yang non-normatif seperti kenaikan upah dan hak-hak berserikat. Dengan kata lain karakter politik tuntutan buruh makin menonjol.¹⁵

Selain itu studi tentang hubungan industrial di Indonesia pasca Orde Baru juga dilakukan oleh Lembaga Penelitian Smeru tentang Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat pada tahun 2001.¹⁶ Pada saat penelitian berlangsung, sistem hubungan industrial di Indonesia sedang dalam proses transisi, yaitu dari sistem yang sangat terpusat dan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat ke sistem yang lebih terdesentralisasi di mana perusahaan dan pekerja/buruh berunding bersama mengenai persyaratan dan kondisi pekerjaan di tingkat perusahaan. Akan tetapi dalam kenyataan, banyak hal dalam sistem hubungan industrial yang masih dipengaruhi oleh praktek pemerintah pusat di masa lalu yang paternalistik. Transisi ini sejalan dengan perubahan dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas di mana rakyat Indonesia sedang berubah dari masyarakat yang dikendalikan oleh rezim yang otoriter menjadi masyarakat yang lebih demokratis.

Studi yang lain pasca Orde Baru juga dilakukan Abdul Jalil yang mengkaji dan membandingkan konsep perburuhan dalam sistem ekonomi konvensional

¹⁴ Cosmas Batubara, *ibid*: 23-25

¹⁵ Cosmas Batubara, *ibid*: 169-179

¹⁶ Lembaga Penelitian Smeru, *Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat*, Lembaga Penelitian Smeru, Jakarta: 2002,

dengan konsep perburuhan dalam Islam. Secara spesifik studi Abdul Jalil ini melakukan analisis perbandingan terhadap konsep perburuhan dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang berlaku di Indonesia dengan paradigma perburuhan dalam Islam, khususnya berkaitan dengan konsep yang mengatur hak-hak buruh.¹⁷ Dalam temuannya Jalil, menunjukkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan, dalam kenyataan menunjukkan pemilik modal (pengusaha) tetap saja diuntungkan dan lebih berkuasa daripada buruh.¹⁸

Studi tentang pemetaan konflik industrial yang dilakukan oleh Sutinah, dkk. (2009), menemukan bahwa konflik industrial yang terjadi di Jawa Timur masih intensif, terutama menjelang peringatan hari buruh (Mayday), pada saat menjelang Hari Raya serta pada bulan-bulan mendekati akhir tahun yaitu ketika berlangsung penentuan besarnya Upah Minimum. Hasil studi ini menunjukkan penyebab terjadinya konflik industrial antara lain; upah, THR, uang lembur, nasib buruh outsourcing dan buruh kontrak, pengaturan PHK, jam kerja, jamsostek, serikat buruh, hak beribadah dan hak cuti. Konflik-konflik industrial yang terjadi di luar pola tersebut biasanya disebabkan adanya ketentuan-ketentuan atau peraturan baru yang dianggap merugikan atau tidak berpihak pada buruh.¹⁹

Dari beberapa studi tentang konflik industrial tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa studi yang dilakukan pada masa Orde Baru, antara lain menemukan bahwa konsep Hubungan Industri Pancasila (HIP) menekankan pada kebersamaan, kemitraan, dan keharmonisan antar pelaku hubungan

¹⁷ Abdul Jalil, *ibid*: 11-12

¹⁸ Abdul Jalil, *ibid*: 250-251

¹⁹ Sutinah, dkk., *Pemetaan Konflik dan Penyusunan Model Penyelesaian Konflik Industrial*, LPPM Universitas Airlangga, 2010: 129-130

industrial, dalam kenyataan, ditemukan intervensi militer dalam perselisihan perburuhan di Indonesia pun semakin meluas. Kondisi harmonis terjadi karena adanya tekanan dari lembaga keamanan yang secara sengaja dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan buruh. Bahkan model akomodasi antara negara, modal dan buruh yang ditandai dengan pengawasan yang sangat ketat dan demobilisasi pekerja sebagai kekuatan sosial, mampu menekan gerakan buruh. Selain itu, masalah mogok dan upah merupakan dua hal yang dapat menimbulkan konflik industrial, bahkan tuntutan buruh mengalami peningkatan dari tuntutan hak-hak normatif ke arah tuntutan yang non-normatif.

Selain itu, studi-studi konflik industrial terdahulu lebih memusatkan perhatian pada sebab-sebab terjadinya konflik dengan pendekatan Marxian pada tingkat makro sehingga menggunakan pendekatan positivisme (metodologi kuantitatif), dan relatif sangat sedikit studi pada tingkat mikro yang berupaya untuk memahami hubungan antara pekerja dan manajemen, dengan titik perhatian pada individu dan dampaknya pada perilaku buruh di tempat kerja.

Sedangkan kajian tentang hubungan industrial yang dilakukan pasca Orde Baru, menunjukkan bahwa sistem hubungan industrial di Indonesia sedang mengalami perubahan, dari sistem hubungan yang sangat terpusat ke arah sistem yang lebih terdesentralisasi, yaitu suatu sistem yang mengutamakan dialog antara pengusaha dan buruh tentang berbagai persyaratan dan kondisi pekerjaan di tingkat perusahaan. Selain itu, aksi unjuk rasa, demonstrasi dan pemogokan yang dilakukan buruh juga mengalami peningkatan dari tuntutan buruh seperti upah, THR, cuti dan hak-hak normatif lainnya (ekonomi), dan mulai mengarah pada tuntutan bersifat politis yaitu kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan

yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat umum termasuk buruh, misalnya meningkatnya harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakuan, tarif listrik, angka pengangguran, dan kesejahteraan pada umumnya.

Studi tentang konflik industrial di Indonesia pasca Orde Baru menemukan bahwa konflik industrial lebih banyak disebabkan adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan oleh majikan (pengusaha), misalnya pelanggaran terhadap upah minimal, asuransi tenaga kerja, kebebasan berserikat, adanya outsourcing serta buruh kontrak dan sebagainya, sementara pemerintah cenderung membela kepentingan pengusaha (majikan). Perubahan konsep bekerja pada UU No. 13 Tahun 2003, merupakan salah satu bentuk pembelaan kepentingan pengusaha. Sementara lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diharapkan memberikan kebebasan berserikat pun belum sesuai dengan harapan, karena banyak perusahaan yang tetap mempertahankan adanya satu serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Akan tetapi, dalam kenyataan apa pun penyebab terjadinya konflik industrial dan tuntutan buruh/pekerja, konflik industrial di Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya masih cukup intensif.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa di Jawa Timur pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2011, terjadi aksi mogok kerja dan unjuk rasa buruh sebanyak 26 kasus, melibatkan 24.256 buruh dengan jumlah jam kerja yang hilang sebanyak 1.503.872.²⁰ Jika dilihat dari jumlah buruh yang terlibat dalam aksi jumlah tersebut menduduki urutan kedua setelah Banten (25.420 buruh), akan tetapi dari aspek jumlah jam kerja yang hilang selama aksi mogok

²⁰ Sumber: Ditjend PHI dan JSK diolah Pusdatinaker. Tahun 2011

kerja dan unjuk rasa di Jawa Timur, secara nasional mencapai hampir 80%. Pada semester pertama di tahun 2011 ini ada kecenderungan konflik industrial meningkat terutama menjelang Hari Raya, di mana buruh melakukan aksi mogok dan unjuk rasa untuk menuntut THR, serta pada akhir tahun, pada saat penetapan UMP/K untuk tahun berikutnya.

Hasil analisis dan evaluasi (anev) akhir tahun Polda Jawa Timur seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Mulyana, Sabtu (31/12/2011) sepanjang tahun 2011, aksi unjuk rasa di Jawa Timur turun 11,1 persen dibanding tahun sebelumnya (2010). Selama 2010, terjadi aksi massa sebanyak 1.254, pada tahun 2011 terjadi 1.240 kali aksi massa.²¹ Sementara pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2012 terdapat 548 kasus dengan jenis perselisihan (konflik) industrial yang berbeda-beda, antara lain kasus PHK, tuntutan hak-hak normatif, konflik kepentingan, konflik antar serikat buruh/pekerja dan aksi mogok kerja.²²

Selama ini, upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya para buruh/pekerja serta warga masyarakat secara keseluruhan, seringkali belum maksimal karena dihadapkan pada dilema antara: (1) kepentingan negara untuk menarik investasi yang membutuhkan jaminan keamanan dan kondisi yang aman tanpa gejolak, dengan (2) tuntutan bahwa negara harus memenuhi hak-hak pekerja sesuai kesepakatan yang telah

²¹ <http://surabaya.detik.com/read/2011/12/31/101140/1803703/466/selama-2011-aksi-unjuk-rasa-di-jatim-turun-111-persen>

²² Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa timur, Januari-Juni Tahun 2012

ditandatangani dan sesuai dengan isi pasal-pasal dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²³

Sementara, dari sisi negara, apabila berbagai hak ekonomi, sosial dan budaya para pekerja ini dipenuhi, maka dikhawatirkan implikasinya dapat mengganggu sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi para pemilik modal atau investor. Padahal sebagaimana ditekankan dalam konstitusi, seharusnya negara berperan netral, sehingga dapat menyeimbangkan kekuatan yang timpang. Kondisi faktual justru sebaliknya, yang terjadi adalah proses penguatan posisi (politik) pengusaha berhadapan dengan buruh. Ketegangan hubungan industrial yang signifikan tidak terjadi antara pengusaha dan negara, melainkan antara dua kelompok yaitu pengusaha dan negara dengan pihak buruh.²⁴ Lahirnya UU No, 25 Tahun 1997 dianggap kontroversial, karena secara substansial terbukti menjadi instrumen kendali buruh. Beberapa hal yang merupakan pengendalian; Pertama, kontrol terhadap pemogokan, UU No 25 Tahun 1997 memuat pasal yang membatasi peluang bagi buruh, seperti: i) pemogokan harus melalui 'pemberitahuan'; ii) pemogokan hanya diakui di lingkungan pabrik. Demikian juga Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 62/1993, yang membatasi lamanya buruh boleh absen pada waktu perselisihan perburuhan, hal ini merupakan pencegahan agar tidak terjadi pemogokan. Bahkan penanganan pada saat terjadi pemogokan seperti mengamankan, membubarkan, penangkapan buruh yang mogok dan perlakuan terhadap buruh dilakukan dengan kekerasan fisik, intimidasi dan sebagainya. Kedua, pengendalian terhadap

²³ Sutinah dan Wirawan (Ed), Penyusunan Program Antisipasi dan Penanganan Konflik Industrial di Propinsi Jawa Timur, Surabaya, Lutfansah Mediatama, 2007: 2

²⁴ Agung Wibawanto, Imam Baskara dan Jirnadara, Siasat Buruh di bawah Represi, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1998: 127

organisasi buruh. Permen No. 01/1975 tentang pendaftaran organisasi buruh, telah mengukuhkan keberadaan FBSI dan mencabut Permen Perburuhan (PMP) No.90/1955. Pada tahun 1985 FBSI diganti dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang lebih tersentralisir. Pengendalian dilakukan sampai pada struktur organisasi, di mana jabatan strategis ditentukan oleh perusahaan.

Kedua mekanisme tersebut menunjukkan bagaimana negara melakukan pengendalian yang sangat sistemik terhadap berbagai tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok buruh atau kelompok yang concern pada masalah perburuhan. Belum lagi stigma yang diberikan kepada buruh yang terlibat dalam pemogokan seperti oknum tidak bertanggung jawab, pihak-pihak tertentu, kelompok ekstrem, LSM bermasalah dan sebagainya.²⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru sangat represif terhadap gerakan buruh.

Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga belum berpihak pada buruh. Bahkan dalam salah satu pasalnya tentang mogok kerja misalnya disebutkan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, buruh/serikat buruh harus memberitahu kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Hal ini berarti bahwa pasal tersebut sebagai pengendali buruh, meskipun mogok kerja merupakan hak dasar bagi pekerja/buruh. Selain itu penggantian definisi buruh menjadi buruh dengan menghilangkan unsur majikan (pasal 1 ayat 3 UUK No. 13 Tahun 2003) merupakan sebuah upaya pembuat UUK untuk memperluas pengertian pekerja/buruh sehingga meliputi juga buruh yang bekerja sendiri (swa-kerja) maupun buruh “outsourcing“. Penghapusan unsur

²⁵ Agung Wibawanto, Imam Baskara dan Jirnadara, *ibid*: 132

majikan juga merupakan indikasi yang jelas memperlihatkan niat untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih bersifat individual dan mengarahkan pendapatan buruh kepada kemampuan dan kinerjanya sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab perusahaan/majikan.²⁶ Demikian juga masalah legalisasi “outsourcing” ke dalam bentuk UU, merupakan legalisasi ‘perbudakan modern’. Dengan demikian pada era reformasi kondisi kesejahteraan buruh pun belum menunjukkan adanya peningkatan.

Lebih dari sepuluh tahun setelah era kebebasan berserikat dimulai, maka gerakan buruh di Indonesia dilukiskan sebagai gerakan yang tercerai-berai dan tidak mampu menggunakan kebebasannya untuk membangun kekuatan politik yang diperhitungkan.²⁷ Salah satu indikator terjadinya fragmentasi yang tampak adalah kompetisi dan konflik di antara organisasi serikat buruh yang semakin banyak bermunculan. Banyak ahli, pengamat dan bahkan pengurus serikat buruh sendiri yang menilai munculnya organisasi serikat buruh bak jamur di musim hujan ini mengarah pada terjadinya perpecahan dan berakibat akan lemahnya kekuatan politik kelas buruh.

Dalam perjalanannya gerakan buruh pasca Orde Baru ini, menunjukkan bahwa kehidupan buruh tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat misalnya, meskipun pada saat ini pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai perburuhan, tetapi buruh tetap saja menerima upah yang relatif rendah dengan jam kerja panjang dan keselamatan kerja yang kurang memadai. Apalagi jika dilihat adanya lembur paksa, pengebirian peran serikat buruh/serikat

²⁶ Surya Tjandra, “UU Ketenagakerjaan dalam Konteks Gejala Informalisasi Hubungan Kerja dalam UUK: Legalisasi “perbudakan Modern”?” dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2003, Bandung: Akatiga; 27

²⁷ B. Hari Juliawan, “Menakar Ulang Fragmentasi Buruh”, dalam *Basis* No. 9-18, Tahun ke 58, September-Oktober 2009, Yogyakarta: Kanisius : 14

pekerja (SB/SP) serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang selalu membayangi kehidupan buruh pada akhir-akhir ini.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia seperti tidak pernah terselesaikan bahkan penanganan dari masalah yang satu ke masalah lain pun tidak pernah membuahkan hasil yang maksimal. Sebagai contoh, selama ini UMR (UMP/K) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 bahwa upah minimum harus sesuai biaya kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan oleh berbagai unsur termasuk di dalamnya adalah pemerintah, pengusaha dan buruh. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, maka jaminan dan penegakan hak-hak buruh dilakukan oleh negara. Negara-lah yang seharusnya menjalankan peran pengawasan dan menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran hak-hak buruh dan semestinya bertindak tegas menghadapi para pelanggar hak-hak buruh.

Kondisi semacam itu menunjukkan rendahnya posisi tawar buruh, apalagi jika krisis terus meningkat dan tak kunjung tertangani akibatnya adalah buruh semakin tidak berdaya dan semakin menyadari posisinya yang serba sulit. Salah satu penyebabnya adalah adanya asumsi bahwa di pasar tenaga kerja terjadi penawaran tenaga kerja (supply) yang sangat tinggi, akibat melimpahnya jumlah pencari kerja, pengangguran dan meningkatnya jumlah penduduk migran yang mencoba mengadu nasib mencari kerja di kota besar yang melebihi permintaan (demand), dan titik-titik lemah inilah yang seringkali disadari oleh para investor untuk membuat para buruh pasrah menerima nasib, menerima upah yang tak pernah bergerak ke taraf yang diklasifikasikan layak dan adil, sehingga pengusaha mempunyai kekuatan untuk menekan upah (pressure). Kondisi seperti ini,

mengakibatkan kekuatan tawar buruh (*bargaining-power*) semakin kecil. Dengan kondisi tertekan, maka timbul kesadaran buruh akan hak-haknya, sehingga muncul dorongan untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai pengungkapan kekuatan akan keberadaannya. Bertambahnya pengetahuan tentang UMP/K, buruh pun semakin sadar bahwa upah yang diterima belum memenuhi standar.

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini, persaingan dengan beberapa negara lain untuk menarik investor menjadi sangat ketat, masing-masing negara berusaha keras untuk menawarkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Di Indonesia cara yang dianggap menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya adalah dengan menawarkan upah buruh yang relatif rendah. Negara juga membatasi ruang gerak dan hak buruh untuk berpartisipasi secara politik dan melakukan demonstrasi, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sebaliknya, para investor atau pemilik modal dalam menjalankan usahanya juga tidak mau dirugikan, sehingga pengusaha memasukkan biaya yang sudah dikeluarkan ke dalam penghitungan harga jual produk. Konsekuensinya harga menjadi tinggi, dengan kata lain beban pengusaha dialihkan pada konsumen. Cara lain yang tidak pernah ditinggalkan oleh pengusaha adalah memindahkan beban biaya produksi tersebut pada buruh atau pekerja. Bagi pemilik modal atau investor, upah buruh merupakan biaya produksi yang paling lentur, sehingga jauh lebih mudah menekan upah buruh atau dengan

mempertahankan upah tetap rendah daripada harus berhadapan dengan kekuatan birokrasi dan pasar.²⁸

Sebagai akibatnya, kehidupan buruh tidak sejalan dengan laju produksi pabrik, dan selanjutnya melahirkan pertanyaan, mengapa prestasi produksi --kerja keras buruh dan sejumlah pengorbanan lain yang telah dikeluarkan-- tidak pernah membawa perbaikan kualitas kehidupan bagi buruh? Bahkan tuntutan untuk hidup yang lebih baik bagi buruh pun tidak pernah terpenuhi, jika aksi buruh tidak dilakukan secara bersama dan besar-besaran (kolektif). Buruh tetap menerima upah yang rendah dan dieksploitasi dengan dalih sebagai keunggulan komparatif agar investasi masuk ke Indonesia. Dalam situasi seperti ini pemerintah dan pengusaha tidak pernah menyadari bahwa buruh telah berjasa besar untuk mencapai sukses ekonomi secara makro.²⁹

Perlu untuk diketahui, bahwa sejak beberapa tahun terakhir tidak sedikit perusahaan yang henggang dari negeri ini. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain, masalah perburuhan yang secara terus menerus tidak kunjung selesai. Ada dua fenomena yang muncul sekaligus dan menarik untuk disimak, di satu sisi adanya aksi buruh dalam bentuk demonstrasi atau mogok kerja, dan di sisi lain adanya isu investor henggang alias mencabut, merelokasi, membatalkan rencana investasinya di Indonesia. Dua senjata -- aksi buruh dalam bentuk demonstrasi atau mogok kerja dan isu investor henggang dengan mencabut, merelokasi, membatalkan rencana investasi tersebut -- mempunyai fungsi yang sama yaitu sama-sama untuk menekan pemerintah.

²⁸ Sri Haryani. Hubungan Industrial di Indonesia. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN: 2002: 24

²⁹ Agung Wibawanto, Baskara dan Jirnadara, *ibid*: 135

Demonstrasi ribuan buruh dari berbagai industri/perusahaan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan kota-kota besar lain yang terjadi pada akhir-akhir ini merupakan contoh bahwa perselisihan perburuhan sampai sekarang cenderung menimbulkan ketakutan di kalangan pengusaha daripada menemukan solusi yang menguntungkan dua belah pihak. Data tentang pemogokan di Indonesia selama tahun 2007 (Januari sampai dengan Desember) sebanyak 150 kasus pemogokan dengan melibatkan 135.297 tenaga kerja dan menghilangkan jam kerja sebanyak 1.161.413 jam.³⁰ Sementara pada bulan Januari dan Februari tahun 2008 terdapat sebanyak 14 kasus pemogokan dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 17.875 orang dan sebanyak 126.525 jam kerja yang hilang.³¹ Diakui bahwa mogok kerja merupakan salah satu bentuk konflik industrial yang paling mudah dilihat dan dampaknya langsung pada proses produksi dan pendapatan pengusaha, selain mogok kerja (yang sinonim dengan tindakan buruh yang menimbulkan konflik industrial) ada juga perselisihan hubungan industrial.³² Data yang diperoleh selama tahun 2007 terjadi sebanyak 190 kasus perselisihan hubungan industrial.

Beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya kasus pemogokan, antara lain: Pertama, didasarkan pada asumsi bahwa di pasar tenaga kerja terjadi penawaran tenaga kerja (supply) melebihi permintaan (demand), sehingga kekuatan tawar buruh (bargaining-power) sangat lemah. Kedua, aspek teknologi yang mendorong efisiensi dalam skala produksi secara eksplisit akan

³⁰ Sumber : Depnakertrans, Ditjen. PHI (Data Januari s/d Desember 2007)

³¹ Sumber : Depnakertrans, Ditjen. PHI (Data s/d Februari 2008)

³² Cosmas BatuBara, Hubungan Industrial, Seri Manajemen SDM, No. 14, Jakarta, PPM, 2008

menekan jumlah penggunaan tenaga kerja. Ketiga, adalah belum terciptanya hubungan industrial yang baik akibatnya belum terbangun sistem komunikasi dua arah antara pengusaha dengan pekerja. Keempat, rasio upah yang terlalu tinggi antara buruh dan manajemen. Rasio upah di Indonesia saat ini bisa mencapai 1:50 sampai 1:250. Sebagai perbandingan di negara-negara maju rasio upah adalah 1:25 sampai 1:30. Kesenjangan upah yang terlalu jauh, misalnya antara pekerja biasa dengan level middle management serta antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing yang rasionya bisa mencapai 1:10. Padahal besarnya upah inilah sebagai salah satu pemicu timbulnya kecemburuan antar-pekerja dan mendorong timbulnya unjuk rasa.³³

Kehidupan yang makin sulit dan penderitaan yang makin besar bagi kaum buruh (dan sebagian terbesar rakyat Indonesia pada umumnya), sebagai akibat kenaikan harga kebutuhan pokok serta krisis pangan dunia yang semakin mendorong atau mengharuskan gerakan buruh Indonesia untuk menggalakkan perjuangannya di berbagai bidang. Bangkitnya secara besar-besaran gerakan buruh Indonesia untuk membela kepentingan anggota-anggotanya, merupakan sumbangan besar (dan penting sekali) kepada perjuangan bersama di bidang politik. Sebab, melalui aksi-aksi gerakan buruh itu akan terlihat dengan jelas bahwa banyak persoalan dan penderitaan yang dihadapi kaum buruh Indonesia sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh kekuasaan atau pemerintahan.

Kebangkitan gerakan buruh yang makin meluas di berbagai daerah dewasa ini merupakan perkembangan yang signifikan sebagai bentuk upaya membela

³³ www.kompas.com/read

kepentingan rakyat untuk meraih perbaikan hidup. Berkembangnya gerakan buruh di Indonesia merupakan kebutuhan yang mutlak saat rakyat sedang mengalami berbagai penderitaan yang disebabkan oleh banyaknya korupsi, dan juga oleh politik pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan sikap kritis kaum buruh terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bahkan hak-hak politiknya telah mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi meningkatnya kesadaran buruh akan berbagai haknya tersebut, tidaklah berarti persoalan kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh menjadi terpenuhi dan tidak lagi menjadi masalah. Inilah persoalannya, buruh semakin sadar akan hak-hak sipilnya, sementara kesejahteraan mereka justru semakin jauh dari kenyataan.

Secara garis besar, ada dua kecenderungan yang terjadi yaitu³⁴; Pertama, demi kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan serta untuk menciptakan peluang kerja baru dan kesejahteraan rakyat, tidak sekali-dua kali negara pada akhirnya lebih memilih jalan yang sangat pragmatis, yakni dengan cara untuk sementara waktu meminta para buruh dan masyarakat bersabar, tidak banyak mengumbar energi untuk melakukan aksi unjuk rasa. Singkat kata bersikap dan berusaha untuk mendemonstrasikan kepada dunia internasional bahwa iklim sosial-politik di Indonesia memang layak bagi keamanan dan kelangsungan investasi. Bahkan, yang seringkali terjadi, negara dalam kasus-kasus tertentu memilih jalan kekerasan dan mengandalkan pada langkah-langkah

³⁴ Sri Haryani. Ibid: 30-35

yang sifatnya represif untuk mengendalikan situasi agar tidak terjadi gejolak unjuk rasa buruh yang dapat merusak citra aman bagi dunia investasi.

Di berbagai daerah, sudah lazim terjadi bahwa yang namanya aksi unjuk rasa dan demonstrasi buruh, sedini mungkin akan selalu diregulasi dan dibatasi ruang geraknya agar tidak sampai merusak image dunia investasi,. Meskipun pada saat ini pembatasan ruang gerak aksi buruh tidak lagi dilakukan seintensif pada masa Orde Baru, tetapi ketika posisi tawar kaum buruh merosot drastis akibat krisis, jumlah pengangguran terus meluas dan tak kunjung tertangani, maka yang terjadi kemudian justru ketidakberdayaan yang makin kronis, dan tanpa jalan kekerasan pun tampaknya kaum buruh sudah menyadari posisinya yang serba sulit. Dalam konteks relasi yang sangat tidak seimbang dan ketika tidak banyak pilihan/alternatif yang dapat diakses buruh dan warga masyarakat miskin pada umumnya melakukan diversifikasi usaha, maka ruang yang tersisa pada akhirnya adalah menerima nasib: pasrah dengan keadaan dan bahkan tidak sedikit buruh yang berpikir bahwa tidak perlu cari penyakit ikut-ikutan demo, karena dalam suasana dunia usaha yang lesu seperti sekarang ini tidak di PHK pun sudah untung.

Kedua, selain membatasi ruang gerak dan hak pekerja untuk berpartisipasi secara politik dan melakukan demonstrasi, upah yang layak, yang semestinya menjadi hak pekerja, dalam banyak kasus juga dibatasi oleh negara, dan bahkan tak jarang dikorbankan dalam rangka memperkuat daya tarik bagi investor. Persaingan yang makin ketat, di mana sejumlah negara lain berusaha keras menawarkan iklim investasi yang kompetitif, maka salah satu cara yang kemudian

dianggap dapat menjadi daya tarik bagi investor agar bersedia menanamkan modalnya ke Indonesia adalah dengan cara menawarkan upah buruh yang murah.

Posisi tawar buruh dan masyarakat miskin yang rendah di tengah melimpahnya jumlah pencari kerja, pengangguran dan meningkatnya jumlah penduduk migran yang mencoba mengadu nasib mencari kerja di kota besar adalah titik-titik lemah yang seringkali sangat disadari oleh para investor sehingga membuat para buruh pasrah menerima nasib dengan menerima upah yang tak pernah bergerak ke taraf yang disebut layak dan adil, tidak ada keberanian untuk bicara dan menolak keputusan, sebab menolak bisa berarti pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Dengan kata lain bahwa permasalahan ketenagakerjaan khususnya perburuhan di Indonesia merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji. Permasalahan seperti kesejahteraan buruh, posisi tawar yang sangat rendah akibat tingginya angka pengangguran, bahkan bagi buruh yang sudah bekerja pun menghadapi berbagai permasalahan seperti upah (kesejahteraan), eksploitasi atau penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal, pembatasan hak buruh untuk berpartisipasi secara politis, melakukan demonstrasi dan permasalahan lain seperti buruh outsourcing, dan buruh kontrak. Dengan kata lain bahwa hubungan antara buruh, pengusaha dan negara tidak menunjukkan adanya keterbukaan, tidak ada saluran untuk menyampaikan pendapat, bahkan tidak ada kesempatan bagi buruh untuk terlibat dalam menyusun kebijakan. Meminjam konsepnya Collins, bahwa ritual interaksi di antara elemen yang terlibat hubungan industrial tidak terjadi atau kalau pun terjadi tidak berhasil.

Oleh karena itu, studi ini bermaksud untuk mengkaji dan memahami konflik industrial pasca Orde Baru³⁵ dari sisi buruh, apakah konflik industrial sebagai upaya untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, atautkah sebagai bentuk ekspresi kebebasan buruh untuk berpendapat, melakukan ritual interaksi. Apakah ritual interkasi dapat menghasilkan energi emosi dan modal sosial atau sebaliknya mengakibatkan terjadinya konflik. Pada saat kesadaran kaum buruh masih rendah dan dibatasi oleh kekuasaan yang regulatif, tidak banyak sikap resistensi yang muncul ke permukaan. Tetapi, pada saat ini, harus diakui kesadaran dan sikap kritis warga masyarakat, terutama kaum buruh terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya telah meningkat cukup pesat.

Ada beberapa alasan, mengapa studi ini mengkaji konflik industrial yang terjadi pasca Orde Baru, di mana pada saat ini Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan buruh. Seperti UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU no 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang membawa konsekuensi di Indonesia saat ini memiliki banyak serikat buruh (multi serikat buruh) baik yang berafiliasi pada organisasi keagamaan maupun umum, ke partai politik atau tidak. Dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini memberikan kebebasan bagi buruh/pekerja untuk berserikat, tetapi yang terjadi

³⁵ Istilah era reformasi dan pasca Orde Baru, masih menjadi perdebatan yang belum kunjung selesai. Sebagian berpendapat bahwa sejak jatuhnya Suharto sampai sekarang masih dianggap era reformasi, karena belum ada perubahan demokrasi. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa dengan adanya Pilkada langsung, dan UU desentralisasi, maka saat ini disebut sebagai era pasca Orde Baru. Artinya penyebutan pasca Orde Baru dicirikan dengan adanya perubahan dari sistem yang otoriter menjadi sistem yang demokratis. Dengan kata lain, pasca Orde Baru adalah masa/era yang dimulai sejak mundurnya Presiden Suharto, pada tahun 1998 artinya pasca Suharto sama dengan pasca Orde Baru. Studi ini menggunakan istilah pasca Orde Baru yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Suharto sampai saat ini. Selain itu, banyak studi tentang masalah ketenagakerjaan yang menggunakan istilah pasca Orde Baru, terkait dengan berbagai kebijakan yang dibentuknya terutama yang bersangkutan paut dengan ketenagakerjaan di Indonesia.

partisipasi buruh dalam berserikat makin rendah, sebagai akibat makin banyaknya jumlah perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing, yang meskipun tidak ada larangan secara tertulis, tetapi mereka enggan menjadi anggota serikat buruh/pekerja. Selain itu, UU no. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), serta adanya sejumlah peraturan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan. Sedangkan pada masa Orde Baru dengan adanya penyederhanaan jumlah partai politik membawa pengaruh pada serikat pekerja, sehingga pada masa itu hanya ada satu serikat pekerja yang diakui/dibentuk pemerintah yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang berafiliasi pada salah satu partai politik.

Selain alasan tersebut, studi ini berbeda dengan studi-studi terdahulu tentang buruh dan konflik industrial yang cenderung menggunakan perspektif Marxian, dan lebih menekankan pada konflik yang terjadi antara dua kekuatan yaitu antara pengusaha berhadapan dengan buruh, di mana masing-masing kekuatan memiliki kepentingan yang berbeda, di satu sisi pengusaha sebagai pemilik modal menghendaki keuntungan semaksimal mungkin, sementara di sisi lain buruh menginginkan upah yang tinggi. Perspektif Marxian, mengkaji konflik industrial yang didasarkan kelas pemilik dan bukan pemilik alat produksi, dan menyebutkan bahwa sumber konflik adalah kombinasi relations of production dan force of production. Pusat perhatian teori Marx dalam mengembangkan teorinya pada level struktur sosial, dan tidak memfokuskan kajiannya tentang cara individu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, tetapi pada posisi individu yang dipengaruhi oleh interaksi sosial budaya yang berdasarkan pada materi.

Sementara studi ini, bermaksud untuk mengkaji dan memahami konflik industrial yang terjadi di Surabaya, dengan menggunakan teori ritual interaksi (interaction ritual theory/IRT) atau teori konflik interaksional yang dikembangkan Collins. Menurut perspektif non-marxian, sumber konflik adalah kondisi-kondisi latent dan aktual yang memproduksi keyakinan atau kepercayaan tentang adanya tujuan-tujuan yang tak selaras, yang berasal dari konstruk teoritik atau asumsi dasar tentang sifat manusia dan proses sosial yang mengikutinya. Misalnya, secara internal, manusia memiliki insting agresif, mudah frustrasi, dan sebagainya. Secara interaksional, hubungan antar manusia dapat mengarah pada dan diwarnai oleh proses-proses sosial yang disintegrated, dan hal inilah yang secara laten maupun aktual menjadi sumber-sumber konflik.³⁶ Weber (yang menganut pandangan konflik non-marxian) misalnya menegaskan bahwa dengan metode verstehen (memberi makna mendalam), maka setiap tindakan individu sangat menentukan sistem sosial. Jadi, dalam menerangkan fakta atau realitas sosial, faktor tindakan individu sangat menentukan.

Collins, salah seorang teoretisi yang termasuk dalam perspektif non-marxian, memiliki pemikiran yang berbeda dengan pendahulunya. Jika para teoritis yang lain seperti Dahrendorf menjelaskan konflik pada level masyarakat, Collins bergerak ke arah mikrososiologi, yang mendekati konflik dari sudut pandang individu sebab akar teoretisnya terletak pada fenomenologi dan etnometodologi. Secara eksplisit Collins menyatakan bahwa manusia berada dalam suatu dunia simbol yang dikonstruksi secara sosial, dan menjelaskan bahwa konflik menjadi fokus atas dasar alasan yang realistis, karena konflik merupakan

³⁶ Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (2)*, Jakarta: PT Gramedia, 1986: 207

suatu proses sentral dalam kehidupan sosial. Collins sadar bahwa “sosiologi tidak mungkin berhasil pada hanya level mikro saja”, teori konflik tidak dapat melakukan sesuatu tanpa analisis pada level masyarakat. Meskipun analisisnya pada tingkat mikro, tetapi tetap berusaha untuk menjelaskan proses sosial dalam organisasi yang kompleks.

Sebagian besar teoretisi konflik percaya bahwa struktur sosial bersifat eksternal dan memaksa aktor, sedangkan Collins melihat struktur sosial sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari aktor yang mengonstruksinya dan pola-pola interaksinya menjadi unsur dasar, melihat struktur sosial sebagai pola interaksi daripada sebagai entitas eksternal dan koersif. Selain itu, sebagian besar teoretisi konflik melihat aktor dikekang oleh kekuatan eksternal.

Sebaliknya Collins melihat aktor secara terus menerus menciptakan dan menciptakan kembali organisasi sosial. Model konflik Collins lebih komprehensif dibanding dengan model-model sebelumnya, tidak hanya membatasi pada konflik ekonomi atau konflik dalam organisasi birokratis, tetapi pada semua institusi sosial seperti keluarga, organisasi agama, komunitas intelektual, struktur ekonomi, politik dan militer.³⁷ Sementara teori konflik Dahrendorf lebih tepat diterapkan pada organisasi yang terdapat struktur hierarki kekuasaan yaitu birokrasi.

Studi ini, bermaksud untuk memahami konflik industrial dari sudut pandang individu yang dalam hal ini adalah buruh yang masing-masing individu memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Secara umum, studi ini bertujuan untuk mengkaji ritual interaksi antara buruh dan pengusaha yang

³⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern* (Edisi terbaru), Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008: 287

mendasari terjadinya konflik industrial, dampaknya pada posisi tawar buruh, dan bagaimana buruh memaknai konflik industrial yang terjadi di era Orde Baru dan pasca Orde Baru. Studi ini memusatkan perhatian pada konflik industrial yang terjadi pasca Orde Baru, meskipun ada tulisan atau kajian konflik industrial era Orde Baru, bukan dimaksudkan untuk membandingkan antara kedua periode tersebut, tetapi permasalahan buruh di era Orde Baru merupakan suatu setting sosial (melatari) menuju era pasca Orde Baru.

Studi tentang konflik industrial ini penting untuk dilakukan, karena tidak tidak semata-mata berbasis material atau persoalan ekonomi seperti rendahnya upah buruh, hak-hak normatif buruh yang tidak terpenuhi, sehingga buruh menjadi tidak berdaya menghadapi kekuatan kapitalis, sebagai akibat sulitnya buruh dan pengusaha duduk bersama, berdialog atau berunding, serta keberpihakan pemerintah kepada pengusaha. Konflik industrial makin intensif terjadi menjelang Mayday, dan penetapan UMP/K yang melibatkan buruh, sehingga berakibat hilangnya jam kerja dalam jumlah yang besar.

1.2 Rumusan Masalah

Disertasi ini bermaksud untuk mengungkap konflik industrial yang terjadi pasca Orde Baru yang sudah berjalan lebih dari satu setengah dekade, dari perspektif non Marxian khususnya teori interaksional yang dikembangkan oleh Collins. Disertasi ini menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana ritual interaksi antara buruh dan pengusaha mendasari terjadinya konflik industrial pasca Orde Baru?

2. Apakah ritual interaksi pasca Orde Baru memperlemah atau memperkuat posisi tawar buruh?
3. Bagaimana buruh memaknai konflik industrial yang terjadi pasca Orde Baru?

1.3 Tujuan

Berbagai studi tentang konflik industrial yang telah dilakukan selama ini pada umumnya merupakan kajian yang bersifat makro, sementara studi ini secara umum bertujuan untuk memahami konflik industrial yang terjadi di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya pasca Orde Baru dari perspektif teori konflik interaksional (Interactional Ritual Theory/IRT) yang dikembangkan oleh Collins yang bersifat mikro. Teori konfliknya Collins menjelaskan dan memahami konflik industrial pada level yang lebih mikro, melihat peran aktor-aktor yang terlibat dalam konflik industrial. Secara khusus tujuan studi ini adalah:

1. Mengkaji ritual interaksi antara buruh dan pengusaha yang mendasari terjadinya konflik industrial pasca Orde baru,
2. Menjelaskan ritual interaksi yang berkembang pasca Orde Baru memperlemah atau memperkuat posisi tawar buruh.
3. Memahami makna konflik industrial di kalangan buruh.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil studi ini adalah:

1. Secara akademik diharapkan dapat menambah pengetahuan baru tentang hubungan industrial khususnya tentang konflik industrial dari perspektif teori ritual interaksi (Interaction Ritual Theory/IRT) atau teori konflik interaksional

yang dikembangkan Collins. Studi yang menelaah konflik industrial memang telah banyak dilakukan terutama dari perspektif Marxian pada tingkat makro, tetapi kajian tentang konflik industrial pada tingkat mikro relatif masih sedikit.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama bagi pihak-pihak terkait dengan masalah perburuhan (tenaga kerja), aktivis LSM perburuhan, serikat buruh, APINDO dan dinas terkait dalam merumuskan berbagai strategi dan mekanisme yang dilakukan untuk memperkecil atau setidaknya mengurangi dan mencegah terjadinya konflik industrial.

1.5. Kerangka Teori

Berbagai kajian tentang konflik, termasuk konflik industrial sesungguhnya telah sejak lama menjadi perhatian teoretisi ilmu sosial, baik dari perspektif Marxian, Neo-Marxian, maupun Non-Marxian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan konflik (industrial) merupakan realitas sosial yang selalu terjadi dan bahkan tidak akan pernah berhenti, sepanjang dalam masyarakat ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan strata yang berbeda.

Setidaknya Marx³⁸ menjelaskan bahwa selama dalam masyarakat terdapat dua kelompok dalam relasi produksi, yaitu kelompok yang memiliki/pemilik dan kelompok yang tidak memiliki/bukan pemilik (struktur kelas), maka pemisahan antara kelompok sosial yang menghasilkan profit –karenanya menguasai kapital-- dan kelompok sosial yang hanya mampu menjual tenaga kerja saja akan menentukan pola dan dinamika hubungan kelas yang terjadi.³⁹ Sementara menurut

³⁸ C. Wright Mills. *Kaum Marxis, Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003: 39-42

³⁹ C. Wright Mills, *ibid*, 43

perspektif struktural konflik, perbedaan kepentingan dan kelas sosial inilah sesungguhnya dimensi utama posisi kelas dan pandangan subjektif umumnya dari orang tersebut. Akan tetapi ada perbedaan dengan Dahrendorf, Collins tidak menggunakan model hubungan otoritas dua kelas. Hubungan otoritas atau hubungan kekuasaan menurut Collins dilihat sebagai suatu persebaran hirarkis yang berkesinambungan dan mencerminkan sejumlah orang yang diberi perintah, yang menjadi basis terjadinya eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat modern yang semakin industrial.⁴⁰ Sementara Collins menjelaskan bahwa konflik menjadi fokus kajiannya didasarkan pada alasan yang realistis, bahwa konflik merupakan suatu proses sentral dalam kehidupan sosial.⁴¹ Oleh karena itu konflik selalu saja terjadi dalam semua kehidupan bermasyarakat, baik pada tingkat individu, keluarga, organisasi, masyarakat maupun pada tingkat yang lebih besar.

Dalam perkembangan ilmu sosial, ada banyak perspektif dan teori yang dapat digunakan untuk mengkaji konflik kelas maupun konflik industrial, yang masing-masing perspektif tentu saja memiliki keunggulan dan mungkin juga kelemahan. Oleh karena itu, uraian dimulai dari awal perkembangan teori konflik, dilanjutkan dengan uraian tentang teori-teori yang masuk dalam perspektif Non-Marxian guna memahami konflik industrial. Untuk mengkaji permasalahan konflik industrial, studi ini menggunakan perspektif Non-Marxian khususnya teori ritual interaksi (Interaction Ritual Theory/IRT) atau teori konflik interaksional sebagaimana yang dikembangkan oleh Collins.

⁴⁰ Nur Sayid Santosa Kristeva. Negara Marxis dan Revolusi Proletariat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011: 12-15

⁴¹ George Ritzer. Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Posmodern (Edisi Kedelapan 2012), Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 459

1.5.1 Perkembangan Teori Konflik

Untuk melacak perkembangan teori konflik, perlu dilihat kembali pada masa-masa dominasi teori struktural fungsional dari Talcott Parsons.⁴² Selama tahun 1950an, pemikiran Parsonian begitu populer dan menjadi mainstream perkembangan teori sosial. Akan tetapi, sepeninggalnya pada tahun 1960-an, dominasi teori Parsonian mulai berkurang, dan menuai banyak gugatan. Teori fungsional dalam sosiologi, khususnya Parsonian, dilihat kurang menekankan pada konflik sebagai realitas sosial alami. Oleh karena itu, terjadi serangan terhadap teori Parsonian secara terus menerus, bahkan menjadi semacam seremonial bagi ahli sosiologi yang mencari arah teoretis baru membawa sosiologi keluar dari inti teoretisnya yang semula didominasi teori struktural fungsional, ke arah baru yaitu teori konflik.⁴³

Teori konflik lahir dalam masyarakat yang mengalami pergeseran atau perubahan nilai dan struktural serta dinamika kekuasaan yang terjadi dalam suatu negara. Kondisi sosiohistoris ini kemudian membentuk pemikiran sosiologi konflik. Georg Simmel adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi konflik dalam artikelnya yang berjudul *The Sociology of Conflict* tahun 1903 yang dimuat dalam *American Journal of Sociology* pada tahun 1903. Oleh karena itu, meskipun tidak secara langsung, I. Bryan S. Turner juga memberikan suatu penghargaan kepada Simmel sebagai penggagas sosiologi konflik.⁴⁴ Memang banyak ilmuwan sosial yang tidak memasukkan karya-karya Simmel sebagai

⁴² George Ritzer & Barry Smart., *Handbook Teori Sosial*, Jakarta: Nusa Media bekerjasama dengan Diadit Media, 2011: 283-284

⁴³ Antohony Giddens dan Jonathan H. Turner. *Social Theory Today: Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial (Edisi Bahasa Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008: 54-55

⁴⁴ Bryan Turner. *Classical Sociologi*, London, Sage Publication, 1999: 147. Dalam Novri Susan. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta Prenada Media, 2009 : 27

sosiologi konflik, tetapi sumbangan akademis untuk ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya sangat besar.⁴⁵

Berbeda dengan Marx yang hidup pada masa setelah terjadi dua revolusi besar pecah di Eropa, yaitu pertama, Revolusi Politik Kaum Borjuis di Perancis yang mengantarkan kaum borjuis berkuasa dalam bidang politik dan ekonomi, akibatnya perkembangan ekonomi kapitalis dan industri sangat cepat; dan kedua, Revolusi Industri di Inggris, dengan ditemukannya mesin-mesin, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran, kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan di kalangan buruh makin meningkat.⁴⁶ Melihat kondisi tersebut, Marx bangkit dengan pikiran yang sangat kritis terhadap keadaan sosial yang terjadi pada waktu itu. Menurutnya, ada dua pihak yang menindas rakyat, yaitu di kota mereka ditindas dan dihisap oleh kaum kapitalis, sementara di desa penindasan dan penghisapan dilakukan oleh tuan tanah, sehingga untuk membebaskannya dilakukan dengan melawan kelas kapitalis dan menghancurkan sistem kapitalisme, Marx menyebutnya dengan perjuangan kelas.

Pertentangan antara kelas kapitalis dan kelas buruh tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, karena kelas kapitalis yang memiliki kekuasaan ekonomi, sosial dan politik tidak akan menyerahkan kekuasaannya pada kelas buruh. Sebaliknya kelas buruh pun tidak dapat mengubah nasibnya, kecuali dengan melawan kelas kapitalis secara serentak untuk merebut kekuasaan ekonomi, sosial dan politik.⁴⁷

⁴⁵ George Ritzer. 2012: 270-272

⁴⁶ Novri Susan. Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta Prenada Media, 2009 : 14

⁴⁷ Stephen Resnick and Richard Wolf (Editors). Rethinking Marxism, Struggles in Marxist Theory, USA: Autonomedia, 1985: 23-25

Marx mengembangkan teorinya karena kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggap mengeksploitasi buruh.⁴⁸ Sejarah masyarakat manusia Menurut Marx adalah sejarah berbagai macam sistem produksi yang berbasis eksploitasi kelas, di mana setiap episode didominasi oleh mode produksi tertentu, dengan hubungan kelas yang khas.⁴⁹ Marx mengakui bahwa konflik bersumber dari perubahan model produksi (mode of production): 1) pada masa perbudakan, konflik/pertentangan terjadi antara kelas tuan berhadapan dengan kelas budak; 2) pada masa feodalisme, konflik melibatkan kelas bangsawan dan kelas hamba; 3) masa kapitalisme ditandai adanya pertentangan kelas borjuis dengan kelas proletar; 4) pada masa sosialisme terjadi penghapusan kelas, sehingga masyarakat tanpa kelas; dan 5) pada masa komunisme tercipta masyarakat ideal, yaitu masyarakat komunal yang sesungguhnya.⁵⁰ Pemisahan antara kelas sosial yang menghasilkan profit dan kelompok sosial yang hanya mampu menjual tenaga kerja, menentukan hubungan kelas, dan menjadi basis eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat modern.⁵¹

Di dalam hubungan kelas, menyangkut relasi sosial⁵²: pertama, hubungan-hubungan produksi yang bersifat primer seperti hubungan buruh dan majikan; kedua, hubungan-hubungan produktif yang bersifat sekunder seperti serikat buruh, asosiasi pemilik modal dan pola-pola dasar kehidupan keluarga yang berkaitan erat dengan sistem produksi kapitalistik; ketiga, hubungan-hubungan politik dan

⁴⁸ Suar Suroso. *Marxisme: Sebuah Kajian*, Dinyatakan Punuh Ternyata Kiprah, Jakarta, Hasta Mitra, 2009: 98

⁴⁹ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-moderinisme*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009: 78-79

⁵⁰ Ralf Dahrendorf. *Essays in the Theory of Society*, Stanford, California.: Stanford University Press, 1968: 56-89

⁵¹ Ernest Mandel. *ibid*: 40

⁵² George Ritzer. 2012, *Ibid*: 103-104

sosial yang bersumber dari hubungan produksi primer dan sekunder, lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lain yang mencerminkan hubungan buruh dan majikan.

Sebagai teoretisi, Marx memberi esensi akademis mengenai realitas kekuasaan kelas terhadap kelas lain yang lemah dan konflik kelas atas fakta eksploitasi. Selain memberi kontribusi yang cukup besar pada perkembangan teori berikutnya, teori ini juga memiliki kelemahan antara lain teori konflik Marx lebih tepat diterapkan pada awal perkembangan kapitalisme, di mana pemilik alat produksi mengontrol penggunaannya, tetapi tidak berarti ada hubungan antara pemilikan dan kontrol. Di samping itu pusat perhatian Marx dalam mengembangkan teorinya pada tingkat struktur sosial, tidak fokus pada kajian tentang cara individu menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, melainkan pada posisi individu yang dipengaruhi oleh tindakan interaksi sosial budaya yang berlandaskan pada materi.⁵³ Menurut Marx, realitas ekonomi menentukan perilaku manusia, artinya ekonomi menjadi determinan untuk semua sektor masyarakat. Pemikiran determinisme ekonomi ini meyakini bahwa kehancuran kapitalisme sebagai sesuatu yang tak terelakkan.

Aliran neo-marxian menolak determinisme ekonomi marxisme ortodoks dan menekankan peran kesadaran kelas proletariat sebagai subjek dialektika sejarah. Dua tokoh penting yang dibahas yaitu Georg Lukacs dan Antonio Gramsci. Georg Lukacs dalam teorinya tentang konflik mengembangkan dua

⁵³ Nur Sayid Santosa Kristeva. *Ibid* : 87-89

konsep yang sangat terkenal, yaitu reifikasi dan kesadaran kelas serta kesadaran palsu.⁵⁴

Reifikasi adalah tereduksinya hubungan antarmanusia menjadi relasi alat produksi. Proposisi dasar reifikasi adalah “penurunan” nilai relasi manusia yang seharusnya hangat menjadi hubungan antar “manusia” karena kepentingan ekonomi.⁵⁵ Kekhasan masyarakat kapitalis adalah bahwa semua hubungan antarmanusia dikuasai oleh hukum pasar, hubungan antarmanusia, dimengerti sebagai bentuk komoditi, barang untuk diperjual-belikan. Lukacs menunjukkan asumsinya bahwa relasi antara orang dengan orang mengambil karakter relasi antara benda dengan benda, karena itu memperoleh semacam ‘objektivitas khayali’ (phantom objectivity), yaitu otonomi yang seolah-olah begitu rasional dan menyeluruh sehingga menutupi setiap jejak hakikat terdasarnya yaitu relasi antara orang dengan orang.⁵⁶ Dalam kaitannya dengan studi ini, hubungan antara buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang terjadi melalui tawar menawar dan bersifat kontaktual. Pengusaha menawarkan pekerjaan atau lapangan pekerjaan, sementara buruh menawarkan tenaga kerja, jika masing-masing pihak setuju dengan harga masing-masing, kemudian kontrak dilakukan antara kedua belah pihak.

Konsep kesadaran kelas mengacu pada sistem keyakinan yang dimiliki bersama oleh mereka yang menempati posisi kelas yang sama dalam masyarakat. Kesadaran kelas bukanlah penjumlahan kesadaran individu, tetapi menjadi milik sekelompok orang yang memiliki tempat serupa dalam sebuah sistem produksi.

⁵⁴ Georg Lukacs. *Dialektika Marxis: Sejarah & Kesadaran Kelas*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2010: 150. (Edisi bahasa Indonesia), diterjemahkan dari *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*.

⁵⁵ George Ritzer. *Modern Sociological Theory*, Fourth Edition, Singapura: The McGraw-Hill Companies, Inc. , 1996: 142-143

⁵⁶ Georg Lukacs. *Dialektika Marxis: Sejarah & Kesadaran Kelas*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2010, *ibid*: 158.

Sedangkan menurut Marx, kesadaran kelas pada kelas yang tidak memiliki yaitu kelas orang-orang tertindas yang bekerja pada sistem produksi, sementara Lukacs berpendapat bahwa kelas pemilik pun memiliki kesadaran kelas juga. Seperti dikemukakannya bahwa konsep ini mengarah pada kelas borjuasi dan khususnya proletariat.⁵⁷ Munculnya kesadaran kelas mengisyaratkan adanya kesadaran palsu yang terjadi dalam masyarakat sebelumnya, artinya kelas-kelas dalam masyarakat kapitalis pada umumnya tidak menyadari kepentingan kelas yang sebenarnya. Sebagai contoh bahwa anggota kelompok proletariat tidak menyadari adanya eksploitasi yang dialami dalam sistem kapitalisme. Jadi kesadaran kelas berarti ketidaksadaran atas kondisi ekonomi dan sosio historis seseorang yang dikondisikan oleh kelas; 'kepalsuan'. Lukacs menyimpulkan bahwa dalam masyarakat yang seluruh hubungan sosialnya didasarkan pada basis ekonomi tak mungkin tercipta kesadaran kelas, sebaliknya, basis ekonomi kapitalisme makin jelas dan makin sederhana. Orang semakin menyadari pengaruhnya, setidaknya sadar akan ketidaksadarannya selama ini.

Kelas borjuis memiliki semua senjata intelektual dan organisasional, sedangkan kelas proletar memahami masyarakat sebagaimana adanya sehingga berubah dari "kelas dalam dirinya sendiri" menjadi "kelas untuk dirinya sendiri". Perjuangan kelas proletar ditingkatkan dari tuntutan ekonomi ke tingkat kesadaran kelas yang efektif dan menyadari tujuan yang hendak dicapai.⁵⁸

Sedangkan perhatian Gramsci pada hegemoni karena situasi politik pada saat ia hidup dan menjadi pemimpin intelektual dari gerakan massa proletar di Turin. Sebagai anggota kunci dari Partai Sosialis Italia, dan partai Komunis Italia,

⁵⁷ Ritzer dan Goodman; 2008, ibid: 298

⁵⁸ Georg Lukacs, 2010. ibid : 159-161

Gramsci melihat kegagalan massa buruh revolusioner dan bangkitnya fasisme reaksioner yang mendapat dukungan massa kelas pekerja. Kegagalan gerakan buruh itulah yang menjadikannya punya gagasan berupa suatu alternatif Marxisme terhadap negara, yaitu suatu kesatuan komplek dari kegiatan teori dan praktik, di mana kelas yang berkuasa tidak hanya membenarkan dan memelihara dominasinya, tetapi juga mengatur untuk memenangkan konsensus aktif dari yang diatur.

Berbeda dengan Marx yang melihat perlawanan kaum buruh tidak terjadi karena adanya kesadaran palsu, Gramsci melihat ketertundukkan kelas buruh, karena kelas penguasa memaksakan visi hegemoni mereka dengan berbagai institusi suprastruktur, seperti sekolah, media, agama, dan praktik manusia sehari-hari. Gramsci dalam pemikirannya mengakui pentingnya faktor struktural, khususnya ekonomi, tetapi tidak percaya bahwa faktor inilah yang mendorong massa untuk melakukan pembangkangan, sehingga perlu mengembangkan ideologi revolusioner, walaupun tidak dilakukannya sendiri. Menggunakan konsep yang agak elitis di mana gagasan dibangun kelompok intelektual, diperluas ke massa dan dipraktikkannya, karena massa tidak memiliki kemampuan untuk membangun gagasan, Gramsci juga melihat pentingnya gagasan kolektif, bukan sekedar struktur sosial ekonomi. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa, tidak dengan cara paksaan melainkan dengan cara memobilisasi kebijakan.⁵⁹

Konsep hegemoni yang dikembangkan Gramsci merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih

⁵⁹ Jones, Pip, 2009, Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teoeri Fungsionalisme hingga Post-moderinisme, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 100

tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain Gramsci mengubah pengertian hegemoni sebagai sebuah strategi menjadi sebuah konsep yang merupakan kata kunci utama dalam memahami dinamika kapitalisme, seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara

Untuk melakukan analisis tentang pertentangan antara kelas borjuis dan kelas pekerja untuk meraih hegemoni, Gramsci membedakan secara tegas strategi yang digunakan masing-masing pihak. Kaum borjuis yang memiliki karakter khusus mengembangkan strategi yang oleh Gramsci disebut dengan Revolusi Pasif (*passive revolution*). Revolusi pasif ini sebagai respon yang dilakukan secara khas oleh kaum borjuis, ketika hegemoni yang dikembangkan mulai terancam, sehingga diperlukan proses pengorganisasian kembali secara total untuk menarik kembali kekuatan hegemoniknya. Kedudukan kaum borjuis tidak didasarkan pada kekuatan ekonomis dan politis, tetapi karena kemampuan borjuasi membangun pikiran dan sistem nilai yang dipercaya seluruh masyarakat. Sementara kaum buruh dan kaum tertindas lainnya menerima kedudukan borjuasi, karena dianggap wajar dan diterima sebagai sesuatu yang bersifat *given*.

Dalam beberapa referensi, aliran neo-marxian disebut juga sebagai aliran teori kritis. Kajian teori kritis, memandang realitas sosial masyarakat dalam bentuk kritik atas setiap struktur masyarakat berdasarkan kriteria etik kemanusiaan dan berkehendak bebas. Teori ini bersifat emansipatoris hendak membebaskan manusia dari belenggu struktur yang tidak rasional, semacam kapitalisme, IPTEK.

1.5.2. Teori Konflik Non-Marxian

Menurut pandangan non-Marxian, terjadinya konflik bersumber pada kondisi-kondisi laten dan aktual yang menghasilkan keyakinan atau kepercayaan tentang adanya tujuan-tujuan yang tak selaras. Asumsi dasar tentang sifat manusia dan proses sosial yang mengikutinya, adalah secara internal, manusia memiliki insting agresif, mudah frustrasi, dan sebagainya. Secara interaksional, hubungan antar manusia dapat mengarah pada dan diwarnai oleh proses-proses sosial yang disintegrated. Inilah yang menurut pandangan Non-Marxian secara laten maupun aktual merupakan sumber terjadinya konflik.

Teori ini sangat berbeda dari teori Marx karena menganalisis konflik tanpa memperhitungkan politik ekonomi yang ada (apakah kapitalisme atau sosialisme). Jika Marx bersandar pada kepemilikan alat produksi, maka Dahrendorf bersandar pada kontrol atas alat produksi. Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa pos-kapitalisme, kepemilikan alat produksi (baik sosialis atau kapitalis) tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi. Jadi, di luar Marxisme, ia mengembangkan beberapa terminologi bahwa sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif melalui otoritas (kekuasaan). Pengembang teori non-marxian antara lain George Simmel yang dilanjutkan oleh Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, dan Randall Collins. Ada juga yang menggolongkan Max Weber dan seluruh pengikutnya (Weberian) sebagai penganut pandangan konflik Non Marxian. Jelaslah mereka yang beraliran Non Marxian bertentangan dengan aliran Marx dan Neo Marxian. Weber misalnya menegaskan bahwa dengan metode verstehen (memberi makna mendalam), maka setiap tindakan individu sangat

menentukan sistem sosial. Jadi, dalam menerangkan fakta atau realitas sosial, faktor tindakan individu sangat menentukan.

Studi ini bermaksud mengkaji konflik industrial dengan menggunakan perspektif non-Marxian, khususnya teori konflik interaksional (teori ritual interaksi) sebagaimana yang dikembangkan oleh Collins. Sebelum membahas tentang teori konflik interaksional (teori ritual interaksi atau interaction ritual theory), diuraikan secara ringkas pemikiran para teoritis yang masuk dalam perspektif non-Marxian

1.5.2.1 Teori Sosiasi Tentang Konflik: Georg Simmel⁶⁰

Menurut Turner⁶¹, kunci perspektif sosiologi Simmel secara umum adalah relasionalisme, sosiasi dan bentuk-bentuk sosial. Pendekatan Simmel⁶² meliputi identifikasi dan analisis bentuk-bentuk yang berulang-ulang atau pola “sosiasi” (sociation). Relasionisme menunjuk bahwa tidak ada unsur-unsur sosial yang dapat dipahami melalui isolasi, tetapi selalu dalam kondisi saling berkaitan dengan totalitas. Bentuk-bentuk sosial menunjuk pada keberadaan lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, bentuk pertukaran sosial, jaringan dan lain sebagainya.

Menurut Simmel, bentuk-bentuk sosiasi antara lain superordinasi dan subordinasi, kompetisi, pembagian kerja, pembentukan partai, perwakilan,

⁶⁰ Georg Simmel lahir tahun 1858, di pusat Kota Berlin, pada saat dewasa Simmel mempelajari filsafat dan sejarah, sehingga menjadi seorang ilmuwan murni. Simmel menerima gelar doctor dari Universitas Berlin tahun 1881 dan mulai mengajar pada tahun 1885 di Universitas Berlin. Pada tahun 1914, Simmel menerima gelar professor penuh pada Universitas Strasbourg.. Simmel dikenal sebagai bapak sosiologi konflik, yang selain istilahnya, Simmel juga menganalisis secara komprehensif mengenai sosiologi konflik.

⁶¹ Bryan Turner. *Classical Sociology*. London: Sage Publication, 1999: 147-149

⁶² Paul Johnson, *ibid*:257

solidaritas ke dalam, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini dapat dimanifestasikan dalam “negara, komunitas agama, komplotan, asosiasi ekonomi, keluarga dan sebagainya”.⁶³ Dengan demikian, fenomena konflik juga dipandang sebagai bentuk sosiologi. Proses sosiologi dapat mengubah suatu kumpulan individu menjadi suatu masyarakat (atau kelompok) atau menimbulkan asosiasi karena sejumlah individu terjalin melalui interaksi dan saling mempengaruhi. Selain asosiasi, proses sosiologi dapat pula menimbulkan dissosiasi di mana individu-individu yang berinteraksi saling bermusuhan adanya feeling of hostility secara alamiah. Bahkan Simmel menjelaskan bahwa unsur-unsur dissosiasi inilah yang merupakan sebab-sebab terjadinya konflik seperti kebencian, kecemburuan, keinginan dan nafsu).⁶⁴

Simmel memberikan beberapa contoh yang menunjukkan individu-individu tidak hanya sekedar melibatkan diri dalam konflik, tetapi juga semangat dalam berkonflik, untuk menjelaskan bagaimana konflik alamiah itu ada dalam kehidupan sosial. Konflik memang menjadi perhatian Simmel, tetapi proses organik yang menjadi tujuan utama Simmel adalah integrasi sistem sosial, sehingga konflik dapat memelihara keseluruhan sosial dan atau bagian-bagiannya.⁶⁵

Simmel melihat konflik sebagai refleksi lebih dari konflik kepentingan, tetapi juga dari insting bermusuhan, sementara insting seperti itu dihasilkan karena konflik kepentingan, atau hubungan harmonis. Simmel berusaha menganalisis konsekuensi positif dari konflik untuk mempertahankan keseluruhan sosial serta sub-sub-unitnya, sehingga hostile impulse tidak dilihat sebagai kontradiksi atau kanker bagi organik secara keseluruhan, melainkan sebagai salah

⁶³ Georg Simmel. *The Sociology of Georg Simmel*, New York: Free Press, 1950: 40

⁶⁴ Georg Simmel. “*The Sociology of Conflict*”, I. (*American Journal of Sociology* 9): 1903: 177

⁶⁵ Jonathan H. Turner, *ibid*: 128

satu dari proses mempertahankan tubuh sosial. Oleh karena itu, analisis konfliknya Simmel masih diarahkan pada bagaimana konflik meningkatkan solidaritas dan unifikasi.⁶⁶

Simmel tidak mengembangkan proposisi tentang penyebab utama konflik, tetapi lebih memfokuskan pada intensitas atau derajat kekerasan atau kondisi konflik pada saat dimulai dan konsekuensi konflik bagi pihak-pihak yang berkonflik serta bagi keadaan sistemik secara keseluruhan. Pertimbangan utama Simmel ketika menganalisis bentuk disosiasi pada sistem sosial adalah dengan derajat kekerasan konflik. Teori konflik yang dikembangkan Simmel lebih memusatkan perhatian pada konsekuensi konflik bagi pihak-pihak yang berkonflik dan secara keseluruhan dalam masyarakat.

Studi tentang konflik industrial yang tengah dilaporkan ini, memang tidak mengkaji akibat konflik bagi buruh dan aktivis buruh secara eksplisit, tetapi menjadi bagian dalam analisis tentang makna konflik industrial di kalangan buruh dan aktivis buruh.

1.5.2.2 Fungsionalisme konflik: Lewis Coser

Dengan makin meluasnya kritik terhadap fungsionalisme, maka Coser menawarkan skema konflik sebagai alternatif. Meski pun Coser secara konsisten mengkritisi fungsionalisme Parsonian karena gagal mengatasi isu konflik, tetapi Coser dengan tajam juga mengkritik Dahrendorf yang kurang menekankan fungsi positif konflik untuk menjaga sistem sosial. Kedua kritik itulah yang mendorong

⁶⁶ George Ritzer dan Douglas J Goodman, 2008: ibid: 175

Coser merumuskan suatu skema teoretis yang melengkapi teori fungsional dan konflik-dialektis.⁶⁷

Dalam karyanya tentang konflik, Coser melemparkan suatu polemik khas terhadap fungsionalisme, yaitu konflik kurang mendapat perhatian, bahkan fenomena penyimpangan dengan mudah dipandang sebagai “patologis” dalam sistem sosial yang seimbang. Parsons kurang menekankan konflik dalam analisis formalnya, dan melihat konflik sebagai suatu “penyakit” yang perlu “diobati” dengan “mekanisme” “tubuh sosial”. Coser membuat keseimbangan, di satu sisi analisis memfokuskan fungsionalisme-Parsonian dan sisi lain pada fenomena konflik.

Karya Lewis Coser, yang terkenal adalah *The Functions of Sosial Conflict*, mengandung suatu upaya untuk mempertemukan implikasi-implikasi dari fungsionalisme dan teori konflik. Coser mendasarkan analisisnya pada ide-ide Simmel, dengan melakukan perubahan. Simmel menekankan pada ide bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mendasar, dan proses konflik dikaitkan dengan bentuk alternatif seperti kerjasama, sementara perhatian Coser tidak pada hubungan timbal balik yang kompleks dan tidak kentara antara bentuk konflik dan interaksi antarpribadi, tetapi pada konsekuensi konflik untuk keseluruhan sistem sosial yang lebih besar di mana konflik terjadi⁶⁸. Pusat perhatiannya adalah bahwa konflik tidak harus merusak atau disfungsional untuk sistem di mana konflik terjadi, tetapi konflik itu dapat mempunyai konsekuensi positif atau menguntungkan bagi sistem itu.

⁶⁷ Lewis A. Coser. *The Functions of Sosial Conflict*. London, The Free Press, 1964: 22-23

⁶⁸ Jonathan H. Turner, *ibid*: 169

Coser mengembangkan serangkaian proposisi yang agak luas mengenai fungsi (dan juga disfungsi) konflik bagi sistem sosial:

1. Konflik Antarkelompok dan Solidaritas Kelompok-Dalam

Fungsi positif konflik yang paling jelas terdapat dalam dinamika kelompok-dalam (in-group) versus hubungan kelompok-luar (out-group). Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok-dalam itu bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Sebaliknya jika kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas dan komitmen terhadap kelompok akan berkurang.⁶⁹ Konflik eksternal (external conflict) mampu menciptakan dan memperkuat identitas kelompok. Sebagai misal bahwa antarkelompok atau organisasi buruh seringkali terjadi konflik akan tetapi ketika buruh ditindas oleh pengusaha maka buruh-buruh yang berkonflik tersebut bersatu untuk menghadapi kelompok pengusaha.

2. Konflik dan Solidaritas dalam Kelompok

Konflik internal dapat mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan kelompok, tetapi ironisnya ada tidaknya konflik terbuka menjadi indikator yang menyesatkan tentang kekompakan atau solidaritas kelompok itu. Kelompok di mana sering terjadi konflik terbuka sebenarnya memiliki solidaritas yang lebih besar daripada kelompok yang tidak ada konflik sama sekali.⁷⁰

3. Konsekuensi Dipekannya Konflik

Ada dua konsekuensi dipendahnya konflik yaitu: 1) dapat mengakibatkan putusnya hubungan. Jika keterlibatan emosional para anggotanya tinggi, maka

⁶⁹ Lewis A Coser, *ibid*: 35

⁷⁰ Jonathan H Turner, *ibid*: 166

hubungan akan berakhir cepat dengan meledak secara tiba-tiba dan parah. 2) dapat mengelakkan perasaan bermusuhan dari sumber yang sesungguhnya dan mengembangkan suatu saluran alternatif untuk mengungkapkannya. Alternatif itu disebut katup pengaman (safety valve) di mana dorongan-dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusak solidaritas.⁷¹

4. Konflik realistik versus non-realistik dan Perubahan Sosial

Coser membedakan konflik "realistik" dan "non-realistik." Konflik realistik merupakan suatu alat untuk suatu tujuan tertentu, jika tujuan itu tercapai mungkin akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik itu. Sebaliknya konflik non-realistik mencakup ungkapan permusuhan sebagai tujuannya sendiri. Konflik realistik diarahkan kepada obyek konflik, sedang konflik non-realistik membelok dari objek konflik yang sebenarnya. Sedangkan konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis seperti konflik antar agama, antar etnis dan sebagainya. Konflik non-realistik merupakan suatu cara untuk menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas suatu kelompok.⁷²

5. Konflik Sebagai Stimulus Integrasi Antarkelompok

Menurut Coser, suatu konflik dapat menghasilkan perubahan sifat hubungan antara kelompok-dalam dan kelompok lainnya, dapat memperkuat batas antara kelompok-dalam dan kelompok-luar serta meningkatkan usaha menggalang solidaritas kelompok-dalam. Selain perubahan, konflik yang berkepanjangan juga dapat mengembangkan ikatan sosial di antara pihak-pihak yang saling

⁷¹ Lewis Coser. *ibid*: 39 dan Doyle Paul Johnson. *ibid*: 201

⁷² Lewis Coser. *ibid*: 48

bertentangan.⁷³ Selain itu, konflik dapat mendorong usaha diadakannya persekutuan dengan kelompok-kelompok lain. Dengan kata lain, konflik tidak merusak solidaritas masyarakat keseluruhan tetapi sebaliknya mampu meningkatkan solidaritas, bahkan konflik dapat pula membuka peluang terjadinya integrasi antar kelompok.

Di sini Coser menunjukkan bagaimana konflik memiliki fungsi terhadap sistem sosial, dan menolak bahwa hanya konsensus dan kerjasama yang memiliki fungsi terhadap integrasi sosial.

1.5.2.3 Konflik dan Kekuasaan: Ralf Dahrendorf

Dahrendorf adalah salah satu dari kritikus yang menolak kaum fungsionalis yang menekankan pada integrasi, nilai dan konsensus normatif, serta stabilitas karena dianggap berat sebelah. Dahrendorf mendasarkan teorinya pada perspektif Marxis modern dan menerima berkembangnya konflik sosial yang didasarkan pada oposisi kepentingan kelas dan konsekuensi konflik dalam melahirkan perubahan sosial.

Dahrendorf menjelaskan konflik antar kelompok-kelompok terkoordinasi (Imperatively Coordinated Associations) dan bukan analisis perjuangan kelas, tentang elit dominan daripada pengaturan kelas, serta manajemen pekerja daripada modal dan buruh.⁷⁴ Gambaran Dahrendorf⁷⁵ tentang tatanan sosial menjelaskan bahwa pelembagaan melibatkan penciptaan “asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif” (selanjutnya disingkat ICAs – Imperatively Coordinated Associations),

⁷³ Doyle Paul Johnson. Ibid: 204-205

⁷⁴ Donald Mc Quarie. Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-modernity, New Jersey: Prentice Hall, 1995: 66

⁷⁵ Ralf Dahrendorf. 1959, ibid: 142-189

berdasarkan kriteria yang tidak ditentukan dan menggambarkan perbedaan peran organisasi. Dalam organisasi industri itu bisa berupa organisasi pengusaha (di Indonesia ada APINDO) dan organisasi buruh (serikat buruh/serikat pekerja). Organisasi ditandai dengan hubungan kekuasaan, di mana beberapa kelompok yang memiliki kekuasaan memaksa pihak lain, dan ketika kekuasaan menunjukkan adanya koersi pada pihak lain, hubungan kekuasaan dalam ICAs cenderung terlegitimasi, sehingga dapat dipandang sebagai hubungan otoritas di mana beberapa posisi memiliki “sesuatu yang diterima” atau “hak normatif” untuk mendominasi pihak lain. Oleh karena itu, menurut Dahrendorf “tatanan sosial” dapat dipelihara dengan proses penciptaan hubungan otoritas dalam banyak jenis ICAs yang ada di semua lapisan sistem sosial. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik hanya akan muncul melalui relasi-relasi dalam sistem sosial. Dengan demikian individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam suatu sistem tidak akan terlibat dalam konflik. Unit analisis sosiologi konflik menurut Dahrendorf adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial yang bisa bersama sebagai sistem sosial.⁷⁶ Lebih lanjut disebutkan bahwa memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan yang didefinisikan sebagai “kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari dasar kemungkinan itu menyerah”.

Sementara Wallace dan Wolf menjelaskan bahwa esensi kekuasaan sebagaimana dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberi berbagai perintah dan

⁷⁶ Ralf Dahrendorf. 1959, *ibid*: 164-165

mendapatkan apa yang diinginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan.⁷⁷ Dengan kata lain bahwa konflik kepentingan menjadi fakta yang tidak terelakkan baik oleh yang memiliki kekuasaan maupun yang tidak memiliki kekuasaan. Pada masyarakat industrial, kekuasaan sama artinya dengan wewenang (authority). Dalam organisasi industri yang dimaksud dengan pemilik kekuasaan adalah para pemilik modal dan manajemen yang memberikan perintah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan yaitu buruh hanya memiliki tenaga.

Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan otoritas adalah sumber daya langka di mana masing-masing kelompok bersaing dan berjuang, sekaligus sebagai sumber utama konflik dan perubahan dalam pola kelembagaan.⁷⁸ Konflik merupakan refleksi dari sekelompok peran yang terkait dengan otoritas, karena “kepentingan objektif” pada setiap peran merupakan fungsi langsung dari peran pemilik otoritas dan kekuasaan atas peran yang lain. Otoritas dapat digambarkan dalam dua jenis peran dasar, yakni penguasa dan yang dikuasai, di mana kelompok yang berkuasa mempunyai “kepentingan” di dalam mempertahankan status quo dan kelompok yang dikuasai memiliki “kepentingan” pada redistribusi kekuasaan atau otoritas. Dalam kondisi tertentu, kesadaran akan kepentingan yang bertentangan meningkat, sehingga terpolarisasi ke dalam dua kelompok konflik, yang masing-masing menyadari akan kepentingan objektifnya, kemudian terlibat dalam persaingan kekuasaan. Dalam hubungan industrial dua jenis peran dasar tersebut adalah penguasa dan yang dikuasai, di mana kelompok yang berkuasa (pengusaha) mempunyai “kepentingan” di dalam mempertahankan agar usaha

⁷⁷ Wallace dan Wolf. *Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-modernity*, New Jersey: Prentice Hall, 1995: 145

⁷⁸ Jonathan H. Turner. *ibid*: 144

terus berkembang dan kelompok yang dikuasai (buruh) memiliki “kepentingan” pada redistribusi kekuasaan atau otoritas yaitu berupa distribusi keuntungan.

Sebagai salah satu penerus gagasan Marx, Dahrendorf melakukan revisi atas pemikiran Marx. Menurutnya, pengelompokan kelas sosial tidak lagi hanya didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga atas hubungan kekuasaan. Dahrendorf berpendapat bahwa kontrol atas alat produksi merupakan faktor yang penting, dan bukan pemilikan alat produksi. Memang pada awal kapitalisme, kelompok yang memiliki alat produksi sekaligus mengontrol penggunaannya, tetapi tidak berarti ada hubungan antara pemilikan dan kontrol. Ketika kapitalisme telah berkembang dan masyarakat telah berubah menjadi post-capitalist, maka pemilikan yang sah atas alat produksi dan kontrol yang efektif telah dipisahkan. Pemilikan alat produksi sudah tersebar secara luas di kalangan pemegang saham, dan kontrol yang efektif dilakukan oleh manager atau eksekutif yang profesional, meskipun para manager dimungkinkan memiliki saham dalam perusahaan, sehingga kontrol bukan didasarkan atas pemilikan alat produksi, tetapi atas dasar kedudukan atau posisi otoritasnya dalam perusahaan.⁷⁹ Pusat perhatian Dahrendorf lebih pada struktur otoritas perusahaan industri daripada pola pemilikan.

Hal tersebut merupakan koreksi Dahrendorf terhadap pemikiran Marx, bahwa pada abad 19 telah terjadi perubahan dalam masyarakat industri yaitu; 1) dekomposisi modal (menimbulkan kesulitan mengidentifikasi kaum borjuis yang monopolistis karena para pegawai pun ikut memiliki saham perusahaan); 2) dekomposisi tenaga kerja (kaum proletar tidak lagi homogen; secara hierarkis di

⁷⁹ Doyle Paul Johnson. *ibid*: 183

antara mereka tersebar menempati posisi tertentu), dan 3) timbulnya kelas menengah baru (karena terjadinya peningkatan kesejahteraan di kalangan kaum buruh).⁸⁰ Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi bahwa pemilik modal tidak sekaligus sebagai kontrol terhadap proses produksi, tetapi digantikan oleh manager yang secara profesional memiliki otoritas dalam perusahaan.

Oleh karena itu, elemen kunci dalam analisis Dahrendorf adalah otoritas, yang selalu berarti sub-ordinasi dan super-ordinasi. Mereka yang menempati posisi otoritas diharapkan akan mengendalikan sub-ordinat, dan harapan itu tidak melekat pada orang tetapi pada posisi. Sebab otoritas bukan sesuatu yang bersifat konstan, karena melekat pada posisi, bukan pada orang. Dengan demikian, seseorang yang memegang otoritas pada satu setting tidak berarti menduduki posisi sebagai pemegang otoritas pada setting yang lain, demikian juga orang yang menduduki posisi sub-ordinat pada suatu kelompok bisa juga menduduki posisi super-ordinat pada kelompok yang lain. Kekuasaan dan wewenang merupakan sumber langka sehingga kelompok-kelompok bersaing untuk mendapatkannya. Dahrendorf menyebut teorinya dengan "teori koersi struktur sosial"⁸¹

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomis dan hanya ada dua kelompok konflik yang terjadi dalam asosiasi apa pun, yaitu pemegang otoritas dan mereka yang berposisi sub-ordinat, yang secara substansial memiliki kepentingan yang berlawanan. Kata (istilah) kunci dalam teori konflik Dahrendorf adalah "kepentingan". Kelompok yang berada di atas dan di bawah ditentukan oleh kepentingan bersama. Kepentingan yang saling berlawanan itu ditentukan

⁸⁰ Margaret M. Poloma. Sosiologi Kontemporer, Jakarta, CV Rajawali, 1984: 132

⁸¹ Novri Susan, ibid: 50-51.

oleh sifat struktur otoritas, dan bukan oleh orientasi individu atau subjektif yang terlibat di dalamnya.

Dalam setiap asosiasi, mereka yang menduduki posisi dominan berusaha mempertahankan status quo (legitimasi posisinya yang dominan), sebaliknya yang berada pada posisi sub-ordinat selalu berusaha untuk melakukan perubahan. Konflik kepentingan dalam asosiasi semacam ini bersifat laten, dan tidak harus berlangsung secara sadar sebelum mampu menggerakkan super-ordinat atau sub-ordinat. Kepentingan super-ordinat dan sub-ordinat yang bersifat objektif tercermin dalam harapan-harapan (peran) yang melekat pada posisi tersebut, sehingga apabila menduduki posisi tertentu diharapkan akan bertindak sesuai dengan harapan. Dahrendorf menyebut kepentingan objektif yang ditentukan secara struktural dan tidak disadari sebagai kepentingan laten (latent interest). Sedangkan kepentingan yang disadari individu disebut kepentingan manifes (manifest interest). Bagi Dahrendorf, tugas utama teori konflik adalah melihat analisis hubungan antara kepentingan laten dan kepentingan manifes.

Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah melakukan identifikasi berbagai peran otoritas dalam masyarakat. Selain mempersoalkan studi struktur sosial skala besar seperti peran otoritas, Dahrendorf menentang para teoretisi yang memusatkan perhatian pada tingkat individual. Bahkan, menurut Dahrendorf, orang yang melakukan pendekatan demikian bukanlah sosiolog.⁸²

Studi tentang konflik industrial yang dilakukan kali ini memang tidak bertujuan untuk menjelaskan secara makro konflik industrial yang terjadi, tetapi lebih fokus pada bagaimana buruh melalui pikiran dan tindakan individu

⁸² George Ritzer dan Douglas J. 2008: ibid: 283

memahami konflik industrial antara buruh dan pengusaha sebagaimana yang terlihat dalam bentuk aksi untuk rasa dan mogok kerja. Oleh karena itu, studi ini tidak menggunakan teori Dahrendorf untuk mengkaji makna konflik industrial bagi aktivis buruh.

Dahrendorf, dan Coser dalam mengembangkan teori tentang konflik menyajikan suatu perspektif yang lebih umum, tidak terbatas pada satu masyarakat saja. Kedua teoretisi tersebut menekankan tingkat analisis struktur sosial dan bukan antar pribadi. Coser yang percaya pada pandangan Simmel sering dikaitkan dengan proses antar pribadi di tingkat mikro, tetapi Dahrendorf dan Coser sering menunjuk pada variabel proses di tingkat individual. Dengan demikian, proses tingkat mikro pada tingkat antarpribadi dan individual diterima dalam teori-teori ini, meskipun perhatian utamanya adalah mengembangkan suatu perspektif teoretis yang berlaku untuk struktur sosial di tingkat makro dan mikro.⁸³

1.5.2.4 Teori Ritual Interaksi (Interaction Ritual Theory/IRT): Randall Collins.

Collins memperoleh gelar doktor pada Universitas California di Berkeley pada akhir tahun 1960-an, kemudian mengajar di universitas California di San Diego, Universitas Virginia dan Universitas California di Riverside, sekarang mengajar di Universitas Pennsylvania dan dikenal karena teori konfliknya.⁸⁴ Perhatian teori konflik yang dikembangkan Collins ini adalah persoalan stratifikasi sosial, terutama pada efek stratifikasi sosial pada tingkat mikro.

⁸³ Doyle Paul Johnson, *ibid*: 206-207

⁸⁴ Steven Seidman, *Contested Knowledge, Social Theory Today*, Third Edition, Australia, Blackwell Publishing, 2004: 87

Menurutnya teori-teori besar seperti teori struktural fungsional dan teori Marxian tidak berhasil menerangkan stratifikasi social. Collins mengkritik teori Marxian, yang menjelaskan stratifikasi dari satu aspek saja, sementara dalam kehidupan sehari-hari banyak aspek yang menentukan stratifikasi sosial.⁸⁵

Alasan Collins memperhatikan stratifikasi sosial, karena menurutnya gejala ini mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan manusia, sekaligus juga menunjukkan bahwa stratifikasi dan organisasi itu berdasarkan pada interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Collins ini mengacu pada teori Marx dan Weber, tetapi banyak dipengaruhi oleh fenomenologi dan etnometodologi. Collins berasumsi bahwa manusia secara inheren bersifat sosial sekaligus juga mengutamakan kepentingan dirinya (self interest), sehingga seringkali terjadi konflik kepentingan. Menurut Collins⁸⁶, kehidupan sosial tersusun dari konflik yang menghasilkan dominasi dan subordinasi karena orang memperjuangkan barang langka tapi bernilai – kekuasaan, prestise, dan kekayaan. Ia melihat stratifikasi terjadi dalam tiga bidang yang sesuai dengan barang berharga di masyarakat. Kelompok yang mendapatkan lebih banyak kekuasaan mendominasi bidang politik. Kelompok yang mendapatkan lebih banyak prestis mendominasi bidang budaya. Terakhir, kelompok yang mendapatkan lebih banyak kekayaan mengontrol bidang ekonomi. Collins mengawali teori konfliknya dengan dasar bahwa kehidupan sosial terdiri dari individu yang termotivasi memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri. Persoalan materi yang digunakan individu (misalnya: kekayaan atau kekuatan fisik) serta budaya (misal: pendidikan atau keahlian verbal) tersedia untuk mengamankan tujuan mereka.

⁸⁵ Randall Collins, *ibid*: 49

⁸⁶ Steven Seidman, *ibid*: 87

Teori yang dikembangkan oleh Collins ini, menghindarkan diri dari sifat ideologis –sebagaimana corak pemikiran kelas dan konflik model Marxian-- di mana Collins tidak memulai dengan pandangan politis bahwa konflik adalah baik atau buruk. Collins memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistis, artinya konflik merupakan proses sentral dalam kehidupan sosial.⁸⁷ Konflik industrial yang terjadi di Indonesia, juga tidak lepas dari konflik stratifikasi sosial, sebab dalam hubungan industrial tentu ada kelompok yang dominan dan ada pula kelompok yang disubordinasi. Selain itu, dalam organisasi atau serikat buruh pun menunjukkan adanya stratifikasi yaitu kelompok elit (pengurus) dan anggota biasa.

Apabila para teoretisi pendahulunya lebih memusatkan perhatian pada analisis struktur masyarakat (level makro), Collins mendekati konflik dari sudut pandang individu, karena akar teoretisnya terletak pada fenomenologi dan ethnometodologi. Collins menyadari bahwa "sosiologi tidak mungkin berhasil hanya pada level mikro saja", teori konflik tidak dapat melakukan apa pun tanpa analisis pada level masyarakat. Para teoretisi konflik percaya bahwa struktur sosial bersifat eksternal dan memaksa aktor, sementara Collins justru melihat struktur sosial sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari aktor yang mengonstruksinya dan pola-pola interaksi yang menjadi dasarnya. Collins cenderung melihat struktur sosial sebagai pola interaksi daripada sebagai entitas eksternal dan koersif. Menurutnya struktur sosial dikonsepsikan sebagai pola interaksi individu yang terjadi secara berulang dan inilah esensi struktur sosial. Sebagian besar teoretisi konflik melihat aktor dikekang oleh kekuatan eksternal,

⁸⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2008. *ibid*: 287

sedangkan Collins melihat aktor terus menerus menciptakan dan menciptakan kembali organisasi sosial. Collins menawarkan perspektif teoritik yang lebih komprehensif dengan perhatian pada analisis kehidupan riil individu dan pola-pola interaksi pada tingkat mikro. Perspektif mikro sangat jelas terlihat pada pandangannya tentang struktur sosial dalam kaitannya dengan tindakan sosial aktor.⁸⁸ Collins mengklaim bahwa pendekatan individualistik dalam kehidupan sosial adalah benar karena mencerminkan realitas sosial, dan mengarahkan bahwa konflik merupakan sesuatu yang nyata dari suatu kehidupan sosial.

Tiga asumsi dasar teori konflik yang dikembangkan Collins adalah: 1) manusia hidup dalam dunia subjektif yang terkonstruksikan dengan sendirinya; 2) manusia tidak hanya sekedar aktor individual, tetapi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pengalaman subjektif aktor; dan 3) manusia selalu berusaha untuk mengontrol pengalaman aktor, yang mendorong terjadinya konflik.⁸⁹

Collins menjelaskan bahwa struktur sosial tidak mempunyai eksistensi objektif yang terpisah dari pola-pola interaksi yang terjadi berulang-ulang. Struktur sosial benar-benar ada sebagai suatu kenyataan subjektif dalam pikiran individu. Pandangan subjektif ini, jelas dipengaruhi oleh teori-teori yang menekankan dinamika aktor dalam kehidupan sosial seperti interaksionisme simbolik, fenomenologi dan etnometodologi yang mengatakan bahwa manusia ada dalam suatu dunia simbol yang dikonstruksikan secara sosial. Suatu sumber konflik yang utama dalam kehidupan sosial dipahami sebagai hasil usaha manusia untuk mempengaruhi atau mengontrol definisi-definisi subjektif dari orang lain

⁸⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2008. *ibid*: 287-288

⁸⁹ Ryan, Michael. 2005a, *Structural Funcionalism*, Dalam George Ritzer, (ed) *Encyclopedia of Social Science*, Vol. II, Thousand Oak, London, New Delhi: Sage Publications; 799

untuk memperbesar keuntungan pribadinya dalam perjumpaan atau pertemuan antarpribadi.⁹⁰

Collins menghubungkan tekanan Durkheim pada ritual solidaritas dengan analisis Goffman tentang strategi yang digunakan untuk mementaskan penampilan-penampilan interaksional. Goffman menggambarkan kehidupan sosial sebagai kenyataan sosial yang terjalin bersama melalui ritual sehari-hari yang dapat menciptakan dan memperkuat ikatan emosional antara manusia dan ikatan emosional dengan kelompok atau masyarakat. Collins dalam sintesisnya menjelaskan bahwa meskipun Goffman tidak membahas struktur sosial secara sistematis, khususnya pada tingkat makro, analisisnya tentang ritual sehari-hari dapat disatukan dengan pandangan Durkheim bahwa kenyataan masyarakat itu tergantung pada ikatan solidaritas emosional yang diciptakan dan diperkuat melalui ritual-ritual interaksi. Dalam teorinya tentang ritual interaksi (Interaction Ritual Theory/IRT) atau teori konflik interaksional, Collins menekankan bahwa ritual-ritual interaksi (IR) di tingkat mikro sebagaimana yang digambarkan oleh Goffman, memperkuat sistem stratifikasi masyarakat.⁹¹ Collins mempelajari karya Goffman dan mulai memahami mengapa seluruh aspek masyarakat, konflik stratifikasi, dan lain – lainnya, di bangun dari ritual interaksi kehidupan sehari-hari kita. Ritual interaksi (Interaction Ritual atau IR) menurut Collins adalah pertemuan yang semua pihak memusatkan perhatian pada objek atau kegiatan, dan dengan berkomunikasi satu sama lain, masing-masing menjadi saling menyadari fokus perhatiannya.

⁹⁰ Doyle Paul Johnson. *ibid*: 207 dan George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2003, *ibid*: 207

⁹¹ Doyle Paul Johnson. *ibid*:209-210

AN INTERACTION RITUAL is the process in which participants develop a mutual focus of attention and become entrained in each other's bodily micro-rhythms and emotions.⁹² The microsociological theory that Collins has developed is best called interaction ritual theory (IRT), Sebagaimana yang ditentukan oleh Rossel dan Collins, berikut ini.

1. Interaction rituals are two types, Intentional rituals are those that closely correspond to the everyday notion of rituals, such as political speeches or parades and religious ceremonies. Natural or interaction rituals, by contrast, are the types of rituals that Goffman called interaction or interpersonal rituals; they are not consciously or deliberately intended to have effects and are usually not thought of as rituals by the participant.
2. For interaction rituals (IRs) to occur, at least two persons must be physically copresent.
3. Individual who are copresent must have a common focus on a particular object –a religious emblem, a national flag, or certain topic of conversation—and this object is a sacred object, not necessarily in the ordinary sense of the term, but in the more subtle Goffmanian sense.
4. Successful IRs arouse a common mood that, if intense enough, becomes a symbol of membership in a community that is highly affectively charged. Successful IRs thus lead to high levels of social solidarity.
5. Social solidarity at the micro level can be identified by mutual entrainment of the participants. This involves the coordination and harmonization of their emotions and gesture which can be assessed by such things as the synchronization of voice pitches, bodily movements (especially eye movements), and rhythmic speech.
6. Successful IRs also produce two types of resources, emotional energy (EE) and cultural capital (CC). EE consists of such thing as a feeling of solidarity or inclusion within a group; confidence, enthusiasm, and positive self-regard; Durkheimian moral sentiment; collective effervescence; a readiness for action that manifests itself in being assertive or taking the initiative; the expectation that one will be able to dominate others; the expectation that one will be a central member of a group, of being at the center of attention; a feeling of pride that is derived from attunement to others; and trust in others. Low or absent EE, by contrast, consists of low solidarity; a feeling of being drained by the group and wanting to avoid it; depression, low energy, loss of motivation; shame; and distrust
7. EE dan CC are motivations for action and resources that individuals can use to benefit from that action. EE and CC determine which kinds of IRs person seeks, *and as resources influence an individual's progress through a sequence of IRs.*
8. In their life histories, individuals pass through many interaction rituals. These rituals are overlapping to a lesser or greater extent and constitute interaction ritual chains.
9. IRT rejects theoretical approaches that it views as overly cognitive (such as rational choice theory), as well as those that focus heavily on norms as determinants of behavior (such as functionalism).
10. Methodologically, IRT concentrates on observable behavior and eschews approaches that ask individuals about their intentions or motivations. IRT relies heavily on the methods of naturalistic observation found in ethology, the sociology and psychology of emotions (e.g. systematic coding of social expressions, analysis of voice and pitch frequencies, measurement of physiological states), and conversation analysis pioneered by the ethnomethodologists.⁹³

⁹² Randall Collins, *Interaction Ritual Chains*, USA, Princeton University Press, 2004: 47

⁹³ Randall Collins, 2009, *ibid*: 275

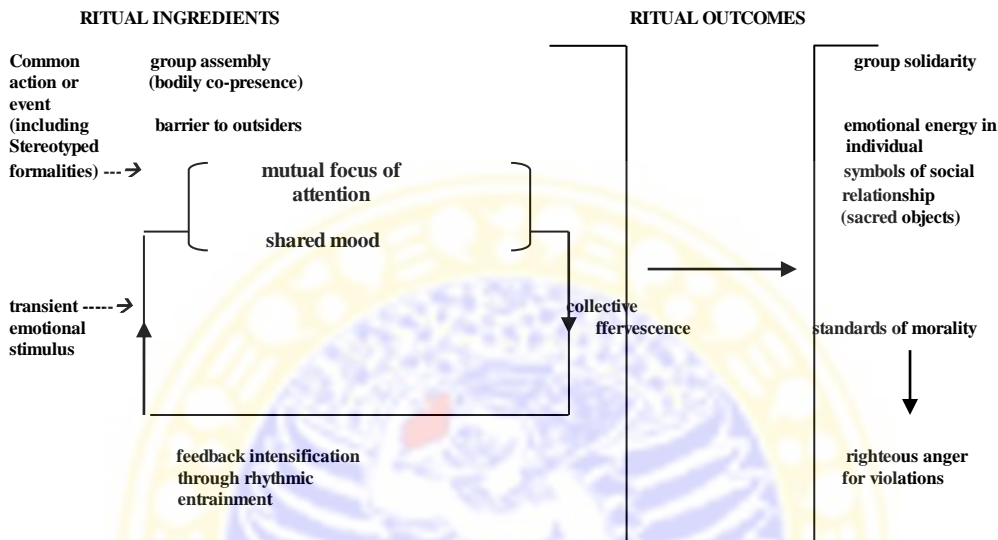
Sebagaimana diletakan oleh Rossel dan Collins, IRT terlihat seperti berikut ini:

1. Ritual Interaksi ada dua jenis, ritual disengaja adalah ritual yang erat terkait dengan catatan ritual sehari-hari, seperti pidato politik atau parade dan upacara keagamaan. Ritual interaksi alamiah sebaliknya adalah jenis ritual di mana Goffman menyebutnya ritual interaksi atau antarpribadi; ritual ini mempunyai efek dan biasanya tidak dianggap sebagai ritual oleh partisipan.
2. Karena itu ritual interaksi (IR) terjadi, setidaknya ada dua orang harus secara fisik hadir bersama.
3. Individu yang hadir bersama harus mempunyai fokus yang pada obyek tertentu – lambang agama, bendera nasional, atau topik percakapan tertentu – dan obyek ini adalah obyek suci, belum tentu dalam pengertian biasa, tapi dalam pengertian Goffmanian.
4. IR yang berhasil membangkitkan semangat bersama, jika cukup intens, menjadi simbol keanggotaan dalam suatu komunitas yang sangat berpengaruh. IR yang sukses meningkatkan solidaritas sosial.
5. Solidaritas sosial di tingkat mikro dapat diidentifikasi dengan saling meningkatkan peserta. Ini melibatkan koordinasi dan harmonisasi emosi dan gerak tubuh mereka.
6. IR yang sukses juga menghasilkan dua jenis sumber daya, yaitu emosional energi (EE) dan modal budaya (CC-Cultural Capital). EE terdiri dari perasaan solidaritas dalam grup; rasa percaya diri, rasa antusias, dan positif terhadap diri; sentimen moral Durkheimian; gembira bersama; kesiapan akan aksi yang memmanifestasikan diri menjadi asertif atau inisiatif; harapan bahwa orang akan mampu mendominasi orang lain; harapan bahwa orang akan menjadi anggota sentral suatu grup, menjadi pusat perhatian; perasaan bangga karena bisa menyesuaikan dengan orang lain; dan percaya pada orang lain. EE yang rendah atau tidak ada, terdiri dari solidaritas rendah; perasaan menjadi dialirkan oleh grup dan ingin menghindarinya; depresi, lemah energi, kehilangan motivasi; malu; dan curiga.
7. EE dan CC adalah motivasi untuk aksi dan sumber daya dimana individu dapat menggunakan untuk keuntungan dari aksi tersebut. EE dan CC menentukan jenis IR manakah yang dicari orang, dan sebagai sumber daya mempengaruhi kemajuan individu melalui rangkaian ritual interaksi.
8. Di dalam sejarah kehidupan mereka, individu melewati ritual interaksi. Ritual ini bertumpang-tindih dan membentuk rantai ritual interaksi.
9. IRT menolak pendekatan teoritis yang dilihat sebagai terlalu kognitif (seperti teori pilihan rasional), serta mereka yang sangat fokus pada norma-norma sebagai penentu perilaku (seperti fungsionalisme).
10. Secara metodologi, IRT terpusat pada perilaku yang dapat diamati dan menjauhkan pendekatan yang menanyai individu tentang maksud atau motivasi mereka. IRT tergantung pada metode observasi alamiah yang ditemukan dalam etologi, sosiologi dan psikologi emosi, dan analisa percakapan yang dirintis oleh ahli etnometodologi.

Collins mencontohkan dalam suatu jaringan intelektual, bahwa ritual interaksi (IR) dapat terjadi dalam ruang kuliah, pertemuan atau rapat organisasi akademis, dan berbagai macam bentuk proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan studi ini, ritual interaksi dapat terjadi di tempat kerja, pertemuan Dewan Pengupahan, organisasi/serikat buruh dan berbagai kegiatan yang ada. Dengan

berpartisipasi dalam ritual interaksi ini, dapat memiliki perasaan keanggotaan kelompok dan menghargai simbol tertentu dari jaringan mereka.

Sebagaimana digambarkan oleh Collins tentang unsur, proses dan hasil ritual interaksi, berikut ini.



Gambar 1.1: Ritual Interaksi

Interaction ritual (IR) has four main ingredients or initiating conditions:

1. Two or more people are physically assembled in the same place, so that they affect each other by their bodily presence, whether it is in the foreground of their conscious attention or not.
2. There are boundaries to outsiders so that participants have a sense of who is taking part and who is excluded.
3. People focus their attention upon a common object or activity, and by communicating this focus to each other become mutually aware of each other's focus of attention.
4. They share a common mood or emotional experience.⁹⁴

Interaksi ritual (IR) memiliki empat unsur utama atau kondisi:

1. Dua orang atau lebih secara fisik berkumpul di tempat sama, sehingga mereka mempengaruhi satu sama lain dengan kehadiran fisik mereka, apakah itu dilatari perhatian secara sadar atau tidak.
2. Ada batas-batas bagi orang luar sehingga peserta memiliki rasa ambil bagian dan siapa yang dikecualikan.
3. Orang memusatkan perhatian pada objek atau kegiatan umum, dan dengan saling berkomunikasi, masing-masing menyadari fokus perhatiannya
4. Mereka berbagi suasana hati atau pengalaman emosional bersama.

⁹⁴ Randall Collins, *ibid*, 2004: 48

Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, dan yang paling penting adalah unsur nomor tiga yaitu fokus perhatian dan suasana hati dan pengalaman bersama yang dapat memperkuat satu sama lain. Orang menjadi lebih terfokus pada aktivitas bersama, dan sadar tentang apa yang dilakukan dan dirasakannya.

Ada empat hasil utama ritual interaksi, apabila unsur-unsur tersebut berhasil menggabungkan dan membangun ke tingkat yang saling terfokus dan secara emosional berbagai perhatian, sehingga partisipan memiliki pengalaman: 1) solidaritas kelompok, perasaan keanggotaan; 2) Energi emosional (EE) dalam tiap individu, seperti rasa percaya diri, kegembiraan, kekuatan, semangat dan inisiatif dalam mengambil tindakan; 3) simbol-simbol kelompok, seperti emblem atau representasi lain (ikon visual, kata-kata, gerakan), sehingga anggota merasa sebagai bagian dari kelompok. Orang dipompa dengan perasaan solidaritas kelompok, memperlakukan simbol dengan hormat dan membelanya terhadap orang luar yang tidak menghormati, dan bahkan membelanya dari orang dalam yang memberontak; 4) perasaan moralitas: merasa benar mengikuti kelompok, menghormati simbol-simbolnya, dan membelanya terhadap pelanggar.⁹⁵

Sebagaimana yang terjadi dalam aksi buruh, mereka berkumpul dalam suatu tempat yang biasanya dilatarbelakangi persoalan yang dihadapinya, seperti rendahnya UMP/K, atau belum terpenuhinya hak-hak normatif yang lain. Orang luar yang dimaksudkan bisa datang dari aparat, pemerintah, pengusaha dan bahkan anggota serikat buruh yang lain yang tidak pro dengan mereka. Perhatiannya pada objek yang berupa tuntutan dan kegiatan seperti orasi dan

⁹⁵ Randall Collins, *ibid*, 2004: 49

sebagainya, dan mereka biasanya meneriakkan yel-yel yang sama sehingga buruh pun semakin bersemangat. Ritual interaksi juga bisa terjadi dalam suatu pertemuan Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah, akademisi, pengusaha maupun buruh. Sementara hasil ritual interaksi berupa perasaan moralitas, dapat dilihat adanya perasaan memiliki (self belongingness), bahkan jika ada serikat buruh yang melanggar solidaritas kelompok dianggap melakukan kejahatan moral.

Collins menjelaskan bahwa mereka yang berposisi dominan akan memperhatikan ketaatan orang pada ritual interaksi untuk memperlihatkan dominasinya dan memelihara serta memperkuat ikatan emosional dari para subordinat, dengan keteraturan sosial yang ada. Ritual semacam itu akan memperkuat kekuasaan dan otoritas. Sementara, mereka yang berposisi subordinat (tingkat rendah) akan mengembangkan perilaku dan gaya interaksi yang menunjukkan usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kemerdekaan serta otonominya. Mereka ini mungkin terpaksa tunduk agar tetap hidup dan terpenuhi kebutuhannya, dan tidak berarti bahwa secara emosional memiliki komitmen terhadap keteraturan sosial yang ada dengan pengertian yang sama seperti mereka yang berposisi atas. Misalnya, kelompok buruh melaksanakan tugas dan menunjukkan sikap hormat terhadap atasan seperlunya saja, tetapi mereka tidak menyenangi pekerjaannya dan tidak ada ikatan emosional yang kuat dengan organisasi tempat bekerja.⁹⁶

Pusat perhatian Collins dalam menjelaskan konflik adalah pada stratifikasi sosial yang merupakan suatu lembaga terkait dengan beragam unsur kehidupan,

⁹⁶ Doyle Paul Johnson. *ibid*: 210

termasuk kekayaan, politik, karier, keluarga, klub, komunitas dan gaya hidup. Teori konflik yang dikembangkan Collins ada yang menyebutnya sebagai teori konflik stratifikasi. Itulah sebabnya mengapa Collins mengalihkan pendekatan konfliknya pada stratifikasi yang lebih mirip dengan teori fenomenologi dan etnometodologi. Meskipun demikian, ada pula yang menyebutnya sebagai teori konflik interaksional, karena pola interaksi yang terjadi secara berulang-ulang.

Atas dasar asumsi yang dikemukakan tersebut, Collins mengembangkan prinsip analisis konflik dalam stratifikasi sosial⁹⁷, yaitu 1) Analisis harus lebih fokus pada pengalaman hidup nyata daripada ideologi abstrak; 2) pengujian harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana setiap aktor dapat memanipulasi atau dibatasi oleh faktor-faktor kepemilikan material; 3) sadar atau tidak sadar terdapat eksploitasi terhadap mereka yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit oleh mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak; 4) kepercayaan dan sistem ide harus dianalisis dengan memperhatikan kepentingan, sumber daya dan kekuasaan; 5) studi tentang stratifikasi harus dilakukan secara ilmiah, menggunakan uji hipotesis, riset empiris dan jika memungkinkan digunakan penjelasan kausal.

Meskipun demikian, teori konflik Collins ini tidak membatasi fokusnya pada level mikro, dengan teorinya tentang stratifikasi berusaha untuk menjembatani tingkat mikro dan makro. Pada tingkat mikro, stratifikasi tercermin dalam hubungan dominasi dan kepatuhan.⁹⁸ Pada level makro, stratifikasi tercermin dalam perbedaan kontrol atas berbagai macam sumber oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Selain analisisnya pada tingkat mikro, Collins berusaha

⁹⁷ Ryan, Michael, *ibid*

⁹⁸ Randall Collins. *Conflict Theory and the Advance of Macro-Historical Sociology*, dalam George Ritzer: *Frontiers of Sosial Theory, The New Synthesis*, New York: Columbia University Press, 1990 : 68

menjelaskan proses sosial dalam organisasi dan institusi sosial yang sangat kompleks. Konflik industrial yang tengah dikaji ini merupakan suatu proses sosial yang sangat kompleks dan dinamis, di mana konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha bukan semata-mata sebagai akibat rendahnya upah, adanya kebijakan yang tidak menguntungkan buruh, meskipun disadari bahwa sumber-sumber material tersebut sangat penting sebagai pemantik terjadinya berbagai aksi buruh.

Teori konflik yang dikembangkan Collins ini dianggap lebih komprehensif daripada teori-teori sebelumnya, selain itu tidak hanya membatasi pada konflik ekonomi, atau konflik dalam organisasi birokratis, akan tetapi dapat diterapkan pada berbagai bidang institusional, bahkan relevan bukan hanya untuk masyarakat industri modern, tapi juga masyarakat lainnya serta tahap-tahap historis sebelumnya.⁹⁹ Pemikiran Collins ini banyak dipengaruhi oleh Weber, hal ini terlihat ketika menggunakan perbedaan antara kelas, status dan kekuasaan sebagai dasar untuk model stratifikasi dan analisisnya mengenai dinamika konflik sosial. Weber menolak alasan Marx bahwa kelas ekonomi (pemilik dan bukan pemilik alat produksi) sebagai satu-satunya faktor penentu posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Menurutnya, selain perbedaan posisi ekonomi, individu juga berbeda dalam prestise yang melahirkan kelompok status serta kekuasaan politik yang secara khusus diungkapkan dalam partai-partai politik.¹⁰⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Weber, Collins pun memberikan gambaran dasar mengenai perilaku manusia, bahwa manusia terus menerus berjuang untuk memperbaiki posisinya dalam ketiga dimensi stratifikasi tersebut. Dalam kaitan dengan konflik industrial yang sedang dikaji dalam studi ini, bahwa aksi buruh untuk melakukan

⁹⁹ Doyle Paul Johnson. *ibid* : 207 dan Ritzer dan Goodman; 2003: *ibid*: 160

¹⁰⁰ Doyle Paul Johnson. *ibid* : 208

unjuk rasa, demonstrasi dan mogok kerja sebagai wujud atau ekspresi perjuangan mereka untuk memperbaiki ekonomi konkritnya upah atau secara lebih umum meningkatkan kesejahteraan buruh. Menurut Collins, organisasi dan kehidupan sosial merupakan gelanggang perjuangan dan konflik.¹⁰¹

Collins sendiri menekankan faktor penentu utama posisi kelas seseorang adalah pekerjaan (occupation). Sementara Marx membedakan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki alat produksi, maka Collins melihat perbedaan itu penting karena dapat menentukan pekerjaan yang menghidupi orang yang bersangkutan. Senada dengan Dahrendorf, Collins melihat struktur otoritas individu melalui keterlibatannya dalam pekerjaan, yang merupakan dimensi utama posisi kelas dan pandangan subjektif umumnya dari orang tersebut. Akan tetapi ada perbedaan dengan Dahrendorf, Collins tidak menggunakan model hubungan otoritas dua kelas. Hubungan otoritas atau hubungan kekuasaan menurut Collins dilihat sebagai suatu persebaran hierarkis yang berkesinambungan dan mencerminkan sejumlah orang yang diberi perintah. Collins membedakan tiga kategori kelompok okupasional, yaitu: 1) lapisan atas hierarki, adalah mereka yang memberi perintah kepada orang banyak, tetapi menerima perintah dari sedikit orang atau sama sekali tidak; 2) lapisan menengah yaitu memberi perintah kepada beberapa orang, tetapi menerima perintah dari orang lain, lapisan ini sangat luas. Tingkat paling atas dalam lapisan menengah ini misalnya manajer, memberi perintah pada bawahan yang juga menerima perintah, sedangkan tingkat paling rendah dari kelas menengah seperti mandor memberi

¹⁰¹ Steven Seidman, *ibid.*: 89

perintah pada bawahan yang melaksanakan tugas-tugas fisik ; 3) lapisan terbawah adalah mereka yang hanya menerima perintah.

Perbedaan yang lain adalah masalah jaringan komunikasi. Lapisan paling atas menduduki posisi sentral dalam jaringan komunikasi organisasi tersebut, dan memiliki kontak sosial luas di luar kelompok atau organisasi. Sedangkan yang berada pada posisi paling bawah makin terbatas jangkauan kontak sosialnya dan berada pada pinggiran jaringan komunikasi. Perbedaan yang lain antara lapisan okupasional atas dan bawah adalah jumlah kekayaan yang dimiliki dan sifat fisik tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan.¹⁰² Hal ini bisa dilihat dalam organisasi industri, bahwa mereka yang memberi perintah memiliki kedekatan hubungan dengan pihak di luar organisasi baik dengan pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Sementara buruh sebagai kelompok lini (paling bawah) yang hanya menerima perintah dan sebagai pelaksana, memiliki jangkauan komunikasi yang terbatas, ritual interaksi yang dikembangkan sangat terbatas baik dari sisi luasnya jangkauan maupun apa yang menjadi substansi dalam interaksi. Buruh sangat sulit melakukan ritual interaksi secara langsung dengan pihak pengusaha, tidak pernah duduk bersama untuk berunding dan berdialog. Oleh karena itu, untuk menyampaikan aspirasinya buruh menggunakan cara seperti demonstrasi, aksi unjuk rasa dan mogok kerja agar mendapat perhatian dari pihak-pihak yang sulit untuk dijangkau.

Lebih lanjut Collins menjelaskan bahwa sifat posisi okupasional seseorang, terutama pengalaman memberikan dan menerima perintah akan mempengaruhi aspek kehidupan yang lain termasuk pandangan hidup, gaya hidup

¹⁰² Doyle Paul Johnson. *ibid* : 210-212

dan sifat interaksinya (bersifat komulatif). Sebaliknya, pengalaman dari lapisan terbawah menghasilkan suatu kebudayaan kelas pekerja tersendiri, yang lokalistik, sinis, dan berorientasi langsung pada masa kini.¹⁰³ Kelas pekerja seperti ini tidak pernah memikirkan resiko dalam mempertahankan struktur otoritas, karena kelas ini merasa tidak memiliki ikatan moral dan ikatan emosional yang kuat dengan atasannya. Hal ini dapat dimengerti bahwa hubungan buruh dan atasan lebih sebagai hubungan kontraktual dan hubungan pasar. Apalagi pekerjaan kelas bawah ini lebih banyak menggunakan tenaga fisik dan lebih riskan daripada pekerjaan kelas di atasnya, sehingga gaya hidup kelas pekerja pun lebih menekankan pada kekerasan dan keberanian fisik. Dalam konteks hubungan industrial, semua elemen yang terlibat dalam hubungan industrial akan berjuang untuk memperbaiki posisi masing-masing yang memiliki kepentingan yang berbeda pula. Apa yang dilakukan buruh atau pekerja dengan aksi unjuk rasa, mogok kerja semata-mata sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Buruh sadar bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan yang mengandalkan fisik, karena itu sangat rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Apalagi dalam situasi seperti saat ini, di mana jumlah pencari kerja sangat tinggi sementara lapangan kerja sangat terbatas, belum lagi jika pengusaha menganggap buruh terlalu banyak tuntutan. Akhirnya pilihan pengusaha adalah menggunakan tenaga outsourcing, yang tidak banyak tuntutan dan upah yang relatif lebih rendah dan sewaktu-waktu pengusaha bisa menghentikan tanpa harus memikirkan uang pesangon. Buruh atau pekerja dengan pendidikan dan ketrampilan yang terbatas, tidak banyak berharap untuk mobilitas ke atas, mereka

¹⁰³ Randall Collins. *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. New York: Academic Press, 1975: 71

lebih berjuang untuk kebutuhan pokok, makan, sandang dan papan serta kebutuhan sosial.

Dalam konflik industrial, masing-masing buruh memiliki pengalaman yang berbeda satu sama lain, baik dalam bekerja, kehidupan sosial termasuk dengan siapa berinteraksi, intensitas interaksi maupun keterlibatannya dalam konflik industrial, pengalaman ini juga mempengaruhi bagaimana masing-masing buruh mendefinisikan konflik industrial yang terjadi. Pengalaman dan ritual interaksi sosial yang dikembangkan oleh setiap individu baik dengan pemberi perintah maupun sesama penerima perintah dapat mempengaruhi definisi subjektifnya.

Selain itu jenis pekerjaan yang lebih banyak menggunakan tenaga fisik, juga membawa gaya hidup yang akan menekankan pada kekerasan dan keberanian fisik, sehingga buruh, aktivis, pengusaha bahkan pemerintah pun memaknai konflik industrial secara berbeda, karena adanya perbedaan pengalaman, pandangan, gaya hidup, pekerjaan dan dengan siapa mereka berinteraksi. Perbedaan juga terlihat pada kelompok yang memberi perintah, kelompok yang memberi dan menerima perintah serta kelompok yang hanya menerima perintah, sebab kelompok-kelompok tersebut juga berbeda dengan siapa dan seberapa luas interaksi dan komunikasi dilakukan, sehingga buruh pun memaknai konflik industrial secara berbeda satu dengan yang lain. Collins menjelaskan bahwa realitas sosial tergantung pada definisi subjektif yang dikembangkan melalui interaksi, dan karena itu mudah pula berubah.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Doyle Paul Johnson, *ibid*: 209

Selain dalam hubungan kerja, individu-individu juga berhubungan sosial dengan komunitas di sekitarnya, kelompok atas dasar agama, organisasi sukarela (kemasyarakatan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), persahabatan, dan hubungan yang bukan okupasional pun acapkali dipengaruhi oleh posisi pekerjaannya (okupasional), meskipun demikian posisi pekerjaan tidak selalu menentukan luasnya hubungan sosial di luar pekerjaan. Di luar hubungan pekerjaan, orang cenderung memulai dan mempertahankan hubungan sosial yang memungkinkannya dapat memperbaiki status subjektifnya. Artinya individu memilih teman yang akan menerima identitas dirinya dan definisinya mengenai kenyataan sosial, dukungan sosial timbal balik harus diberikan dalam pertukaran.¹⁰⁵ Dengan demikian buruh pun akan memilih organisasi atau serikat buruh yang menerima identitas dan menampung aspirasi mereka. Pengalaman dalam berorganisasi pun sangat bervariasi, ada buruh yang aktif dalam organisasi/serikat buruh, tetapi ada pula yang tidak aktif, demikian juga dengan komunitas atau organisasi sosial kemasyarakatan yang lain, sehingga pengalaman hidupnya pun berbeda demikian pula dalam kehidupan sosialnya terutama dalam kaitannya dengan konflik industrial.

Asumsi penting yang mendasari teori konflik yang dikembangkan Collins adalah bahwa orang itu bersifat sosial (sociable), tetapi juga mudah berkonflik dalam hubungan sosialnya. Konflik mungkin terjadi dalam hubungan sosial karena “penggunaan kekerasan” yang dapat dipakai seseorang atau banyak orang dalam lingkungan pergaulan. Collins percaya bahwa orang akan berusaha dengan memaksimalkan “status subjektif”, dan kemampuan itu tergantung pada sumber

¹⁰⁵ Doyle Paul Johnson. *ibid* : 213

daya mereka dan sumberdaya orang lain dengan siapa mereka berurusan. Orang mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga terjadi benturan karena kepentingan-kepentingan itu pada dasarnya saling bertentangan.¹⁰⁶ Dalam hubungan industrial, buruh dan majikan sebagai pihak yang saling berurusan memiliki kepentingan yang berbeda. Jika kepentingan buruh adalah kenaikan upah, dan terpenuhinya hak-hak normatif yang lain atau peningkatan kesejahteraan hidup, maka majikan atau pengusaha memiliki kepentingan memaksimalkan keuntungan dan berusaha meminimalkan upah buruh.

Dalam situasi yang serba sulit, di mana upah yang diterima masih relatif rendah, kebutuhan hidup semakin tinggi dan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, sementara dialog atau perundingan antara buruh dan pengusaha sulit dilakukan, maka konflik sangat mudah terjadi. Meskipun diakui bahwa di kalangan buruh, motivasi untuk melakukan konflik tersebut berbeda dengan aktivis buruh. Aktivis buruh, memang tidak semuanya adalah buruh organik, aktivis yang menduduki jabatan pengurus atau elit di serikat buruh pada umumnya bukan buruh organik (buruh yang sesungguhnya). Dengan demikian, selain stratifikasi yang didasarkan pada sumberdaya ekonomi, maka di kalangan buruh juga terjadi stratifikasi atas dasar jabatan atau kedudukan dalam organisasi seperti serikat buruh.

Menurut Collins, pendekatan konflik yang terjadi dalam konteks stratifikasi dapat dipersempit menjadi tiga prinsip dasar. Pertama, Collins yakin bahwa orang hidup dalam dunia subjektif yang dikonstruksi sendiri. Kedua, orang lain mungkin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau bahkan mengontrol

¹⁰⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman; 2008: ibid: 162-163

pengalaman subjektif individu. Ketiga, orang acapkali mencoba mengontrol orang lain yang menentangnya, akibatnya terjadi konflik antarindividu.

Atas dasar pendekatan ini, kemudian Collins mengembangkan lima prinsip analisis konflik yang tidak hanya dapat diterapkan pada stratifikasi sosial, tetapi percaya bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada wilayah kehidupan sosial mana pun. Pertama, teori konflik harus memusatkan perhatian pada kehidupan nyata daripada formulasi-formulasi abstrak. Hal ini menunjukkan bahwa Collins lebih menyukai model analisis material Marxis daripada gaya abstraksi fungsionalisme struktural. Menurut Collins, tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri sebagai muslihat untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat mencapai kepuasan dan menghindarkan ketidakpuasan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manusia rentan terhadap tarikan emosional dalam upaya mendapatkan kepuasan. Kedua, teori konflik stratifikasi harus mengkaji susunan material yang mempengaruhi interaksi. Meskipun aktor dipengaruhi oleh faktor-faktor material seperti ruang fisik, model komunikasi, persediaan senjata, sarana untuk memperoleh kesan publik, perkakas dan barang, tetapi tidak semua aktor dipengaruhi dengan cara yang sama. Aktor dengan sumber daya yang banyak dapat menentang, sedangkan aktor dengan sumberdaya sedikit kemungkinan akan berpikir dan bertindak atas dasar kemampuan materialnya. Dalam hubungan industrial pemilik sumber daya yang banyak adalah pengusaha, sedangkan yang lebih sedikit sumberdaya adalah tenaga atau buruh, yang berupa tenaga fisik. Ketiga, dalam situasi yang menunjukkan ketimpangan, kelompok-kelompok yang mengontrol sumberdaya cenderung mengeksploitasi kelompok yang memiliki keterbatasan sumberdaya. Pengusaha dengan sumberdaya yang dimilikinya

mampu mengontrol buruh dengan cara mengeksploitasi, melakukan PHK jika buruh melakukan kesalahan dan sebagainya. Pihak yang mengeksploitasi semata-mata mengejar apa yang menjadi kepentingan terbaiknya yaitu keuntungan maksimal. Keempat, Collins berharap teori konflik melihat fenomena kultural seperti kepercayaan dan gagasan ideal dari sudut pandang kepentingan, sumberdaya dan kekuasaan. Kelompok yang memiliki sumberdaya dan kekuasaan dapat memaksakan gagasan kepada seluruh masyarakat, sementara kelompok tanpa sumberdaya membiarkan sistem gagasan tersebut memaksanya. Kelima, Collins membuat komitmen tegas untuk melaksanakan studi ilmiah tentang stratifikasi dan setiap aspek kehidupan sosial yang lain. Sebagai konsekuensinya, para ilmuwan sosial khususnya sosiolog tidak hanya berteori tentang stratifikasi tetapi juga harus mengkajinya secara empiris, dan jika dimungkinkan dilakukan secara komparatif. Hipotesis yang dirumuskan harus diuji secara empiris melalui studi perbandingan, dan mencari sebab-sebab terjadinya fenomena sosial, khususnya berbagai sebab bentuk perilaku sosial.¹⁰⁷

Sejumlah proposisi mengenai hubungan antara konflik dan berbagai aspek khusus kehidupan sosial dikembangkan Collins, sehingga dapat membantu untuk memahami sosiologi konfliknya:

1. Pengalaman memberikan dan menerima perintah adalah faktor yang menentukan pandangan dan tindakan individu
2. Makin sering orang memberikan perintah, orang akan makin bangga, makin percaya diri, makin formal dan makin mengidentifikasikan dirinya dengan cita-cita organisasi dan dengan mengatasnamakan organisasi, orang tersebut menjustifikasi perintahnya itu.
3. Makin sering orang menerima perintah, maka makin patuh, makin fatalistis, makin terasing dari cita-cita organisasi, makin menyesuaikan diri

¹⁰⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008, *ibid*: 288-290

secara eksternal, makin mencurigai orang lain, makin memikirkan imbalan ekstrinsik, dan amoral.¹⁰⁸

Teori konflik interaksional yang dikembangkan oleh Collins memiliki kelebihan sekaligus kontribusi yang sangat penting terutama terletak pada pendekatan integratifnya yaitu melakukan sintesis mikro-makro. Artinya teori konflik ini menutup kekurangan teori konflik sebelumnya yang lebih memusatkan perhatian pada struktur masyarakat (makro). Selain itu, teori konflik Collins tidak hanya membahas konflik dalam sistem stratifikasi, tapi berusaha memperluasnya pada ranah sosial lain, seperti hubungan antar jenis kelamin dan hubungan antar kelompok usia. Teori konflik Collins dinilai lebih komprehensif dibanding teori konflik pendahulunya, teori ini juga tidak membatasi diri pada konflik sektor kehidupan tertentu seperti konflik ekonomi, konflik dalam organisasi birokrasi, dan sebagainya, tetapi model teori konflik Collins dapat diterapkan pada berbagai bidang institusional seperti keluarga, organisasi agama, komunitas intelektual-ilmiah, struktur ekonomi, politik, militer dan sebagainya. Tidak hanya dapat diterapkan pada masyarakat industrial, tetapi juga pada masyarakat yang lain. Teori ini juga melihat organisasi formal dari perspektif konflik, yaitu sebagai jaringan pengaruh antarpribadi dan sebagai arena tempat kepentingan-kepentingan yang berbeda saling berbenturan. Dengan kata lain organisasi adalah arena perjuangan.¹⁰⁹ Organisasi industri sebagai suatu organisasi di mana masing-masing elemen memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain, bahkan juga bertentangan. Organisasi buruh yang dibentuk untuk memperjuangkan

¹⁰⁸ Randall Collins. 1975, *ibid*: 73-74

¹⁰⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008, *ibid*: 291

kepentingan anggota (buruh), aktivis atau pengurus juga berupaya untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Salah satu kelemahan dalam teori konflik Collins khususnya dan non-Marxian pada umumnya yakni tidak menjelaskan bagaimana peran negara dalam konflik industrial. Teori non-marxian menekankan pada konflik antar pihak yang memiliki sumberdaya (kekuasaan) dan pihak yang tidak memiliki sumberdaya.

Dengan mempelajari teori konflik seperti yang telah diuraikan di atas, serta berbagai kelebihan dan kelemahan masing-masing, teori konflik yang dikembangkan Collins lebih memusatkan perhatian pada dunia subjektif yang dikonstruksi sendiri oleh setiap individu, sehingga melihat konflik dari sudut pandang individu, karena akar teoretisnya terletak pada fenomenologi dan ethnometodologi. Meskipun demikian, Collins juga mengembangkan beberapa prinsip analisis konflik yang dapat diterapkan pada wilayah kehidupan sosial mana pun.

Studi ini berupaya memahami tentang makna konflik industrial dari perspektif Non-Marxian khususnya teori ritual interaksi (Interaction Ritual Theory/IRT) atau juga dikenal dengan teori konflik interaksional yang dikembangkan Collins dengan pendekatan fenomenologi.

1.6 Industrialisasi di Indonesia dan Isu Kontemporer Konflik Industrial

Konflik industrial merupakan suatu fenomena sengketa antara buruh dan majikan atau pengusaha yang dari tahun ke tahun tidak pernah berhenti dan bahkan pada waktu-waktu tertentu intensitasnya relatif tinggi. Konflik industrial yang terjadi di Indonesia seringkali ditangani melalui cara-cara yang tidak produktif, bahkan penanganan konflik oleh pemerintah dan perusahaan acapkali

malah menyebabkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi baru. Pada kondisi semacam ini tidak ada kepastian, kapan konflik industrial dapat ditransformasi pada bentuk-bentuk penyelesaian yang menguntungkan seluruh pihak, termasuk di dalamnya buruh, negara, dan perusahaan. Konflik industrial baik secara vertikal maupun horisontal masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan secara konstruktif. Bahkan kondisi ini kemungkinan akan memunculkan konflik dalam bentuk kekerasan langsung, ketegangan sosial, dan perasaan tidak aman di kalangan buruh secara kolektif.

Konflik yang terkait dengan perebutan dan eksploitasi ekonomi di Jawa Timur, konflik yang diiringi dengan ketegangan antara buruh dan majikan, petani dengan pengelola perkebunan, di beberapa daerah seperti Blitar, Lumajang, dan Madiun masih saja terjadi. Demikian juga konflik yang terjadi di beberapa wilayah yang terdapat pusat industri, yaitu antara kelompok yang merasa diuntungkan (majikan) dan kelompok yang merasa tidak diuntungkan (buruh), tidak ada yang terselesaikan dengan tuntas. Konflik industrial tidak selalu bermotif ekonomi, keuntungan, kesejahteraan, tetapi pasca reformasi konflik terjadi karena tidak adanya interaksi atau dialog buruh, pengusaha (manajemen) dan negara. Christine Alder (1999)¹¹⁰ yang meneliti korelasi antara kriminalitas dengan ketimpangan ekonomi, menemukan bahwa ada hubungan antara kriminalitas dan ketimpangan ekonomi.¹¹¹ Disebutkan bahwa mereka yang relatif

¹¹⁰ Christine Alder, "An Exploration of Self-Reported Sexually Aggressive Behavior Crime and Delinquency", dalam Treda Alder, Gerhard DW-Mueller dan Williams Laufer, 2003. New Delhi: McGraw-Hills, 1999: 19

¹¹¹ Elliot Currie, *Confronting Crime: an American Challenge: Volume 2*, Pantheon Books, 1985: 78-79

miskin lebih berpotensi kriminal dibanding miskin absolut.¹¹² Peluang deprivasi relatif lebih besar untuk melakukan kekerasan daripada deprivasi absolut. Dengan kata lain bahwa redistribusi pendapatan berkorelasi dengan munculnya konflik dengan kekerasan.

Sistem ekonomi kapitalis yang saat ini telah masuk di beberapa negara berkembang, semakin menambah tekanan pada masyarakat miskin seperti buruh, nelayan, petani kecil dan pedagang kecil. Kelompok ini dipaksa untuk beradaptasi dengan gaya hidup dan model ekonomi kapitalistik yang sudah berkembang di masyarakat sampai pada tataran yang paling bawah. Bagi masyarakat miskin melakukan adaptasi adalah suatu keharusan, meskipun dengan susah payah, sehingga yang terjadi adalah kegagalan yang terus menerus, dan sebagai akibatnya mereka ini menjadi kelompok yang dengan mudah melakukan tindak kekerasan.

Buruh industri atau pabrik sampai saat ini masih merupakan salah satu faktor produksi sebagaimana yang dikemukakan Cobb Douglas dalam ekonomi mikro, yakni output adalah fungsi dari capital dan labor atau $Q = f(C,L)$. Oleh karena itu organisasi buruh atau yang dikenal dengan serikat buruh senantiasa memperjuangkan kondisi semacam itu, agar posisi buruh bisa berubah menjadi mitra kerja yang saling menguntungkan. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidaklah mudah merubah posisi buruh tersebut, karena bargaining power buruh yang sangat lemah dalam pasar tenaga kerja sebagai akibat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, kesempatan untuk berdialog dan bernegosiasi, tingginya angka pengangguran, dan meluasnya kemiskinan. Sedangkan posisi pengusaha jauh lebih baik karena pemilikan aset-

¹¹² Belknap, Poverty, Power and White Collour Crime, Northeastern University Press, USA: Pennsylvania, 1989: 301

aset produksi ditambah lagi dengan tingginya angkatan kerja dan sempitnya lapangan kerja, sehingga ada kecenderungan di pihak pengusaha untuk mempertahankan besarnya upah yang sudah ditetapkan dalam rangka mengamankan perhitungan harga pokok barang. Seperti diketahui bahwa kenaikan upah buruh akan membawa konsekuensi pada harga barang, dan akibatnya masyarakatlah yang akan menanggungnya. Upah buruh merupakan biaya produksi yang paling fleksibel, sehingga dalam kondisi demikian, maka upah buruhlah yang akan dipertahankan. Bahkan setiap kali ada penetapan UMK yang baru, pengusaha selalu berusaha secara maksimal agar kenaikan UMK tidak melebihi angka 5%. Banyak argumentasi yang dapat dikemukakan pengusaha dalam menghadapi buruh dan pemerintah, seperti lesunya pasar, rendahnya produktivitas buruh, tingginya angka kehilangan di pabrik, kenaikan pajak dan bea masuk serta kenaikan harga bahan baku impor, ditambah dengan tuntutan buruh tentang kesejahteraan yang terus menerus, menjadikan para pengusaha atau investor mengancam akan henggang atau merelokalisasi industri atau menanamkan modalnya di negara lain.

1.6.1 Industrialisasi di Indonesia: Perkembangannya Pada Masa Orde Baru

Pada periode pasca tahun 1965 atau dikenal masa Orde Baru, istilah pembangunan merupakan kata kunci sekaligus menjadi agenda memperoleh tempat di hati masyarakat bahkan menjadi energi yang mampu menyedot perhatian masyarakat. Gagasan baru diyakini sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat, dan hanya akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi tinggi. Sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperkirakan dapat

meningkatkan skala industri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk keperluan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, maka pabrik atau industri harus bebas dari aktivitas politik. Oleh karena itu, diterapkannya pendekatan keamanan dan keterlibatan militer dalam berbagai sengketa atau perselisihan di pabrik menjadi alasan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi segera tercapai.

Diakui bahwa, pada awal pembangunan mulai dijalankan, sektor industri tidak menjadi tumpuan utama, tetapi seiring dengan perkembangannya, industri semakin diperkuat dan didorong untuk menjadi kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa dekade berjalannya pembangunan membawa konsekuensi pada gerak perubahan yang sangat penting bagi strategi perekonomian nasional. Perubahan tersebut berupa transformasi dari suatu ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian menjadi ekonomi yang berbasis sektor industri. Meski pun sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pemasukan devisa negara, akan tetapi makin lama makin bergeser, sebagai akibat perkembangan produksi dari sektor industri.¹¹³

Pergeseran itu dapat dilihat pada perbandingan kontribusi sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor mulai berkembang di tahun 1975, dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama pada tahun 1994 yang sangat mencolok. Selain kontribusi pada pemasukan negara, perkembangan industri juga sangat pesat, demikian juga jika memperhatikan kemampuan sektor industri

¹¹³ Agung Wibawanto, *ibid* : 27

dalam menyerap tenaga kerja, maka jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mulai turun sejak tahun 1971 sebesar 64,2% menjadi 54,8% pada tahun 1980, dan penurunan seperti terus terjadi seiring dengan makin terbatasnya lahan untuk pertanian. Begitu juga peningkatan sumbangan sektor industri dalam ekspor terus meningkat, pada tahun 1975 misalnya sumbangan sektor pertanian dalam ekspor mencapai 20%, sementara kontribusi barang manufaktur hanya sekitar 1%. Pada tahun 1994 kondisi tersebut mengalami perubahan yang sangat fantastis, di mana sumbangan sektor pertanian turun menjadi 15,80% dan produksi barang manufaktur sebesar 59,92% dari total ekspor non migas, yang dalam persen juga mengalami peningkatan yaitu 21% pada tahun 1975 menjadi 75,79% pada tahun 1994.¹¹⁴ Perkembangan tersebut menunjukkan indikator ekonomi makro. Seperti diakui bahwa pada masa awal pembangunan, sektor migas memiliki peran yang sangat besar, dan boom minyak telah menjadikan Indonesia sangat optimis dalam melakukan pembangunan. Bahkan peran negara sangat besar dalam mengarahkan perkembangan industri dan penyediaan fasilitas atau instrumen yang dibutuhkan. Industri yang dikembangkan adalah industri yang memproduksi barang yang mestinya diimpor (Industri Substitusi Impor /ISI).

Arah industri ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan, karena adanya tarik ulur kepentingan. Model atau strategi Industri Substitusi Impor (ISI) ini telah menimbulkan suatu relasi produksi yang tidak sehat, sebab kelompok yang dekat dengan kekuasaan ternyata lebih berpeluang untuk berkembang daripada kelompok yang jauh. Meskipun industri ini dapat berkembang, tetapi ada situasi yang tidak kondusif untuk perkembangan secara strategis. Dengan kata lain,

¹¹⁴ BPS, Ekspor Non Migas, Hasil Pertanian dan Manufaktur (diolah) 1975-1994,

industri substitusi impor (ISI) memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1) strategi ini memberi sumbangan yang kecil pada lapangan kerja, karena strategi industri substitusi impor yang dikembangkan lebih padat modal; 2) mahal dan berbiaya tinggi, cenderung memboroskan devisa negara; dan 3) lemah daya saingnya terhadap produk luar negeri.¹¹⁵

Dengan jatuhnya harga minyak, maka berbagai kemudahan yang menjadi dasar tumbuhnya industri semakin berkurang. Oleh karena itu, strategi beralih pada strategi berorientasi ekspor yang awalnya tidak setenar strategi substitusi impor. Strategi yang berorientasi ekspor sebenarnya tidak seluruhnya berbeda dengan ISI, yaitu masih tetap kental dengan patronase bisnis. Hal ini membawa akibat bahwa produk Indonesia di tingkat internasional sering terkena issue dumping, yang menggambarkan daya saing industri nasional masih kalah jika dihadapkan pada produk asing.

Komitmen pemerintah Orde Baru, adalah pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu faktor penting yang meningkatkan industrialisasi dengan cepat. Perkembangan tersebut dalam konteks makro tidak dapat lepas dari perkembangan internasional yang mengembangkan suatu mode proses akumulasi dan ekspansi modal, dan secara efektif dapat meredam gerakan buruh yang menuntut adanya perubahan. Perkembangan internasional pada tahun 1970 awal, melahirkan suatu konfigurasi dan kecenderungan baru dalam produksi, sehingga menjadi peristiwa yang menguntungkan bagi Orde Baru yang memiliki hubungan kedekatan dengan investasi luar negeri. Lahirnya Negara Orde Baru merupakan 'kondisi objektif' dan menjadi faktor kunci terbentuknya organisasi produksi.

¹¹⁵ Tulus T.H. Tambunan. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: kasus Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001: 55

Selain itu juga muncul konsep kapitalisme semu¹¹⁶, negara birokratik-otoriter, negara korporatis, kapitalisme rente, dan lain-lain menunjukkan betapa industri di Negara Orde Baru tumbuh dengan cepat.

1.6.2 Korporatisme Negara dan Posisi Kaum Buruh

Model interaksi dan relasi negara dengan kaum buruh dapat ditinjau dari teori korporatisme negara terutama dalam kaitannya dengan masalah perburuhan. Pada awal sampai medio 1960-an kondisi ekonomi dalam semua sektor pembangunan masyarakat Indonesia menunjukkan kondisi yang parah. Sebagai misal, inflasi yang sangat tinggi, dengan kondisi politik yang belum stabil, membawa konsekuensi pada sistem yang tidak berjalan atau menjadi kacau.¹¹⁷

Menurut Nicos Poulantzas¹¹⁸, kondisi sebagaimana yang terjadi tersebut disebabkan karena krisis politik dan ekonomi yang saling mempengaruhi, tidak adanya sistem yang harmonis antara kepentingan ekonomi dan politik. Krisis kepentingan ekonomi ditandai dengan berbagai kontradiksi dalam sistem yang dikembangkan sendiri dan peran organis sehingga tidak mendorong terciptanya laba dan surplus. Sementara krisis politik terjadi karena relasi antar kelas tidak seimbang dan secara terus menerus menciptakan konflik yang semakin keras dan berkembang baik konflik vertikal maupun horisontal, sehingga berakibat pada hilangnya legitimasi negara (kelas dominan). Poulantzas menyebutnya sebagai “krisis representasional” (representational crisis). Kasus di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk dapat ke luar dari krisis tersebut adalah dengan membangun

¹¹⁶ Yoshihara Kunio. *Kapitalis Semu Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1990: 79

¹¹⁷ Muhammad Rusdi. *Jurnal Ekonomi*, April 2006 Vol. XVI No. 1, 2006: 24

¹¹⁸ Nicos Poulantzas. *The Political Crisis and The Crisis of The State*, New York: Lewington Publisher, 1979: 25

kelembagaan yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu model “birokratik-otoriter” dan “negara korporasi” sebagaimana dikemukakan oleh O’Donnel dan Schimtter. Karakteristiknya adalah: 1) pemerintah dipegang militer sebagai lembaga dan berkolaborasi dengan teknokrat sipil; 2) didukung oleh entrepreneur oligopolistic yaitu bersama dengan negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional; 3) pengambilan keputusan lebih condong pada birokratik teknokrat, bukan mengakomodasi berbagai kepentingan dari banyak kelompok; 4) massa dimobilisasi; dan 5) untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan berbagai tindakan represif.¹¹⁹

Korporatis adalah suatu usaha untuk menekan konflik kelas atau kelompok kepentingan. Dengan demikian negara korporatis adalah: 1) menciptakan organisasi buruh maupun pimpinan perusahaan; 2) dengan tujuan eksplisit untuk menekan konflik kelas serta menciptakan harmoni, solidaritas dan kerjasama dalam hubungan perburuhan; dan 3) untuk kedua hal tersebut negara memiliki pengaruh yang sangat besar.¹²⁰ Sementara Orde Baru membangun suatu mekanisme dan sistem dengan mengembangkan kapitalisme yang dikenal dengan sebutan pembangunan, yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Pada saat itulah industrialisasi yang dengan modal asing berkembang dengan bebas. Dalam keadaan seperti ini menurut MacIntyre¹²¹ negara tidak netral lagi yang mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok, tetapi telah bergeser menjadi negara kapitalis yang lebih menguntungkan kelas

¹¹⁹ Muhtar Mas’oed. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1989: 10

¹²⁰ Muhtar Mas’oed. *Ekonomi Politik Indonesia, Memahami Berbagai Isu Pokok*, Jakarta: Badan Diklat Depdagri, 1998: 23

¹²¹ Andrew McIntyre. *Bussines and Politics in Indonesia*, Australia: Allen_Urwin Press, 1997:43

pemilik modal (pengusaha). Bahkan relasi antara negara dan pemilik modal sangat harmonis dan saling menguntungkan.

Relasi yang berkembang dalam negara kapitalis antara kapitalis dan aparatur negara bersifat instrumental, artinya negara menjadi instrumen atau alat untuk mengembangkan modal pengusaha sebagai upaya untuk mencapai surplus ekonomi. Pola relasi dalam masyarakat korporatis tersebut menjadi biasa. Dalam perkembangannya menunjukkan bahwa proses pembangunan kapitalisme tersebut berdampak pada berubahnya kehidupan buruh, artinya bahwa buruh sebagai suatu kelompok yang tidak dapat diabaikan dalam proses akumulasi modal. Buruh menjadi elemen yang sangat penting, karena dalam sistem kapitalisme buruhlah sebenarnya yang mencetak keuntungan dan surplus ekonomi.

Pada saat Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan di Indonesia, buruh sangat besar kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi, karena buruh merupakan unsur yang penting dan vital dalam pengembangan industrialisasi. Meskipun buruh berperan dalam memperbesar modal para kapitalis, tetapi buruh juga berpotensi untuk menggagalkan akumulasi modal yang tengah berlangsung. Pemogokan buruh yang merupakan aksi protes atas hak buruh yang tidak dipenuhi misalnya, menjadi hal yang menakutkan baik bagi negara maupun kapitalis (pengusaha), sebab selain melibatkan banyak buruh dan menghilangkan jam kerja, produksi menjadi berhenti dan akan merugikan banyak pihak (pemasok bahan baku dan pasar), sehingga konflik seperti itu dapat mengakibatkan macetnya sistem produksi dan akibat selanjutnya pada negara.

Dengan demikian buruh di satu sisi sangat dibutuhkan dalam proses produksi, tetapi di sisi lain buruh pun bisa mengancam proses produksi. Agar

tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, negara dan kapitalis mengembangkan sistem relasi yang minimal dapat meredam gerakan perburuhan yang dimungkinkan akan mengancam perekonomian nasional. Hubungan tersebut semakin kuat, sehingga konsekuensinya adalah memperlemah posisi buruh (bargaining position) baik secara ekonomi maupun politik. Bahkan negara dan kapitalis acapkali menggunakan birokrasi sebagai instrumen yang efektif untuk melakukan represi terhadap buruh. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Orde Baru tentang masalah perburuhan lebih menguntungkan kapitalis dan negara, dan sebaliknya sangat merugikan buruh, seperti misalnya sistem pengupahan, rendahnya upah dan tekanan untuk tidak melakukan pemogokan termasuk tidak adanya kebebasan berpendapat dan tindakan represif lainnya yang dianggap mengganggu proses produksi dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

1.6.3 Industrialisasi: Permasalahan Perburuhan di Indonesia Pasca Orde Baru

Pada akhir tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit diatasi, sebagaimana di negara-negara Asia mengalami krisis keuangan dan ekonomi terburuk dalam 50 tahun terakhir dan ditambah makin jatuhnya harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya, akibatnya ekonomi jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Krisis tersebut, semula berawal dari krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun berhenti di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, menjadikan pembangunan yang dilakukan hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil

kalangan masyarakat, karena belum adanya pemerataan pembangunan, bahkan cenderung terpusat.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling parah akibat krisis Asia dan buruh yang terorganisasi pun paling keras dibungkam. Apalagi hanya di Indonesia krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya krisis politik yang sangat mendasar. Jika memperhatikan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun hingga mencapai minus 14% (-14%) pada tahun 1998, merupakan situasi yang sangat parah, sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak dapat dihindarkan, akibat selanjutnya adalah tingkat pengangguran semakin tinggi.

Sejak pasca Orde 1998, persoalan perburuhan yang ada di Indonesia semakin kompleks dan rumit perkembangannya. Krisis ekonomi yang terjadi berkepanjangan memberi kontribusi yang signifikan terhadap persoalan perburuhan, mulai dari masalah pengangguran hingga masalah kepastian hukum. Di Asia, Indonesia adalah negara yang terakhir mengalami krisis namun menjadi yang paling lama lepas dari krisis tersebut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan jelas berdampak pada persoalan perburuhan di Indonesia, bahkan seluruh sistem yang telah mapan, akhirnya melonggar ketika krisis tidak kunjung teratasi, hal itu berarti terbukanya kesempatan baru bagi pengorganisasian buruh.¹²² Meskipun demikian, kemampuan buruh untuk mempengaruhi kebijakan negara masih sangat lemah.

¹²² Vedi R. Hadiz, "Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara" dalam Syarif Arifin, Fahmi Panimbang, Abu Mufakhir dan Fauzan (Ed.), 2012. Jawa Barat: Kerjasama Penerbit Kepik, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) dan Perkumpulan Sawit Watch, 2004: 8

Peristiwa tumbangnya rezim diktator di Indonesia pada bulan Mei 1998, membawa alam kebebasan yang makin terbuka terutama dalam upaya pengorganisasian buruh yang selama ini terbelenggu, dan memberikan dampak positif bagi setiap warga negara untuk berserikat. Akan tetapi, dalam kenyataan buruh yang terorganisasi tetap tidak banyak terlibat, padahal sarana organisasi yang ada sangat bervariasi. Bahkan kekuatan-kekuatan utama yang membentuk kekuasaan pasca Orde Baru, tidak satu pun yang memiliki dukungan dari buruh. Jika pada masa Orde Baru pemerintah berusaha untuk menyederhanakan partai politik (mengurangi jumlah), maka upaya ini juga mempengaruhi serikat bekerja yang menjadi onderbouwnya. Sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 pada tanggal 5 Juni 1998 hanya ada satu serikat buruh yang dikenal dengan istilah mono serikat pekerja, di mana SPSI merupakan satu-satunya serikat buruh yang diakui oleh pemerintah dan SPSI ini tidak pernah melakukan upaya untuk menentang PHK. Mono serikat pekerja ini jelas membatasi kebebasan buruh yang baru untuk berserikat.¹²³ Hal ini berarti buruh sangat dikendalikan, tidak diperbolehkan melakukan aksi unjuk rasa, mogok dan mengeluarkan pendapat, meminjam istilahnya Collins, buruh tidak pernah melakukan ritual interaksi dengan pengusaha (manajemen) dan bahkan dengan Negara. Bahkan kalau berani melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja, buruh adakan di'cap' sebagai subversi.

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 mengenai kebebasan berserikat, sangat mendorong pembentukan serikat pekerja di Indonesia. Sampai akhir tahun 2002 telah terdaftar 71 serikat pekerja berbentuk federasi dan lebih

¹²³ Payaman Simanjuntak. *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2003: 49

dari 100 serikat tingkat nasional menurut jenis usaha yang non afiliasi. Selain itu terdapat 1200 Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yang independen masih terdaftar dan berfungsi, sebagai akibatnya di beberapa perusahaan terbentuk lebih dari satu serikat buruh.¹²⁴

Dengan memperhatikan jumlah serikat buruh yang begitu banyak, maka perjuangan buruh pun makin tidak kuat, sebab banyak serikat buruh yang baru dibentuk belum mengakar serta jumlah anggota di tingkat perusahaan pun masih sangat kecil, sementara pimpinan serikat buruh juga belum memiliki banyak pengalaman. Selain itu, dengan serikat buruh yang sangat banyak jumlahnya dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain persaingan antar serikat untuk memperebutkan anggota, persaingan yang tidak sehat dalam pembentukan serikat buruh di tingkat perusahaan dan dalam menentukan wakil serikat buruh pada Tim Perunding Perumusan Perjanjian Kerja Bersama, serta kesepakatan antar serikat pekerja dalam setiap perundingan. Bahkan akan menghadapi kesulitan dalam menentukan wakilnya yang duduk di lembaga Bipartit dan Tripartit.¹²⁵ Permasalahan yang timbul dengan makin banyaknya serikat buruh adalah terjadinya konflik atau ketegangan di antara buruh sehingga timbul konflik horisontal.

Persoalan perburuhan yang terjadi di Indonesia di pasca Orde Baru meliputi beberapa masalah pokok, antara lain masalah pengangguran, meningkatnya jumlah pekerja informal, masalah pendidikan dan kapasitas, masalah upah buruh (termasuk sistem pengupahan dan besarnya upah), buruh outsourcing dan buruh kontrak, masalah sistem pengawasan tenaga kerja dan

¹²⁴ Payaman Simanjuntak, *ibid*, 57

¹²⁵ Payaman Simanjuntak, *ibid*, 57-58

masalah jaminan sosial tenaga kerja.¹²⁶ Selain itu, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon bagi buruh yang di PHK, THR, dan hak-hak sosial ekonomi yang lain seperti hak cuti, uang lembur, uang makan dan sebagainya. Masalah tersebut merupakan isu-isu yang selalu menjadi tuntutan yang tidak pernah surut bahkan tetap dijaga sebagai alat kepentingan politik.

Sampai saat ini outsourcing merupakan masalah yang sangat menonjol, hampir di setiap terjadi unjuk rasa buruh selalu menuntut dihapuskannya outsourcing karena dianggap merugikan buruh. Outsourcing dapat ditemukan di hampir seluruh bagian dalam proses produksi, hal ini merupakan bentuk nyata dari prinsip fleksibilitas pasar kerja.¹²⁷ Outsourcing atau alih daya merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain di luar perusahaan induk. Perusahaan di luar perusahaan induk bisa berupa vendor, koperasi atau pun instansi lain yang diatur dalam suatu kesepakatan tertentu. Selain itu, outsourcing juga didefinisikan sebagai pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung proses produksi outsourcing memiliki dua jenis: pertama, outsourcing pekerjaan yang berkaitan dengan pemborongan pekerjaan pada pihak lain, kedua, outsourcing manusia. Tipe outsourcing yang kedua merupakan praktek yang memberikan efisiensi pada tingkat tertentu dalam operasional bisnis, namun merugikan secara serius kepentingan buruh di pihak lain.¹²⁸

Di kalangan industriawan, informalisasi, sub-kontrak dan outsourcing merupakan suatu strategi manajemen yang sangat ampuh untuk mendapatkan

¹²⁶ Rekson Silaban. *Reposisi Gerakan Buruh, Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan, 2009 : 48-49

¹²⁷ Rekson Silaban, *ibid*: 71

¹²⁸ Priambudi, Komang. *Outsourcing Versus Serikat Kerja*. Jakarta: Alihdaya Publishing, 2008 : 12

keuntungan yang maksimal. Mekanisme outsourcing telah menjadi sebuah sistem perburuhan yang mengingkari hak-hak buruh, praktek inilah yang ditentang oleh gerakan buruh di Indonesia. Apalagi setelah disahkannya UU No. 13 Tahun 2003, praktek sistem kerja kontrak semakin meluas dan hampir semua perusahaan atau industri saat ini memberlakukan kontrak kerja yang pendek dan outsourcing bagi sebagian besar tenaga kerjanya.

Pada pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003: "*Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis*". Berdasarkan pasal inilah pemerintah telah mengakui pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing, yang dulu merupakan salah satu bentuk penjajahan koloni asing atas Indonesia di perusahaan-perusahaan perkebunan. Pasal itu pula yang menjadi landasan hukum bagi perusahaan outsourcing dan pengusaha berkonspirasi memberlakukan sistem outsourcing. Dalam perspektif buruh, outsourcing menjadi sebuah batu penghalang bagi peningkatan kelayakan hidup bagi mereka. Upah yang murah, tidak adanya jaminan sosial dan lain sebagainya adalah indikasi dari pengingkaran kapitalisme terhadap hak-hak buruh yang mencederai human right. Hubungan industrial dalam model kerja outsourcing, menjadikan buruh tidak mempunyai kejelasan dalam hubungan, berimbas pada tidak jelasnya posisi buruh dan bagaimana mereka menuntut hak-haknya. Buruh dituntut untuk memenuhi persyaratan dalam outsourcing, jam kerja yang padat, upah yang tidak seimbang, tidak adanya kesempatan untuk bergabung dalam organisasi buruh, karena waktu yang habis dalam kontrak kerja.

Selain outsourcing, buruh di Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada berbagai persoalan krusial. Baik persoalan eksternal yaitu relasi buruh dengan pemerintah dan pengusaha, maupun persoalan internal seperti kualitas SDM, bahkan konflik kepentingan antar pengurus serikat buruh. yang berdampak pada semakin lemahnya posisi tawar buruh. Bahkan "Banyak kalangan berkesimpulan bahwa gerakan buruh pasca Orde Baru telah memiliki ruang kebebasan memadai bagi perjuangannya, namun dalam kenyataan tidak demikian. Gerakan buruh di Indonesia masih butuh direposisi agar menjadi kekuatan yang dapat diperhitungkan,"¹²⁹ Demikian juga Rekson Silaban dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) yang menyampaikan, pencapaian gerakan buruh sekarang ini tidak sebesar kebebasannya. Kaum buruh di Indonesia memang kini memiliki kebebasan berserikat dengan kondisi yang jauh lebih baik, tetapi konflik relasi industrial-perburuhan juga didapati meningkat. Masalah upah dan kesejahteraan buruh tidak lain menjadi pemicu utama konflik. Berdasarkan data Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, jumlah kasus perselisihan antara buruh dan industrial bertambah dari tahun 2010 dengan 3.993 kasus ke 4.242 kasus di tahun 2011.¹³⁰

1.6.4 Munculnya Konflik Industrial dan Akar Masalahnya

Industri merupakan sebuah sistem sosial yang sangat kompleks dan berada dalam suatu sistem yang lebih besar, yang memiliki sistem stratifikasi tersendiri di dalamnya. Struktur organisasi industri, secara umum dibagi menjadi dua

¹²⁹ Lukman Hakim, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam seminar Peluang dan Tantangan Gerakan Buruh Indonesia Pasca reformasi, di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

¹³⁰ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/persoalan-buruh-indonesia-setelah-era-reformasi> diakses, 18 Juni 2012 pukul 20.00

kelompok besar, yaitu kelompok manajemen dan kelompok lini atau buruh. Pembagian dua kelompok besar ini berawal dari teori kelas Marx tentang buruh dan majikan. Analisis Marx bertitik tolak pada apa yang disebut sebagai : “bidang produksi”, “hubungan-hubungan produksi”, atau “hubungan-hubungan kekayaan”. Dalam kegiatan dan proses produksi, hubungan produksi merupakan hubungan yang melibatkan semua pihak.

Hubungan-hubungan produksi terbentuk karena adanya kepemilikan ekonomis atas kekuatan produktif. Para kapitalis menguasai dan memiliki alat produksi, sementara buruh hanya memiliki tenaga kerja, sehingga para buruh berada di bawah kontrol kapitalis, konsekuensinya adalah sebuah pembagian kelas antara kelas pekerja atau proletariat, dan kelas kapitalis atau borjuis. Hubungan-hubungan kelas tersebut sangat potensial terjadi konflik karena para buruh dipaksa menjalin hubungan yang tidak sederajat (asimetris).

Menurut Marx, perusahaan/industri merupakan dasar terjadinya perjuangan kelas, sebab ketika perusahaan mulai dengan kegiatan produksinya, maka sejak itu konflik dalam kehidupan industri mulai bermunculan. Munculnya konflik ini karena adanya berbagai kepentingan yang menyangkut pencapaian keuntungan bagi kaum kapitalis dan menyangkut kesejahteraan ekonomi kaum buruh. Konflik industrial ini makin meningkat intensitasnya karena adanya tumpang tindih wewenang dan faktor status lainnya, seperti faktor pendapatan. Tujuan utama kapitalis adalah usaha mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sementara buruh mengalami kesulitan dalam kehidupan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konflik merupakan fenomena yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Randall Collins yang mengkaji teori konflik dalam kaitannya dengan rakyat banyak, mengasumsikan bahwa rakyat banyak sebagai individu senantiasa ingin memiliki hal-hal tertentu, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Untuk memiliki hal-hal di atas, maka tidak ada individu yang mau kalah secara sukarela, sehingga dalam masyarakat akan senantiasa ada konflik sosial.¹³¹

Senada dengan Collins, Lewis A. Coser mendefinisikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Bagaimana pun konflik baik yang bersifat antar kelompok maupun yang intrakelompok (intern) menurut Coser, selalu ada di mana pun orang hidup bersama.¹³²

Sementara Susetiawan memandang konflik juga merupakan sebuah mekanisme kontrol dalam perusahaan. Konflik mengubah kontrol menjadi “two-way traffic”. Konflik tidak lagi hanya merupakan kontrol oleh pihak yang berada di atas yang mengontrol bawahan, akan tetapi yang di bawah juga mengontrol pihak atasan dalam hubungan-hubungan industrial.¹³³

Istilah konflik industrial mengacu pada hubungan konfliktual antara pemilik atau majikan dan manajemen di satu pihak dengan para buruh di pihak

¹³¹ Zamroni. Pengantar Pengembangan Teori Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992: 33

¹³² Veeger, Ibid.: 221

¹³³ Susetiawan, ibid.: 216

lain. Menurut Nicholas Abercrombie¹³⁴, konflik-konflik industrial memiliki manifestasi yang bervariasi. Konflik-konflik seperti misalnya pemogokan, sabotase, restriksi output, non-kooperasi, dan lain sebagainya dapat terjadi dalam basis individual maupun kolektif. Semua itu merupakan konflik-konflik yang terbuka dalam hubungan industrial. Sementara yang lain “terselubung” atau “tersembunyi” dan dikenal sebagai konflik latent.¹³⁵

Analisis Susetiawan mengenai konflik latent, biasanya muncul bilamana terdapat kontrol organisasi yang kuat yang berusaha mendominasi dan mensubordinasi para buruh. Dalam kasus disfungsi organisasi-organisasi pekerja di tingkat pabrik serta kegagalan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan para buruh, maka konflik majikan dan para buruh memiliki tendensi untuk lebih terselubung daripada terbuka. Akan tetapi, karena organisasi-organisasi buruh pada tingkat perusahaan tidak berfungsi, maka konflik-konflik yang terjadi tidak berlangsung secara kolektif. Mengapa? Karena tidak terdapat tawar-menawar secara terbuka antara para majikan dan buruh, sehingga konflik cenderung berbentuk individual.

Greenberg dan Baron memandang munculnya konflik disebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan. Menurutnya, konflik merupakan suatu proses yang dihasilkan dari tindakan kelompok/individu yang menurut pandangan kelompok/individu lain akan berakibat negatif terhadap kepentingannya. Dari kepentingan ini, konflik mencakup 4 elemen kunci, yaitu:

- 1) Kepentingan yang berlawanan/berbeda antar individu atau kelompok;
- 2) Menyadari adanya kepentingan yang berlawanan;
- 3) Keyakinan bahwa individu

¹³⁴ Nicholas Abercrombie, Stephen Hill dan Bryan S. Turner, Kamus Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010: 106

¹³⁵ Susetiawan, *ibid*: 220

atau kelompok lain akan menghalangi kepentingannya; dan 4) Tindakan yang menghalangi kepentingan pihak lain.¹³⁶

Haryani menerangkan munculnya konflik dalam perusahaan karena faktor-faktor tertentu yang secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³⁷

1) Faktor individual

Faktor individual muncul karena adanya perbedaan karakter individu atau adanya interaksi antar individu. Yaitu: 1) perasaan dendam terhadap orang lain; 2) terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh perilaku orang lain; 3) miskomunikasi yang mengakibatkan pemberian makna yang lain, dan 4) ketidakpercayaan seseorang terhadap yang lainnya.

2) Faktor organisasional

Greenberg dan Baron, meringkas beberapa faktor organisasional yang menyebabkan konflik misalnya: persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, ketidakjelasan tanggung jawab dan hak hukum, saling ketergantungan antar unit, sistem penggajian, adanya diferensiasi produk, dan perbedaan kekuasaan antar anggota organisasi.

Haryani menjelaskan bahwa dalam kehidupan organisasi yang semakin besar dan kompleks, maka jumlah individu dan kelompok pun akan semakin banyak dengan kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Komentar yang tidak ramah, keluh kesah, kegelisahan yang nampak pada wajah, perilaku gagap, melamun, “melengos”, dan ucapan yang ketus merupakan ekspresi adanya konflik. Oleh karena itu, pihak manajemen disibukkan dengan kemarahan,

¹³⁶ Greenberg dan Baron, 1996. “Behavior in Organization, California”, USA: Prentice Hall dalam Jonathan P. Sale, 2003 . [www.Dlsu.Edu/research/cates/industrial conflict/pdf](http://www.Dlsu.Edu/research/cates/industrial%20conflict/pdf)

¹³⁷ Sri Haryani . *ibid* : 36-37

kebencian, dan putusnya hubungan antar individu atau antar kelompok dalam organisasi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem pabrik (industri) terdapat dua kelompok ekonomis yaitu kapitalis dan buruh atau manajemen dan karyawan. Hubungan yang terjadi di antara keduanya adalah hubungan pasar, yang masing-masing baik kapitalis maupun buruh memiliki kepentingan yang berbeda.¹³⁸ Dalam kaitan ini James Scott mengemukakan bahwa hubungan antara kapitalis dan buruh yang bersifat asimetris dan eksploitatif dalam industri dianggap sebagai sumber konflik yang memungkinkan timbulnya perlawanan buruh, terutama apabila hubungan eksploitasi telah mencapai tingkat tertentu.¹³⁹

Hubungan eksploitasi dan asimetris antara pengusaha dan buruh akan melahirkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan buruh. Ketidakpuasan dan kekecewaan itu yang dapat menyebabkan terjadinya suatu gerakan atau perlawanan. Konsep tentang breakdown-deprivation dan solidarity mobilization, yang dikemukakan Robert Hagedorn (1983) sepertinya dapat digunakan untuk menyimak gerakan atau perlawanan buruh.¹⁴⁰ Breakdown-deprivation menunjuk pada berubahnya susunan masyarakat tradisional sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang cepat. Struktur sosial yang tidak terorganisasi, ledakan jumlah penduduk dan ketidakseimbangan lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi ketegangan, frustrasi, rasa tidak aman, dan pada gilirannya

¹³⁸ Eugene V. Schneider. *Sosiologi Industri* (terjemahan). New Delhi: Tata Mcgraw_Hill Publishing Company Ltd, 1986 : 47

¹³⁹ Basrowi & Sukidin. *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia, 2003: 74

¹⁴⁰ Hagedorn, Robert. *An Introduction Into Sociological Orientations*. New York: John Wiley & Sons, 1983: 516-522

akan mengakibatkan timbulnya perasaan sangat tertekan yang dapat meledak dalam bentuk kekerasan atau kekacauan.

Keadaan seperti itu tidak dapat dilepaskan dari konsep relative deprivation yang menunjuk pada adanya ketidaksesuaian antara value expectations dan value capabilities. Value expectations adalah kondisi kehidupan di mana masyarakat merasakan haknya untuk dapat memilikinya. Sedangkan value capabilities, merupakan kondisi di mana masyarakat merasa mempunyai kemampuan untuk meraih apa yang diharapkan. Kekurangan yang ada pada konsep breakdown-deprivation inilah yang mengakibatkan konsep pendukungnya yaitu solidarity-mobilization. Konsep ini menyetujui bahwa bertambahnya perasaan tidak puas dan keluhan-keluhan yang cukup mendalam terhadap kondisi yang ada merupakan hal yang penting untuk menjelaskan muncul dan berkembangnya suatu gerakan. Akan tetapi penganut konsep ini mengklaim bahwa suatu gerakan mungkin tidak akan muncul walaupun ada perasaan tidak puas yang meluas di kalangan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena relatif lemahnya kemampuan untuk bertindak secara kolektif (bersama), atau kemungkinan akan keberhasilan tindakan bersama sangat kecil. Menurut Tilly (1978) tindakan kolektif yang bermanfaat harus memiliki lima komponen yang berhubungan dengan kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang dan bentuk-bentuk tindakan yang berbeda-beda. Dijelaskan bahwa inti teori Tilly ini adalah kepentingan dan cara mendefinisikannya. Sejauhmana kepentingan kelompok bawahan sama seperti, berbeda dari atau bertentangan dengan kepentingan kelompok penguasa. Apakah kepentingan tersebut dalam istilah individu, semi-kolektif atau kolektif? Konsep organisasi mengarah pada struktur kelompok terutama yang mempengaruhi

kapasitasnya untuk tindakan kolektif. Sementara mobilisasi mengarah pada “proses di mana suatu kelompok memerlukan kendali kolektif atau sumberdaya yang diperlukan untuk tindakan”. Konsep peluang/opportunity terdiri dari tiga komponen yaitu keseimbangan kekuasaan antar pihak, ongkos represi oleh penguasa dan opportunity yang tersedia bagi kelompok bawahan untuk mengajukan tuntutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa teori Tilly ini memiliki tiga keuntungan dalam kaitannya dengan persoalan utama hubungan industrial, yaitu 1) membantu mentransendenkan perdebatan umum mengenai “menurunnya kolektivisme” sekaligus memikirkan lebih tepat perbedaan aspek kolektivisme dan individualisme; 2) teori Tilly memperkuat untuk mengenali adanya kesamaan di antara aspek kolektivisme yang berbeda-beda, sehingga tanpa organisasi kolektif di tempat kerja tidak akan diketahui derajat kepentingan kolektif di kalangan tenaga kerja dan; 3) teori Tilly membantu menyelesaikan sejumlah teka-teki dalam literature tindakan kolektif.¹⁴¹

1.6.5 Peran Negara Dalam Menciptakan Konflik Industrial

Sebelum menjelaskan bagaimana peran negara dalam menciptakan konflik industrial, bahasan diawali dengan menjelaskan secara lebih umum tentang bagaimana peran negara terutama dalam perkembangan industrialisasi di Dunia Ketiga. Peran negara di negara berkembang pada umumnya sangat besar atau kuat dibanding negara maju. Di negara maju otoritas masyarakat dipertimbangkan dalam proses kebijaksanaan negara, sedangkan di negara berkembang negara memiliki kemampuan dan kemauan yang deterministik untuk menentukan kehidupan sosial. Sebab dalam kenyataan negara-negara di Dunia Ketiga memiliki

¹⁴¹ Tilly, C. *From Mobilization to Revolution*, New York: McGraw-Hill, 1978 dalam John Kelly. *Rethinking Industrial Relations: Mobilization, Collectivism and Long Waves*, London and New York: Routledge, 2002, 25-26

kemampuan pendanaan baik yang berupa eksploitasi sumber alam maupun utang luar negeri, menguasai hukum dan aparat hukum termasuk polisi dan militer. Sedangkan posisi masyarakat sangat dependen, sehingga negara memiliki otoritas serta sumber legitimasi dan menjadikan masyarakat sipil semakin tergantung dan terbelakang.¹⁴²

Dalam tulisannya Hamza Alavi, John S. Paul dan Collinleis dalam *New Left Review* No 74 (1972) menjelaskan bahwa untuk memahami negara dan masyarakat di Dunia Ketiga sebagai negara bekas kolonial adalah teori negara dalam masyarakat periphal atau masyarakat pasca kolonial. Alavi mengembangkan premis utama bahwa perkembangan negara pasca kolonial mempunyai “otonomi relatif” terhadap kelas-kelas sosial karena kelas-kelas sosial tersebut memiliki struktur historis yang lemah. Alavi sendiri memperluas konsep negara “autonomy relative” menjadi negara yang berkembang secara berlebihan (*over-developed state*). Hal inilah yang membedakan sifat khusus negara pasca kolonial dengan negara pada masyarakat industri maju. Bahkan Alavi menjelaskan, negara pasca kolonial lebih sentralistik daripada negara industri maju. Oleh karena itu, kebangkitan fungsi-fungsi negara di Indonesia yang makin menguat disebabkan suatu proses struktural historis yang berlangsung sejak periode kolonial Hindia Belanda. Proses ini dianggap tidak mampu melahirkan kelas borjuasi atau kelas menengah yang kuat, bahkan Alavi secara khusus menunjukkan kelemahan-kelemahan kelas borjuasi lokal ketika revolusi kemerdekaan. Menguatnya negara ini sangat dipengaruhi oleh teori negara dalam masyarakat periphal yang meletakkan struktur sosial sebagai dasar untuk

¹⁴² Duto Sosialisme, *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001: 130

memahami dan menjelaskan suatu negara. Arief Budiman¹⁴³ memandang teori negara tersebut dikategorikan dalam "teori struktural tentang negara", yang menganggap negara memiliki kemandirian, meskipun kemandirian relatif. Peran negara relatif memiliki kekuatan untuk menghadapi dan memperlemah perkembangan masyarakat sipil di Dunia Ketiga.

Bagaimana peran negara di Dunia Ketiga yang khas Indonesia, Alavi berpendapat sebagai post kolonial states. Sebagaimana diketahui bahwa masalah utama negara kolonial adalah negara tidak didirikan oleh borjuis pribumi, tetapi oleh borjuasi imperialis asing, sebab struktur masyarakat pasca kolonial ditandai dengan berkembangnya kelas-kelas sosial yang lemah dan tidak memungkinkan hegemoni oleh satu kelas tertentu. Lahirnya negara di Dunia Ketiga merupakan keharusan struktural ketika harus mencari bentuk institusi kekuasaan setelah memperoleh kemerdekaan. Berbeda dengan pembentukan negara modern seperti di Eropa yang melalui proses transformasi dan berbagai perubahan struktural di berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dan berdasarkan kekuatan masyarakat itu sendiri.

Dasar pembentukan kelas di negara maju bersifat kompleks dan secara keseluruhan tidak berada di bawah borjuis pribumi, dan tidak pula sebagai alat dari kelas dominan dan bukan dari kelas-kelas yang lainnya. Negara menemukan dan memiliki "otonomi relatif" dan pada waktu yang bersamaan, negara bertindak atas semua kelas sebagai penjaga tatanan sosial di mana kepentingan mereka tertanam.

¹⁴³ Arief Budiman. *Teori Negara, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: PT Gramedia: 1996: 19-21

Menguatnya negara sangat relevan jika dikaitkan dengan industrialisasi. Menurut Sritua Arief (1990: 27-45), ada dua golongan negara Dunia Ketiga yang menjalankan strategi industrialisasi. Pertama, negara yang melaksanakan strategi industrialisasi substitusi import (import-substitution industrialization strategy); dan kedua, negara yang melakukan industrialisasi yang berorientasi ekspor (exported industrialization strategy). Meskipun kedua strategi tersebut berbeda, tetapi keduanya sama-sama dikategorikan sebagai strategi industrialisasi yang tergantung keluar (tergantung pada kekuatan modal dan politik asing).

Teori tentang menguatnya suatu negara berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara proses industrialisasi yang dilakukan oleh negara Dunia Ketiga dengan lahirnya negara kuat. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan ekonomi-politik kontemporer untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada perilaku negara. Negara seperti itu menjadi gejala di Dunia Ketiga yang lahir dalam proses industrialisasi sebagai legitimasi yang makin terjebak pada perilaku negara yang otoriter dan intervensionis. Asumsi dasar yang dikembangkan adalah semakin terlambat suatu negara melakukan industrialisasi (late industrialisation) atau pendalaman industrialisasi (deepening industrialisation), maka semakin diperlukan negara yang kuat dan mampu untuk mengontrol kekuatan-kekuatan dan perbedaan yang nyata pada peran negara. Hirschman berpendapat bahwa negara yang relatif "terlambat" menempuh industrialisasi mengalami tekanan pada semakin menguatnya negara dengan semakin berperannya perusahaan-perusahaan multinasional.

Argumen yang mendasari proses menguatnya negara dalam fenomena industrialisasi adalah negara Dunia Ketiga yang industrialisasinya terlambat

banyak membutuhkan modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang besar. Oleh karena itu negara dituntut untuk mendirikan pabrik-pabrik, barang konsumsi, mesin-mesin, sebagai modal industri. Dengan kata lain bahwa dalam industrialisasi yang terlambat peran negara secara struktural kuat, karena pengusaha tidak mampu secara ekonomi membangun proyek-proyek besar tanpa bantuan hutang luar negeri melalui pemerintah, sehingga modal terakumulasi dengan menguatnya negara.

Di Indonesia, dengan modal asing dan hutang luar negeri masuklah ke dalam struktur kapitalisme yang eksploitatif, sebab negara dan lembaga pemberi hutang menetapkan syarat, di mana negara penghutang harus mampu menjaga gejolak politik yang timbul, artinya rezim yang berkuasa harus berani menjamin kepentingan modal asing. Menurut O'Donnell, tuntutan akan jaminan terhadap kepentingan modal asing, menjadikan negara dituntut kuat yaitu mampu menyelenggarakan pembangunan tanpa menimbulkan gejolak politik pada masyarakat yang kemungkinan mengancam eksistensi modal tersebut.

Dalam kaitan antara negara dan industrialisasi, Atul Kohli¹⁴⁴ menyebutkan adanya tiga tipe negara yaitu negara neopatrimonial, negara kapitalis-kohefif dan negara multiklas-fragmentasi. Negara neopatrimonial bercirikan struktur otoritas legitimasi sentralisasi lemah, para pemimpin personalistik tidak terhalangi dengan norma atau lembaga, dan birokrasi berkualitas buruk. Selain itu, pegawai pada negara neopatrimonial memperlakukan sumberdaya rakyatnya demi kepentingan pribadinya. Dalam studinya Kohli mencontohkan negara Nigeria sebagai negara bertipe ini.

¹⁴⁴ Atul Kohli, *State Directed Development, Political Power and Industrialization in the Global Periphery*, New York: Cambridge University Press: 2004: 8-16

Negara kapitalis-kohesif dan negara multiklas-fragmentasi adalah dua dari negara tipe-ideal lain banyak dijumpai di dunia berkembang kontemporer. Negara-negara kapitalis-kohesif, kadang disebut negara berkembang, ditempatkan berlawanan dengan negara-negara neopatrimonial untuk kesinambungan politik yang efektif.

Negara-negara kapitalis-kohesif ditandai dengan politik kohesif, yakni dengan struktur otoritas tersentralisasi yang masuk ke dalam masyarakat. Negara-negara ini cenderung menyamakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan keamanan nasional sehingga keamanan nasional ditentukan sebagai prioritas. Saat mengejar cepatnya pertumbuhan, negara kapitalis-kohesif memberikan sejumlah tautan yang dapat dikenali dengan kelompok ekonomi besar masyarakat dan membagi efektif instrumen politik. Di antara tautan sosialnya ialah persekutuan erat dengan produsen atau kelompok kapitalis. Hubungan yang penting dari pengaturan politik semacam ini adalah mengontrol ketat buruh.

Di antara kedua ekstrim politik ini, efektivitas yang ditentukan oleh negara neopatrimonial di satu sisi dan negara kapitalis-kohesif di sisi lain, terletak negara multiklas-terfragmentasi. Berbeda dengan negara neopatrimonial, sebenarnya negara multiklas-fragmentasi adalah negara modern. Negara ini memerintahkan otoritas, dan arena publik di dalamnya sering cukup bagus terbentuk di mana para pemimpin bertanggungjawab atas kebijakan dan kinerja publik yang buruk. Akan tetapi, berbeda dengan negara kapitalis kohesif, otoritas publik di negara-negara tersebut cenderung lebih terfragmentasi dan tergantung pada aliansi kelompok yang lebih luas – yang artinya negara tidak berada di posisi menentukan tujuannya atau mengejar tujuannya secara efektif seperti halnya negara kapitalis-kohesif.

Usaha untuk mengejar agenda yang dipimpin negara dengan kapasitas negara yang terbatas, membuat negara multiklas-fragmentasi cenderung mejadi pelaku tengah di sejumlah dimensi, termasuk meningkatkan industrialisasi dan pertumbuhan.

Apabila struktur otoritas di dunia berkembang secara luas dapat dikelompokkan sebagai negara neopatrimonial, kapitalis-kohesif, dan multiklas-fragmentasi, pertanyaan pertama yang relevan dengan studi ini adalah bagaimana negara-negara itu mempengaruhi hasil akhir ekonomi. Lebih khusus lagi, mengenali variasi pada bagaimana negara diatur dan bagaimana hubungan kelembagaan negara dengan sektor swasta, adalah kunci untuk memahami efektivitas relatif dari intervensi negara dalam bidang ekonomi.

Negara kapitalis-kohesif pada umumnya menciptakan ekonomi politik, dengan mengubah negaranya menjadi korporasi yang dibimbing-negara, cenderung menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia berkembang. Negara kapitalis-kohesif berorientasi-pertumbuhan mengejar komitmennya untuk pertumbuhan tinggi dengan mengembangkan perdagangan dan intervensi negara yang dirancang bagus, konsisten dan dilaksanakan langsung. Tindakan kebijakan khususnya bervariasi dengan ditujukan secara umum untuk mempermudah hambatan permintaan dan kebutuhan yang dihadapi oleh para pengusaha swasta. Negara kapitalis-kohesif membantu mempermudah tersedianya modal, tenaga kerja, teknologi dan bahkan kepengusahaan. Oleh karena itu permintaan modal semakin besar saat pengumpulan pajak dan investasi umum, sementara di waktu lain, menggunakan bank yang dikendalikan publik untuk memberikan kredit pada perusahaan dan sektor yang disukai, dan di waktu lain pula mengijinkan inflasi

untuk mengganti sumber daya dari pekerjaan pertanian dan buruh ke industrialisasi swasta. Represi juga menjadi komponen utama di dalam memperkuat investor swasta agar menyiapkan pasokan yang murah, “fleksibel” dan buruh yang disiplin.

Negara kapitalis-kohef juga mengejar variasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen pertumbuhannya. Ini mencakup kebijakan moneter dan fiskal ekspansionis, kebijakan tarif dan tingkat-tukar yang ditujukan untuk memperbesar kebutuhan domestik. Pada saat kebutuhan domestik tidak cukup, negara-negara itu telah siap mengadopsi kebijakan yang lebih baru yang mengubah insentif sesuai dengan meningkatnya ekspor atau lebih membantu meningkatkan produksi untuk konsumsi domestik dan asing.

Negara kapitalis-kohef yang sukses menjadi industri selanjutnya menjadi pragmatis dan prokapitalis, yang secara murni dan ideologi pro-pasar. Di antara kasus-kasus dalam studi ini, Korea Selatan di bawah Park Chung Hee dan Brasil di bawah Estado Novo dan pemerintahan militer jelas-jelas cocok dengan model ekonomi politik ini.

Sedangkan negara multiklas-fragmentasi, Intervensi kebijakan di dalam negara multiklas-fragmentasi ditujukan bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan saja melainkan juga untuk memperkuat legitimasi dan penyediaan kesejahteraan jangka pendek. Tujuan politik dari negara-negara multiklas-fragmentasi memiliki beberapa akibat ketika memilih dan mengejar kebijakan pembangunan. Pertama, elit-elit penguasa kurang fokus pada kasus-kasus menilai intervensi negara dari sudut pandang konsekuensi pertumbuhan. Sebaliknya tujuan yang disatukan, memperkuat banyak kelompok dan individu menangkap

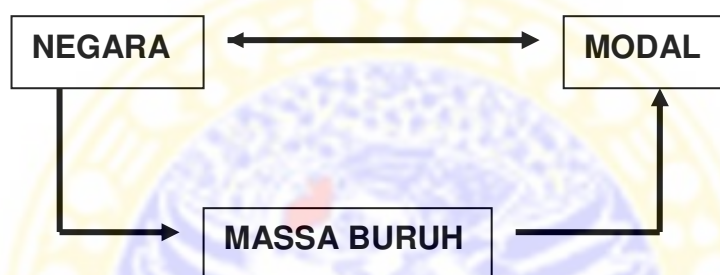
sumber daya negara untuk keuntungan konsumsi jangka pendek. Kedua, hubungan negara dengan sektor swasta dalam konteks demikian adalah jauh lebih rumit dibandingkan negara-negara kapitalis-kohesif, yang kadang kala kooperatif tetapi sering menimbulkan konflik. Ketiga, pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan lebih dipolitisasi, sehingga kebijakan satu arah menjadi lebih efektif.

Negara-negara multiklas-fragmentasi kemudian menjadi lebih “normal” dibanding dua jenis tipikal-ideal lainnya yang juga dibahas di sini. Namun, karena pemilihan strategi ekonomi dan alat kebijakan dalam kasus itu mencerminkan logika pertumbuhan dan politik, maka pengaturan kelembagaan dari negara-negara multiklas-fragmentasi jarang bersifat kondusif untuk meraih pertumbuhan tinggi dalam bidang industri. Kasus India mendukung maksud umum ini, sebagaimana halnya dengan kasus Brasil dan Korea Selatan. Negara multiklas-fragmentasi bukanlah negara yang lebih atau kurang intervensionis dibanding negara-negara kapitalis-kohesif, namun negara tersebut pada umumnya kurang efektif menuntaskan hambatan permintaan dan kebutuhan yang dihadapi oleh para investornya.

Munculnya konflik industrial di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang melibatkan tiga komponen besar yaitu Negara, Modal dan Massa Buruh, yang lebih dikenal dengan segitiga industri. Yang dimaksud dengan segitiga industri adalah suatu pola hubungan antara tiga kekuatan utama yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Kekuatan besar itu adalah: 1) Pengusaha; 2) Buruh; dan Negara (state apparatus).¹⁴⁵ Hubungan ketiga kekuatan itu sangat menarik dan membentuk sifat hubungan industri

¹⁴⁵ Agung Wibawanto, Imam Baskara dan Jirnadara, *ibid* : 39

(produksi) yang terjadi. Segitiga industri ini merupakan pengembangan suatu kerangka yang dibuat oleh Sritua Arief dalam menjelaskan “dialektika ekonomi perkebunan”.¹⁴⁶ Dalam kerangka analisisnya Sritua Arief menjelaskan bahwa pergantian kekuasaan dari kolonial kepada pihak nasional, ternyata tidak secara signifikan mengubah relasi ketiga komponen yang ada, dan sebagai akibatnya buruh berada pada posisi yang sama. Berikut adalah skema tentang segitiga industri.



Gambar 1.2: Segitiga Industri¹⁴⁷

Pada saat industrialisasi di Indonesia mulai berkembang, terjadi hubungan yang harmonis antara negara dan modal, yang terlihat dalam proses birokratisasi dan korporatisasi. Negara secara sistematis dirancang dan dikembangkan untuk berperan mendukung kepentingan kapital agar industrialisasi dan investasi tumbuh dan berkembang dengan cepat dan aman. Dalam hal ini, negara memberikan saluran untuk akumulasi, ekspansi dan mengabsahkan eksploitasi, konsep-konsep perburuhan yang diwujudkan dalam kebijakan, misalnya konsep mengenai upah.¹⁴⁸ Hubungan harmonis antara modal dan negara dapat dilihat

¹⁴⁶ Agung Wibawanto, Imam Baskara dan Jirnadara, *ibid*: 40

¹⁴⁷ Sritua Arief. *Dari Pretasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik*, Jakarta, UI Press, 1990: 207

¹⁴⁸ Agung Wibawanto, Imam Baskara dan Jirnadara, *ibid*: 41

sebagai suatu proses yang memungkinkan kekuatan modal untuk menguasai sumberdaya produktif secara legal, akibatnya timbul konflik berkepanjangan.

Lebih dari dua dasawarsa hubungan harmonis antara negara dan modal, berhadapan dengan buruh telah meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan dalam akumulasi modal. Akan tetapi, berlangsungnya hubungan yang harmonis antara negara dan modal tersebut bukannya tanpa syarat. Syarat inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk kepentingan negara yaitu berupa sejumlah pembiayaan yang harus dikeluarkan pengusaha dengan dalih untuk memperlancar dan mengamankan jalannya roda produksi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengusaha mulai mempersoalkan intervensi pemerintah/negara dalam kegiatan produksi, sebab biaya yang dikeluarkan untuk menjalin hubungan yang harmonis tersebut semakin mahal.

Pertanyaan yang terus berkembang tentang peran negara dalam kegiatan produksi dan pengaturan industri, sangat erat kaitannya dengan perkembangan dunia internasional yang memiliki kepentingan terhadap efektivitas peran negara atau menurunkan peran negara dalam lapangan ekonomi, dianggap dapat menimbulkan distorsi pasar. Artinya hubungan segitiga industri, sangat efektif menekan resistensi buruh. Dalam konteks saat ini, model segitiga industri dengan fokus pada buruh merupakan struktur hubungan yang sangat merugikan buruh dan mempersempit peluang buruh untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pabrik.¹⁴⁹ Dengan segitiga industri berakibat pada posisi buruh yang semakin termarginal.

¹⁴⁹ Agung Wibawanto, Imam Baskara dan Jirnadara, *ibid* : 42—44

Pada posisi ini, semestinya negara bersikap netral sehingga mampu menjaga hubungan yang baik dengan buruh dan pemodal secara adil dan proporsional. Negara merupakan pengontrol yang selalu dituntut mampu mengakomodasikan kepentingan kelas-kelas yang berada di bawahnya. Meskipun, pada dasarnya individu-individu dalam negara merupakan anggota salah satu kelas, namun semua pihak menuntut negara bersikap netral. Akan tetapi, dalam kenyataan historis, belum pernah ada negara yang bersikap netral. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam konflik antara buruh-majikan, negara selalu berpihak pada pemilik modal. Seperti contoh, ketika pemerintah berniat menaikkan upah minimum regional –sekarang disebut upah minimum provinsi-- maka mendadak sontak, para pemilik modal yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menolak rencana tersebut. Alasan yang dikemukakan, jika pemerintah tetap menaikkan UMP, pengusaha akan melakukan rasionalisasi (pemecatan) terhadap buruh atau dengan alasan lain yaitu bila situasi ekonomi tidak segera kondusif maka para investor pun mengancam akan hengkang ke luar negeri. Bagaimana sikap negara? Protes para pemilik modal itu ternyata dipenuhi sehingga rencana menaikkan upah dibatalkan.¹⁵⁰

Keberpihakan negara terhadap pemilik modal sudah berlangsung lama, bisa dilihat satu-persatu, mulai dari pemasangan hak berorganisasi, larangan untuk mogok, politik upah, politik shift, politik pengendalian dan pengendalian politik, tindak kekerasan terhadap aksi-aksi kaum buruh dan penangkapan serta pemenjaraan para aktivisnya. Belum lagi ditambah dengan pemberian upah yang sangat rendah, lingkungan pemukiman yang kumuh, hingga kondisi kerja pabrik

¹⁵⁰ Amiruddin "Reformasi:" Anti Gerakan Buruh" Diponegoro 74, alam Jurnal Hukum dan Demokrasi, YLBHI, Jakarta, 1999: 20

yang rawan kecelakaan. Kebijakan terakhir yang dibuat adalah Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan tentang penentuan besarnya upah minimum propinsi, kota/kabupaten (UMP/K).

Untuk melihat bagaimana peran negara dalam industrialisasi, Peter Evans (1995), menegaskan kembali pendapat Weber bahwa pada negara pembangun, birokrasi dan kapitalisme “memang benar-benar saling berhubungan”.¹⁵¹ Secara teoritis, Chalmers Johnson memperkenalkan fokus utama dalam perdebatan mengenai peran negara dalam industrialisasi. Johnson berpendapat bahwa “negara pembangun” seperti Jepang pasca PD II dan Wade dkk juga menyebut Korea dan Taiwan sebagai negara pembangun menggambarkan bahwa negara pembangun muncul dari latar belakang pertumbuhan ekonomi. Setelah PD II negara Jepang bertindak sebagai wadah untuk pasar modal yang hilang dan membantu “menginduksi” keputusan investasi transformatif. Bahkan lembaga-lembaga negara mulai dari sistem tabungan kantor pos hingga Bank Pembangunan Jepang sangat penting untuk memperoleh modal investasi yang diperlukan bagi industri. Sentralitas negara dalam menyediakan modal baru juga negara seperti Jepang melaksanakan “rasionalisasi industrial” dan kebijakan struktur industrial (Johnson, 1982, 27-28).¹⁵²

Sebagaimana kasus di Jepang, hubungan simbiotik antara negara dan konglomerat (chaebol) didasarkan fakta bahwa negara memiliki akses ke modal, dengan kemampuannya untuk mengalokasikan modal, negara meningkatkan

¹⁵¹ Peter Evans. *Embedded Autonomy, State and Industrial Transformation*, New Jersey: Princeton University Press, 1995: 44

¹⁵² Peter Evans, *ibid*: 48

pemusatan kekuasaan ekonomi di tangan konglomerat. Menurut Wade (1990, 320), negara “secara agresif menyeleraskan” aktivitasnya dengan menentukan proyek-proyek khusus yang harus dilaksanakan, seperti Park yang memerintahkan Daewoo mengambil alih perusahaan alat berat milik negara yang sedang bermasalah. Regim Park sangat tergantung pada chaebol (konglomerat) untuk melaksanakan transformasi industrial.¹⁵³

Menurut pandangan/perspektif struktural bahwa akar masalah konflik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power) dan kepentingan di dalamnya (Rubenstein, 1996). Secara sosiologis, kekuasaan dimanifestasikan pada bentuk wewenang legal formal, dan modal-modal ekonomi dan budaya. Dalam konteks konflik industrial, kekuasaan seringkali didefinisikan sebagai wewenang legal formal negara dan modal ekonomi pasar. Negara dengan kekuasaan legal formal mampu menciptakan regulasi (aturan-aturan) bekerjasama dengan kekuasaan ekonomi pasar bisa menentukan keberhasilan ekonomi suatu negara. Pada pengertian struktural ini, dua kekuasaan tersebut (negara dan pengusaha/modal ekonomi pasar) bermain mata untuk kepentingan dan tujuan masing-masing pemegang kekuasaan.

Dalam hubungan industrial, ada kecenderungan bahwa kekuasaan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan fakta hubungan-hubungan kerja akan menciptakan kekerasan (Sale, 2003). Johan Galtung membagi dua konsep kekerasan, yaitu kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan langsung seringkali didasarkan atas penggunaan kekuasaan sumber (resource power), dan kekerasan struktural yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan struktural.

¹⁵³ Peter Evans, *ibid*: 53

Kekuasaan sumber dibedakan menjadi kekuasaan punitif yang bersifat menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis dan kekuasaan renumeratif. Baik kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengungkapkan kekerasan struktural dan personal dapat menghalangi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini adalah kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Apabila empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul ke permukaan sosial.¹⁵⁴

Pada saat negara dan pasar menggunakan kekuasaan mereka untuk menciptakan kekerasan dalam bentuk pemberian upah yang kecil dan tiadanya jaminan keselamatan kerja pada para buruh, yang terjadi adalah proses respon dalam bentuk kekerasan juga. Akibatnya pola hubungan konflik adalah conflict spiral, suatu kondisi yang membuat para pihak berkonflik terus melakukan aksi balasan.¹⁵⁵ Pada kasus-kasus aksi buruh yang muncul dalam bentuk anarkis, perusakan kantor perusahaan, dan berbagai bentuk aksi kekerasan pada pengertian ini tidak lebih dari respon terhadap praktek kekerasan pemerintah dan perusahaan terhadap buruh.

1.6.6 Kategorisasi Konflik Industrial dan Penyebabnya

Penelitian yang dilakukan Sutinah, dkk (2007), menemukan bahwa pasca Orde Baru, intensitas dan gejala terjadinya konflik antara buruh, pengusaha dan

¹⁵⁴ I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Penerbit K:anisius, 1992: 111-117

¹⁵⁵ Camara, Dom Helder, *Spiral Kekerasan, Resist Book*, Jogjakarta, 2005, 89

negara (pemerintah) cenderung meningkat, dan dalam skala yang sangat besar: melibatkan ribuan buruh dan memacetkan kondisi lalu-lintas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas serta pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu dalam studi ini juga menemukan akar penyebab terjadinya konflik industrial dalam banyak hal karena perbedaan kepentingan dan berbasis pembagian material yang dinilai kurang adil dan hubungan sosial yang berjarak antara buruh dan pengusaha. Sebagai bagian dari tenaga produksi, buruh seringkali masih merupakan beban perusahaan. Tidak jarang terjadi, buruh memperoleh perlakuan yang ter subordinasi, kurang terbuka dan tidak dapat berkomunikasi dengan pengusaha, dan bahkan dilecehkan, sehingga potensi terjadinya konflik industrial memang bisa dipahami jika relatif tinggi –tergantung pada ada-tidaknya faktor pemercepat (precipitating factors) terjadinya konflik yang terbuka.

Susetiawan¹⁵⁶ dalam penelitiannya tentang konflik sosial menemukan bahwa working conditions yang berlangsung di perusahaan diputuskan secara sepihak oleh manajemen perusahaan, sementara ideologi harmoni dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP) justru menghasilkan konflik serta ketidakberdayaan organisasi buruh. Selain itu konflik yang terjadi antara buruh dan manajemen dapat terjadi secara terbuka atau tersembunyi (terselubung). Konflik terbuka tidak diekspresikan secara kolektif melainkan individual, dan buruh yang secara terbuka mengkritik keputusan manajemen sering dipecah dengan alasan menghambat proses produksi. Sementara konflik laten terjadi karena kontrol yang sangat kuat oleh manajemen yang mampu mereduksi

¹⁵⁶ Susetiawan, *ibid* : 328

inefisiensi buruh, tetapi justru meningkatkan konflik-konflik yang mengabaikan prinsip-prinsip etis. Dengan demikian konflik industrial tidak dapat dieliminasi dengan ketatnya kontrol manajemen.

Penelitian yang dilakukan Monique Borrel (2004) di Perancis menyimpulkan bahwa ada empat kategori konflik; 1) pemogokan yang terlokalisir; 2) pemogokan yang tergeneralisir; 3) gelombang pemogokan; serta 4) pemogokan demonstrasi nasional. Menurut Borrel, keempat kategori tersebut berbeda karena dua alasan. Pertama, kategori-kategori tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Kedua, dampak pemogokan bagi perekonomian dan masyarakat berbeda, tergantung pada kategorinya sebab para pekerja mengejar kepentingan/tujuan yang berbeda melalui masing-masing kategori.¹⁵⁷

Selanjutnya Monique Borrel (2004) berargumentasi bahwa: (i) para pekerja menggunakan pemogokan yang terlokalisir untuk memperoleh peningkatan sementara dalam hal pekerjaan dan tunjangan hidup, terutama kenaikan gaji; (ii) mereka (pekerja) menerapkan pemogokan yang tergeneralisir dan gelombang pemogokan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan yang tetap dan terlembaga seperti peningkatan keuntungan sosial yang bervariasi, upah minimum, asuransi, serta pengurangan jam kerja; dan (iii) mereka berpartisipasi dalam pemogokan demonstrasi nasional untuk mendukung partai-partai sayap kiri serta strategi serikat kerja yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan politik.

Dengan demikian, tujuan utama pekerja adalah untuk memperjuangkan perbaikan permanen yang tidak lagi dipentingkan oleh kegiatan politik yang

¹⁵⁷ Monique J. Borrel, *ibid* : 4

menyimpang. Sebagaimana diketahui bahwa hingga akhir era industri pada abad XX, ekonomi dan sejarah sosial Perancis telah terciptakan dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang terus berulang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari tahun 1950 hingga awal 1980-an, pemogokan liar serta demonstrasi besar-besaran (massa) di Perancis lebih memainkan peran yang sangat menentukan dalam membentuk perubahan ekonomi dan sosiopolitik daripada di negara-negara industri terkemuka di Eropa bagian barat dan di Amerika Serikat.

Sale¹⁵⁸ (2003), mengemukakan bahwa ada kelompok pemikiran yang berbeda tentang konflik industri. Kalangan penganut paham pluralis mengatakan bahwa konflik industri tak dapat dihindari karena pembagian-pembagian kelompok kepentingan, yang tentu memerlukan suatu jaringan aturan untuk manajemen dan pemecahan konflik. Kalangan Marxis berpendapat bahwa perpecahan-perpecahan kelas sosial berada di akar konflik dan bahwa ada suatu kebutuhan untuk mengamati hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang tidak seimbang di tempat kerja dan masyarakat yang lebih besar.

Faucheux dan Rojot (dalam Sale, 2003) menyatakan bahwa konflik adalah daya penggerak suatu sistem hubungan industri dan bahwa aturan-aturan didesain untuk memuat kegelisahan tenaga kerja. John Durlop dan para analis sistem membuktikan bahwa konflik ada di mana-mana namun merupakan perilaku yang menyimpang. Mereka merasakan kebutuhan akan suatu sistem aturan untuk mengelola dan memecahkan ketegangan tempat kerja, yang melibatkan tiga aktor

¹⁵⁸ Jonathan P. Sale; "Industrial Conflict" dalam the CBE Faculty in the column of Business Focus of Manila Bulletin published, 2003 January 31: 1 diakses tanggal 20 Juni 2010.

utama dalam suatu sistem hubungan-hubungan industri – pemerintah, pengusaha dan karyawan.¹⁵⁹

Lebih lanjut Sale, (2003), membedakan konflik kooperatif dan kompetitif. Teori konflik kooperatif menunjukkan bahwa para pengusaha dan karyawan dapat memiliki tujuan bersama. Konflik timbul terutama karena pihak-pihak memperdebatkan cara terbaik mencapai kepentingan-kepentingan umum mereka. Sementara teori konflik kompetitif menunjukkan bahwa tenaga kerja dan manajemen memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Selain itu, Sale (2003), membedakan tingkatan konflik, 1) konflik yang terjadi di tingkat hubungan-hubungan distribusi. Konflik di tingkat distribusi berarti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai alokasi penghargaan ekonomi di tempat kerja. Di tingkat konflik ini, hasilnya bisa berupa konflik atau larangan masuk. 2) konflik struktural. Di tingkat struktural, konflik bisa timbul karena organisasi didesain dengan buruk hingga tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan di lingkungan bisnis. Suatu contoh biasa adalah seorang bawahan yang menerima dua petunjuk yang bertentangan dari dua orang atasan. 3) tingkat hubungan manusia. Konflik di tingkat hubungan antar manusia merupakan konflik yang paling umum di antara ketiga konflik. Di tingkat ini, konflik bisa berasal dari perbedaan orientasi-orientasi sosial di antara para individu, kelompok-kelompok atau tenaga kerja dan manajemen. Sebagai akibatnya adalah pengasingan individu dan ketegangan kelompok. Sebagaimana pendapat Collins, bahwa interaksi antar elemen dalam hubungan industrial, minimnya interaksi mengakibatkan buruh tidak dapat melakukan dialog, atau

¹⁵⁹ Jonathan P. Sale, 2003; *ibid*: 23 diakses tanggal 20 Juni 2010: 1

perundingan, sehingga keputusan yang terkait buruh yang dibuat tidak melibatkan buruh, dan akibatnya terjadi konflik.

Menurut Michael Poole (1985), suatu pemogokan, sebagai indikator khusus konflik industri, memiliki empat dimensi,: (i) frekuensi, banyaknya kemacetan pekerjaan dalam suatu unit analisis pada suatu periode waktu khusus; (ii) luasnya, banyaknya pekerja yang berpartisipasi dalam kemacetan pekerjaan; (iii) lamanya, lamanya kemacetan, biasanya dalam orang/hari kerja yang hilang; dan (iv) dampak, banyaknya hari kerja yang hilang karena kemacetan.

Ada korelasi antara aktivitas pemogokan dan struktur tawar menawar. Douglas Hibbs (1976) menunjukkan dalam suatu studi yang meliputi beberapa masyarakat maju yang aktivitas pemogokannya lebih tinggi di negara-negara di mana struktur tawar-menawar terdesentralisasi (tawar-menawar perusahaan dan pabrik) dan lebih rendah di negara-negara yang telah memiliki sistem tawar-menawar yang tersentralisasi atau sangat tersentralisasi (tawar-menawar di seluruh industri atau di seluruh perekonomian). Dalam hukum Philipina, tawar-menawar bersama terjadi di tingkat perusahaan dan pabrik.

Seperti diketahui bahwa perkembangan industrialisasi menunjukkan perubahan yang begitu pesat. Ketika industrialisasi mulai berkembang, pemilik perusahaan adalah pemegang saham tunggal yang sekaligus berperan sebagai kontrol atas semua aset dan pengelolaan proses produksi. Pada saat ini, pemegang saham banyak orang bahkan buruh pun sebenarnya diberi kesempatan untuk memiliki perusahaan dengan cara andil dalam kepemilikan saham –meskipun sampai saat ini belum terjadi—lebih-lebih pada perusahaan-perusahaan yang terbuka. Sementara pemilik saham tidak lagi melakukan kontrol terhadap aset dan

pengelolaan proses produksi tetapi kontrol dilakukan oleh manajemen profesional meskipun tidak memiliki saham.

1.7 Metode Penelitian

Studi tentang konflik industrial ini tidak hanya bermaksud mengkaji konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha serta berbagai penyebabnya, tetapi lebih jauh lagi adalah berusaha untuk mengungkap dan menangkap makna di balik terjadinya konflik tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan non positivistik atau kualitatif.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif (intepretatif), karena berbagai alasan, antara lain: 1) studi ini mengkaji makna suatu tindakan yaitu apa yang terjadi di balik tindakan seseorang. Studi semacam ini disebut penelitian fenomenologi yang mengkaji apa yang ada di balik tindakan seseorang (individu), apa yang mendasari tindakan tersebut. Weber menyebutnya dengan motif yang mendasari tindakan in order to motive dan Alfred Schutz menyebutnya dengan konsepsi because motive.¹⁶⁰; 2) di dalam lingkungan sosial yang dihadapi individu memiliki strategi untuk dirinya sendiri, oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam (deepness); 3) yang dikaji adalah fenomena yang tidak tampak di luar (eksternal) dan berada dalam diri masing-masing individu (kesadaran dan tindakan individu). Pandangan fenomenologi menjelaskan bahwa setiap tindakan selalu melibatkan kesadaran yang didasari oleh motif yang bersifat internal; 4) penelitian kualitatif mengkaji fenomena secara holistik, artinya fenomena yang dikaji merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melibatkan berbagai

¹⁶⁰ Malcom Waters. *ibid*: 31

faktor yang saling terkait; 5) penelitian dengan pendekatan interpretatif bertujuan memahami suatu fenomena menurut pemahaman individu (informan).

Ada beberapa keuntungan jika menggunakan metode penelitian kualitatif, antara lain: berhadapan langsung dengan suatu kenyataan yang variatif (ganda), karena ketika di lapangan permasalahan atau fokus penelitian dapat berkembang dan lebih fleksibel. Selain itu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti lebih interaktif dengan informan, sehingga bisa lebih mengetahui kondisi informan apakah alamiah (natural) ataukah dibuat-buat. Studi kualitatif merupakan studi yang bersifat naturalistik, sehingga yang dipelajari adalah fenomena apa adanya. Kelebihan lainnya adalah peneliti bisa mempelajari konsep-konsep yang disampaikan informan secara lebih dalam dan apa adanya (learning from the people). Konsep-konsep seperti penindasan, ditekan, represi, ketidakadilan, penzoliman, pembelaan diri, perjuangan, perlawanan, pembodohan, perlawanan, dijebak, dijerumuskan, pembubaran paksa, anarkis, eksploitasi, kooptasi, milersitik, dan yang lain dapat dipahami dan bahkan dialami buruh dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep tersebut hanya bisa diperoleh dengan interaksi yang intensif dengan informan, tanpa hubungan yang intensif informan tidak akan bebas mengutarakan hal-hal yang dianggap sangat kritis.

Untuk mendapatkan suatu gambaran tentang pengalaman yang menyeluruh dari buruh dan aktivis buruh dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, karena: Pertama, tema studi yang dikaji berkaitan dengan konflik industrial menurut perspektif teori ritual interaksi (interaction ritual theory/IRT), yang dikembangkan oleh Randall Collins. Berbeda dengan Dahrendorf dan Coser

yang lebih menekankan tingkat analisis struktur sosial dan bukan antar pribadi, Randall Collins mendekati konflik dari sudut pandang individu, karena akar teoretisnya adalah fenomenologi dan etnometodologi. Meskipun memilih teori pada level individu dan mikro, Collins sadar bahwa "sosiologi tidak mungkin berhasil hanya pada level mikro saja", teori konflik tidak dapat melakukan apa pun tanpa analisis pada level masyarakat.

Kedua, karena studi ini bermaksud memahami bagaimana buruh dan aktivis buruh memaknai konflik industrial. Seperti diketahui, tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena sosial dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektivitas karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain, walaupun makna yang diciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang dilakukan, tetapi di dalamnya tetap ada peran orang lain.¹⁶¹

Menurut Alfred Schutz, pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mempelajari gejala dalam kehidupan sehari-hari, tidak memperhatikan apa yang menyebabkan gejala tersebut terjadi, sehingga dengan pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang konflik industrial, melalui pengalaman langsung dari buruh dan aktivis buruh. Peneliti, mendengarkan dan berusaha memahami dan mendeskripsikan peristiwa yang dialami buruh dan aktivis buruh seperti apa adanya tanpa pengurangan atau tambahan. Kajian dalam studi ini lebih mengutamakan bagaimana buruh dan aktivis buruh mengetahui, melihat,

¹⁶¹ John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. The United State of America: Sage Publications Inc., 1998: 53

mengalami bahkan terlibat dalam konflik industrial. Sementara menurut Husserl, fenomena yang tampak adalah refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, tetapi sebagai objek yang penuh dengan makna transedental, sehingga untuk bisa memahami dan mengungkap makna perlu masuk ke dalam fenomena yang tampak tersebut.¹⁶² Bagi Schutz, dunia sosial merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman yang penuh makna (meaningfull)

Studi ini tidak bermaksud untuk mencari sebab-sebab terjadinya konflik industrial, tidak menguji hipotesis sebagaimana pada metodologi positivistik, yang selalu mengandalkan analisis terhadap seperangkat fakta sosial yang bersifat obyektif, atas gejala yang tampak mengemuka, sehingga metodologi positivistik cenderung melihat fenomena dari kulit luarnya saja, tidak mampu mengungkap makna di balik gejala yang tampak tersebut. Fenomenologi berangkat dari dimensi subyektif yang tidak hanya memandang segala sesuatu dari gejala yang tampak akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu.

Secara lebih khusus pendekatan fenomenologi ini diharapkan mampu mengungkap dan memahami bagaimana buruh dan aktivis buruh yang acapkali dianggap mengganggu, ekstremis itu memaknai konflik atau perselisihan hubungan industrial. Fenomenologi melihat apa yang dikatakan buruh dan aktivis buruh, tingkah laku, dan semua hal yang dilakukan oleh informan penelitian merupakan hasil pemahaman, atau penafsiran atas dunianya, sehingga makna yang ada dibalik perilaku, ucapan yang tampak tidak terpisah dari dunia mereka termasuk kehidupan kesehariannya. Schutz mengemukakan bahwa dalam pikiran

¹⁶² Malcom Waters. *Modern Sociological Theory*, London: Sage Publications Ltd., 1994: 31

setiap manusia itu terdapat aturan-aturan, dan konsep-konsep tentang perilaku atau tindakan yang dianggapnya benar serta informasi lain, sehingga manusia dimungkinkan untuk bertindak atau berperilaku di dalam lingkungan atau dunia sosialnya. Schutz menyebutnya sebagai suatu kekayaan pengetahuan (stock of knowledge), sementara Husserl menyebutnya dengan istilah dunia kehidupan (life world).

Lebih lanjut Schutz mengemukakan bahwa kekayaan pengetahuan (stock of knowledge) tersebut menjadi suatu kerangka acuan atau orientasi bagi setiap individu manusia untuk menginterpretasikan setiap kejadian atau peristiwa serta menjadi acuan untuk melakukan tindakan praktis. Sebagai peneliti kualitatif, harus mampu bagaimana menangkap hal tersebut, oleh karena itu diperlukan suatu empati atau kemampuan untuk memposisikan diri dalam pikiran, perasaan dan motif yang melatarbelakangi kegiatan yang dilakukan setiap orang. Weber melihat tingkah laku manusia yang tampak sebenarnya merupakan konsekuensi dari pandangan atau penafsiran yang ada dalam kepala setiap manusia yang melakukannya.

Pandangan fenomenologi, dalam usaha untuk mengungkap makna tingkah laku atau perilaku manusia adalah dari sudut pandang atau kacamata orang yang melakukannya (emic). Artinya peneliti belajar memahami perilaku manusia menurut pemahaman atau pemaknaan orang atau individu yang melakukannya, bukan dari sudut pandang peneliti, dengan kata lain peneliti belajar dari informan (learning from the people). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif dan terutama fenomenologi, informan adalah sebagai ahli (expert), sehingga peneliti belajar dari informan. Peneliti kualitatif berusaha memahami dan mengungkap

tentang pengalaman sosial buruh dan aktivis buruh terutama dalam perselisihan/konflik hubungan industrial dan bagaimana buruh tersebut memaknai pengalamannya. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki sifat yang sangat penting yaitu sifat empati yang tinggi dan menempatkan informan penelitian sebagai ahli. Bahkan Schutz memberi saran pada peneliti apabila menerapkan pendekatan fenomenologi, agar tidak mempunyai kepentingan apapun, dan untuk mendapatkan hasil atau data yang benar-benar meyakinkan (reliable), peneliti berperan sebagai partisipan aktif dalam kegiatan atau dunia sosial informan yang diteliti. Tidak kalah penting adalah sikap netral dan kemampuan peneliti menjadi pendengar baik dan penuh empati.

1.7.1 Sasaran dan Informan Penelitian

Studi ini, sesuai rencana dilakukan di Kota Surabaya, yang sejak lama dikenal sebagai kota industri (urban industrial), dan pusat perkembangan industri, seperti di kawasan Rungkut industri (SIER), di kawasan Margomulyo (Tandes). Pada pasca Orde Baru, industri (pabrik) yang berkembang di Surabaya mulai mengalami penurunan sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan hengkangnya sejumlah investor ke luar negeri. Hengkangnya sejumlah investor juga ditengarai akibat konflik atau perselisihan hubungan industrial yang terus menerus bahkan pasca Orde Baru, perselisihan semakin meningkat. Mulai menjelang hari buruh internasional (May Day) dilanjutkan dengan perselisihan buruh dan majikan masalah tunjangan hari raya, persoalan penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) sampai penetapan upah minimum propinsi/kabupaten/kota (UMP/K), nyaris tidak berhenti. Dengan tuntutan yang sangat bervariasi dan

semakin meningkat, mulai tuntutan akan kebijakan yang pro buruh, komponen KHL, kenaikan upah, tunjangan yang lain, sehingga pengusaha atau investor merasa tidak mampu untuk memenuhinya. Akibatnya banyak investor yang mengancam dan hengkang ke luar negeri atau melakukan rasionalisasi tenaga kerja, jika terjadi demikian muncul persoalan baru lagi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, tuntutan uang pesangon, tuntutan agar buruh outsourcing diangkat menjadi buruh tetap dan lain sebagainya.

Untuk menentukan informan, sejak awal peneliti menyadari bahwa untuk mencari dan mewawancarai buruh industri dan aktivis buruh bukanlah hal yang mudah, karena jadwal kerja yang tidak sama atau dengan system shift, dan pada saat penelitian ini berlangsung buruh dan aktivis buruh sedang mempersiapkan aksi unjuk rasa terkait dengan penentuan UMP/K di Jawa Timur. Lebih sulit lagi, jika penelitian dilakukan di dalam pabrik, peneliti pasti tidak akan diijinkan, lebih-lebih isu yang dikaji adalah konflik atau perselisihan hubungan industrial. Oleh karena peneliti sudah beberapa kali melakukan kajian tentang buruh dan melakukan pemetaan tentang konflik industrial, maka peneliti telah memiliki bekal untuk mencari kembali sejumlah informan yang dibutuhkan. Dengan bantuan teman-teman aktivis LSM, serikat buruh, aktivis buruh, peneliti akhirnya menemukan sejumlah informan yang dibutuhkan dapat tercapai. Selain itu, atas bantuan teman dari salah satu LSM terkenal di Surabaya, peneliti mendapatkan beberapa nomer telepon dari aktivis buruh, yang kemudian disebut dengan informan kunci. Informan kunci ini berperan sebagai “pembuka pintu” bagi peneliti untuk memperoleh informasi tentang buruh yang aktif, baik dalam serikat buruh maupun yang terlibat dalam konflik.

Di samping itu, dalam berbagai kesempatan peneliti juga telah beberapa kali bertemu dengan beberapa teman dari LSM dalam forum diskusi yang memperbincangkan persoalan gerakan perburuhan di Jawa Timur. Selain aktivis LSM, peneliti masuk dalam kehidupan dan gerakan buruh melalui serikat buruh, antara lain FSPMI, SBSI, SPN dan SPSI. Selain buruh sebagai informan, peneliti juga melakukan wawancara pada wakil dari pengusaha (APINDO Jawa Timur), dan instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Studi ini tidak membatasi dan menetapkan jumlah informan yang diwawancarai, karena dalam penelitian dengan kualitatif yang dipentingkan adalah kedalaman data, sehingga wawancara pada informan berikutnya akan dihentikan bilamana informasi yang diperoleh telah menunjukkan titik “jenuh” atau tidak menemukan lagi variasi dan hal-hal baru di lapangan. Dalam wawancara mendalam ini peneliti berusaha untuk menggali riwayat hidup atau cerita kehidupan (life history) informan, selain itu juga dilakukan triangulasi untuk cross-check data sehingga diperoleh data dan informasi yang betul-betul akurat.

Informan penelitian adalah aktivis buruh dan buruh yang aktif dalam berbagai aksi seperti unjuk rasa, demonstrasi dan mogok kerja. Informan penelitian berasal dari berbagai serikat buruh, baik serikat buruh yang dibentuk pada masa Orde Lama yang kemudian di-non aktifkan ketika Orde Baru dan bangkit kembali pada pasca Orde Baru (Sarbumusi), serikat pekerja yang didirikan pada masa Orde Baru dan oleh pemerintah Orde Baru (SPSI), dan SBSI juga didirikan pada masa Orde Baru tapi tidak diakui oleh pemerintah bahkan seolah dilarang beroperasi, dan serikat buruh yang didirikan pasca Orde Baru tepatnya setelah disyahnkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh (FSPMI, SPN, SPBI, dan sebagainya). Peneliti membedakan aktivis buruh (bukan pengurus serikat) dengan aktivis buruh (pengurus serikat buruh), karena tidak semua aktivis adalah pengurus serikat buruh. Selain itu kriteria dalam menentukan informan juga memperhatikan aspek pengalaman, dan yang pasti adalah kesediaan buruh dan aktivis buruh meluangkan waktu untuk menjadi informan atau nara sumber yang diwawancarai berulang kali. Selain aktivis buruh dan pengurus serikat buruh, peneliti juga melakukan wawancara pada beberapa orang seperti pengusaha (mewakili Apindo), dan aparat pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja (bagian Hubungan industrial dan Syarat Kerja/Hubinsyaker, serta bagian pengawas). Informan aktivis buruh dan pengurus serikat sebanyak 16 orang dan 3 orang sebagai informan di luar buruh sebanyak tiga (3) orang yaitu seorang dari Apindo dan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sebanyak 2 orang.

Informan pertama yang peneliti hubungi melalui telpon adalah Khoyang aktif di SPBI dan LSM Kontras, berusia 33 tahun, berpendidikan SMA dan masih lajang dan bekerja sebagai penjual buku. FK ini berlatar belakang aktivis LSM, dan sudah sembilan (9) tahun aktif SPBI sejak pertama masuk serikat buruh belum pernah berpindah atau berganti serikat.

Informan kedua, yang bersedia diwawancarai adalah Jam seorang aktivis buruh dan sekarang menjabat Sekjend FSPMI, informan ini berpendidikan SMA dan berusia 32 tahun dan masih lajang. Pernah manjadi stafnya Rieke Dyah Pitaloka, salah satu anggota DPR. Jam ini berulang kali pindah pekerjaan mulai dari bekerja di pabrik sepatu sampai dengan terakhir bekerja di restoran cepat saji KFC sebagai kasir. Jam juga beberapa kali berpindah serikat, pertama kali

menjadi anggota SPSI karena pada masa Orde Baru hanya ada satu serikat pekerja (SPSI), sehingga semua buruh harus masuk serikat tersebut. Setelah ada Undang-Undang tentang serikat buruh, berdiri banyak serikat, salah satunya adalah Sarbumusi yang bangkit lagi setelah di-non aktifkan selama Orde Baru, tetapi karena merasa kurang 'sreg', kemudian berpindah ke Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) sejak tahun 2002, sampai sekarang. Sekarang tidak lagi sebagai buruh pabrik, tetapi lebih fokus sebagai Sekjen FSPMI.

Informan ketiga, dalam studi ini adalah Muk, Laki-laki yang saat ini berusia 52 tahun, berpendidikan Sarjana dan sudah berkeluarga dengan dua anak. Muk saat ini menjabat sebagai Ketua Sarbumusi Surabaya dan masih aktif bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Adi Husada Surabaya dan menjadi dosen di salah satu PTS di Sidoarjo. Menjabat sebagai Ketua Sabumusi Surabaya, sejak bangkit kembali pasca Orde Baru yaitu setelah adanya kebebasan berserikat sehingga banyak didirikan serikat buruh di Indonesia.

Informan keempat, adalah Har, laki-laki yang berpendidikan SMA dan pernah mengenyam bangku kuliah selama 3 semester, sudah berkeluarga dan memiliki satu (1) anak yang seolah di TK dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan masuk di SBSI sudah cukup lama. SH ini saat ini bekerja di bidang pariwisata dan sering diperlukan di salah satu EO di Surabaya.

Den adalah informan kelima, berusia 54 tahun berpendidikan Sarjana Ekonomi, berkeluarga dengan 3 anak dan 3 cucu dan aktif bekerja di PT. Parabaya Jayabaya, dan sejak tahun 2011 menjabat sebagai Ketua KSPSI Surabaya. Den sejak pertama bekerja sebagai buruh langsung menjadi anggota SPSI. Sampai

sekarang menjabat ketua, dan mengklaim SPSI sebagai serikat pekerja yang paling besar jumlah anggotanya. Selain Den, informan yang berasal dari SPSI adalah Kad sebagai informan keenam, yang sudah puluhan tahun aktif sebagai Ketua salah satu SPA yaitu Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum (SPBPU) anggota K-SPSI. Untuk diketahui bahwa K-SPSI Surabaya memiliki 13 SPA (serikat Pekerja Anggota).

Sebagai informan ketujuh adalah Dwi, perempuan yang berumur 42 tahun, ini berpendidikan Sarjana Hukum dan sudah berkeluarga. Bekerja sebagai pengacara, sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Surabaya. Dwi, dulu spesialis pengacara pekerja, dan pernah ikut di majelis P4D Pemutus Perkara di tingkat Provinsi Jawa Timur selama 7 tahun. Dwi masuk ke PPMI itu sekitar tahun 2000, organisasi ini kemudian pecah menjadi PPMI dan Produktiva, perpecahannya di seluruh Jawa Timur membelot menjadi Produktiva sehingga PPMI ini sempat tertidur. DH merasa terpanggil untuk kembali ke PPMI membangun kembali PPMI sampai tercatat lagi dan mejadi Ketua PPMI Surabaya.

Informan kedelapan adalah Sun, laki-laki yang berusia 40 tahun dan sudah berkeluarga ini, mengenyam pendidikan SMA. Sun bekerja di PT. Sinar Karya Dua Abadi yang memproduksi keramik, di bidang sortir packing selama 11 tahun, dan sejak bekerja Sun menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN). Bahkan sudah dua (2) periode ini menjadi ketua serikat di tingkat perusahaan. Sebelum menjadi ketua serikat di tingkat perusahaan, Sun pernah menjadi pengurus DPC Kabupaten Gresik selama dua periode, kalau dulu namanya SPTSK kalau sekarang SPN (Serikat Pekerja Nasional).

Sebagai informan kesembilan, adalah Ami, laki-laki yang bekerja sebagai buruh tetap di PT Inja Plus yang memproduksi kantong plastik. Ami sekarang berusia 33 tahun, masih lajang dan masih betah hidup sendiri, Ami sudah bekerja 15 tahun, sejak lulus SMK langsung diterima bekerja di Inja Plus sebagai buruh kontrak selama enam (6) bulan, dan setelah selesai kontrak langsung diangkat sebagai buruh tetap sampai sekarang. Ami, aktif sebagai ketua Sarbumusi di tingkat perusahaan. Sejak pertama masuk serikat buruh langsung ke Sarbumusi, Ami juga aktif dalam berbagai aksi unjuk rasa terutama untuk memperjuangkan buruh outsourcing.

Informan kesepuluh adalah Don, yang masih berusia 25 tahun dan belum berkeluarga. Don ini berpendidikan SMA, dan begitu leluasa sekolah langsung bekerja di PT. Surya Dave Plastik, yaitu perusahaan yang memproduksi plastik untuk alat-lat rumah tangga. Don, sejak pertama bekerja langsung masuk menjadi anggota FSPMI, bahkan sudah empat (4) tahun terakhir ini dipercaya sebagai koordinator lapangan untuk setiap aksi yang dilakukan FSPMI Jawa Timur. Oleh karena itu, Don ini banyak dikenal buruh-buruh yang sering terlibat dalam aksi unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya. Bahkan sebelum aksi dilakukan, Don juga aktif dalam mempersiapkan keperluan aksi seperti spanduk, atau atribut yang lain. Peneliti juga pernah diminta untuk bisa datang pada pukul 21.00, saat buruh sedang mempersiapkan diri untuk melakukan aksi di Polda Jawa Timur pada pagi harinya.

Informan kesebelas adalah Pri, laki-laki yang berusia 36 tahun sudah berkeluarga, tapi belum dikaruniai anak. Pri ini mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) dengan alasan orangtuanya tidak mampu dan masih

membayai adik-adiknya. Pri bekerja sebagai buruh tetap di PT. Sari Rajut yang bergerak di bidang konveksi. Pri bekerja selama 15 tahun, di bagian umum setelah dipindah dari bagian konveksi, dan menjadi anggota serikat buruh Sarbumusi bangkit kembali sejak adanya undang-undang tentang serikat pekerja/serikat buruh. Menurut Pri, di PT Sari Rajut ini mayoritas buruhnya adalah anggota Sarbumusi.

Fik sebagai informan keduabelas, buruh perempuan yang berumur 21 tahun, masih sangat muda dan belum berkeluarga. Fik berpendidikan sampai lulus SMEA, bekerja sebagai buruh kontrak di PT SDP, selama empat (4) tahun di bagian operator produksi. Fik adalah salah satu anggota FSPMI. Pertama bekerja di PT. SDP, Fik adalah anggota SPSI karena hanya satu-satunya serikat buruh yang ada di PT SDP, dan setelah di perusahaan ada serikat buruh selain SPSI, Fik langsung pindah ke FSPMI, karena SPSI tidak membantu kesulitan anggotanya yang sedang bermasalah. Pada waktu peneliti melakukan wawancara, Fik sedang dikenai sanksi skorsing selama 6 bulan, karena ikut mempersiapkan keperluan untuk aksi unjuk rasa yang akan dilakukan teman-teman buruh yang tergabung dalam FSPMI. Selama diskors, Fik tetap mendapatkan upah pokok, tapi merasa tidak enak, karena tidak bekerja tapi mendapat upah,

Informan ketigabelas adalah Eko, laki-laki yang berpendidikan S1 Teknik Industri salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya, ini berusia 35 tahun dan sudah berkeluarga dan punya satu anak laki-laki. Eko bekerja di PT. Kedaung Subur sejak masih berstatus mahasiswa, sampai sekarang sudah 16 tahun bekerja dan menjadi karyawan tetap di bagian packing sebelumnya Eko bekerja di bagian printing. Eko sejak bekerja di PT. Kedaung Subur itu langsung menjadi anggota

SPSI, karena sebelum reformasi hanya ada satu serikat, tidak bisa memilih seperti sekarang. Sejak tahun 2009 Eko dipilih sebagai ketua SPSI di tingkat perusahaan, dengan niat untuk berlatih berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak buruh.

Sebagai informan keempatbelas adalah San, buruh laki-laki yang berusia 45 tahun ini sudah berkeluarga dan dikaruniai tiga anak. San lulusan SMA yang bekerja di PT. Kedaung Subur selama 24 tahun dan sekarang sebagai buruh tetap. Awalnya San bekerja di bagian printing selama 16 tahun, dan sejak 8 tahun yang lalu dipindah di bagian packing. San ini menjadi anggota serikat buruh di SPSI sejak pertama kali masuk bekerja di perusahaan tersebut tahun 1987, karena pada masa Orde Baru hanya ada satu serikat dan harus masuk menjadi anggota.

Sam adalah informan penelitian yang kelimabelas, adalah seorang buruh laki-laki yang berusia 40 tahun, sudah berkeluarga dengan tiga orang anak, yang semuanya tinggal di Surabaya. Sam bekerja sebagai buruh di PT. Kedaung Subur sebagai buruh tetap, dan selama 19 tahun tersebut sempat menangani bagian generator dan sekarang berada di bagian gudang. Sejak bekerja di perusahaan PT. Kedaung Subur, Sam tidak menjadi anggota SPSI, tetapi memilih aktif dan menjadi pengurus komisi dalam Organisasi Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang di kenal Kikes SBSI meskipun tidak diakui oleh pemerintah.

Informan penelitian yang keenambelas adalah Roj, buruh laki-laki ini berpendidikan SMA lulus tahun 1987, sekarang usianya mencapai 46 tahun, sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Roj bekerja di PT. Kedaung Subur sudah lebih dari 25 tahun sejak tahun 1988, karena itu sudah berstatus sebagai buruh tetap dan selama ini bekerja di bagian packing. Roj mengatakan masuknya di Kedaung

Subur hampir bersamaan dengan Sam selisih setahun, dan sama-sama menjadi anggota serikat buruh SBSI, yang dulu tidak diakui oleh Orde Baru.

Sebanyak 16 orang tersebut merupakan buruh dan aktivis buruh –yang tidak selalu sebagai buruh organis--. Selain buruh dan aktivis buruh, studi ini juga melakukan wawancara kepada tiga (3) orang sebagai informan pendukung yaitu dua (2) orang dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya, dan seorang wakil dari Apindo (pengusaha).

Informan pendukung pertama adalah Irw, yang berusia kurang lebih 45 tahun, pendidikan S2 dan sejak pertama bekerja sebagai CPNS tertanggal Maret 1993 langsung ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Irw menjabat sebagai Kepala Bidang Perselisihan Bagian Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, sejak sebelum reformasi sampai sekarang, sehingga Irw bisa membandingkan kondisi perselisihan hubungan industrial sebelum adanya UU ketenagakerjaan, UU tentang Kebebasan Berserikat dan UU serta peraturan atau Surat keputusan yang ada pada masa Orde Baru dan pasca Orde Baru. Selain sebagai staf Dinas Tenaga Kerja, I juga menjadi dosen tamu di salah satu PTS di Surabaya. Irw sangat sibuk terutama ketika ada aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh dan aktivis buruh di Kota Surabaya.

Informan pendukung kedua adalah Bam, berusia 56 tahun, sejak tahun 2004 bekerja di bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, yang sebelumnya bekerja pada Dinas Penerangan, karena dinas ini diganti dengan nama Dinas Infokomtek. Aktivitasnya melakukan pengawasan dan memberi teguran pada perusahaan yang tidak membayar atau memberikan hak-hak buruh. Bagian pengawasan ini sangat sibuk jika ada pengusaha yang tidak memberikan hak-hak

buruh secara penuh, misalnya pengusaha tidak membayar upah sesuai dengan UMP/K yang sudah ditetapkan pemerintah, serta hak-hak normative lainnya yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Bahkan hampir setiap hari didatangi aktivis buruh yang tidak puas dengan keputusan perusahaan.

Informan pendukung ketiga adalah Mar, seorang pengusaha sepatu yang menjabat sebagai sekretaris APINDO Jawa Timur, sudah lebih dari 15 tahun menjadi sekretaris eksekutif. MA tahu persis peraturan tentang buruh atau ketenagakerjaan, dan dapat membandingkan kondisi serta permasalahan buruh di Indonesia semasa Orde Baru dan pasca Orde Baru. Mulai dari satu serikat buruh, hubungan industrial yang harmonis sampai sekarang dengan jumlah serikat buruh yang banyak dan sering terjadi demonstrasi atau aksi unjuk rasa dan mogok kerja dengan banyak tuntutan.

Beberapa orang aktivis buruh dan pengurus serikat tersebut yang menjadi narasumber, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Informan yang merupakan aktivis buruh dan pengurus serikat buruh, yang masih muda dan lajang sebanyak lima (5) orang (empat orang laki-laki dan seorang buruh perempuan) dan sudah usia dan berkeluarga sebanyak 11 orang (10 orang laki-laki dan seorang perempuan). Apabila diklasifikasi berdasarkan serikat pekerja yang diikutinya ada tiga (3) orang berasal dari Sarbumusi, sebanyak empat (4) orang dari serikat buruh yang dibentuk pemerintah pada masa Orde Baru sebagai satu-satunya serikat yang diakui pemerintah (SPSI), ada pula serikat buruh yang didirikan pada masa Orde baru tapi tidak diakui oleh pemerintah (SBSI) sebanyak tiga (3) orang, dan selebihnya berasal dari serikat buruh yang didirikan pasca disyahkannya UU kebebasan berserikat, tiga orang dari FSPMI, PPMI, SPBI dan

SPN masing-masing satu orang. Selain informan pokok ada informan pendukung dari pengusaha dan aparat pemerintah.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang berupa kalimat, ungkapan atau data deskriptif. Data tersebut diperoleh dengan melakukan indepth interview, sehingga kedalaman data tentang pengalaman masing-masing buruh yang berkonflik dengan pengusaha dalam menghadapi berbagai perlakuan pihak pengusaha, aparat serta kehidupan buruh dan aktivis buruh dan sebagainya dapat digali secara mendalam. Selain itu peneliti dapat menggali beberapa istilah atau terminologi yang digunakan buruh pada waktu persiapan maupun aksi unjuk rasa, sehingga peneliti dapat memahami apa yang disampaikan buruh/informan. Dalam perspektif fenomenologi, data untuk keperluan analisis selain diperoleh melalui indepth interview, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengamatan ketika terjadi konflik industrial (seperti pada saat demo baik ketika penetapan UMP, atau hari buruh dan sebagainya), yang selanjutnya digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami makna di balik yang tingkah laku yang teramati. Ada dua kunci sebagai syarat dalam studi dengan menggunakan fenomenologi yaitu: pertama, kedekatan dan pengamatan yang intensif untuk memperoleh inti “obyek/sesuatu” yang diamati. Artinya selama penelitian, peneliti tidak hanya sekali bertemu dengan informan, dan betul secara intensif berinteraksi dengan buruh dan aktivis buruh yang menjadi informan. Kedua, melakukan deskripsi fenomenologis tentang “obyek/sesuatu” yang diamati. Dengan demikian, untuk mencapai inti “obyek/sesuatu” sangat

tergantung pada kemampuan pengamat dalam melakukan pendekatan, pengamatan dan mendiskripsikan tentang “obyek/sesuatu” yang diamatinya.

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengedepankan pengukuran, dalam studi ini data utama yang dikaji adalah data kualitatif atau data deskriptif yang berupa kata-kata, kalimat, ungkapan dan sebagainya. Sementara untuk melengkapi pemahaman, peneliti juga mengumpulkan data yang diperoleh dari media, dinas instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, BPS dan sebagainya. Secara lebih lengkap, dalam penelitian ini data yang dibutuhkan akan digali melalui beberapa cara, yaitu:

Pertama, melakukan wawancara mendalam (indepth interview) kepada aktivis buruh untuk memperoleh informasi tentang kehidupan keseharian yang dijalani sebagai buruh dan aktivis, pengalaman buruh dan aktivis buruh terlibat dalam berbagai demonstrasi, perlakuan yang dialami seperti eksploitasi, berhadapan dengan pengusaha, aparat dan kelompok lain yang mesti dihadapi. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dan pengamatan tentang kehidupan sehari-hari informan, serta bagaimana buruh dan aktivis buruh memaknai dan memahami konflik industrial, bagaimana pengusaha (termasuk manajemen) memperlakukan buruh selama terjadi konflik, bagaimana buruh memahami peran aparat dalam menyelesaikan konflik, dan bagaimana pula buruh memaknai dan memahami peran negara dalam melahirkan konflik industrial dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan wawancara mendalam, guna memahami dan mengungkap pengalaman hidup (life experience) sebagai buruh dan aktivis. Kedua, peneliti menyusun narasi hasil wawancara mendalam dan pengamatan (observasi). Selama peneliti melakukan pengumpulan

data, semua teori, asumsi dan informasi dan pengetahuan yang didengar, dibaca, dan diserap dari “para ahli” dikurung (bracketing) agar tidak mempengaruhi informasi yang disampaikan informan penelitian.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Untuk memahami dan mengungkap tentang makna konflik industrial, maka seluruh data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun observasi, disusun dalam bentuk transkrip.

Setelah transkrip selesai, kemudian dipilah-pilah atas dasar tema (thematic) dengan mencari kata-kata kunci sebagaimana yang diungkapkan oleh informan penelitian untuk membangun konsep-konsep yang relevan dengan tema atau isu penelitian. Oleh karena itu konsep-konsep yang disampaikan adalah konsep tertentu menurut informan dalam studi ini, bahkan definisi atau pengertian tentang konsep yang muncul adalah konsep menurut informan pada kajian ini. Setelah tahap tersebut selesai maka dilakukan kategorisasi berdasarkan isu/konsep-konsep penelitian.

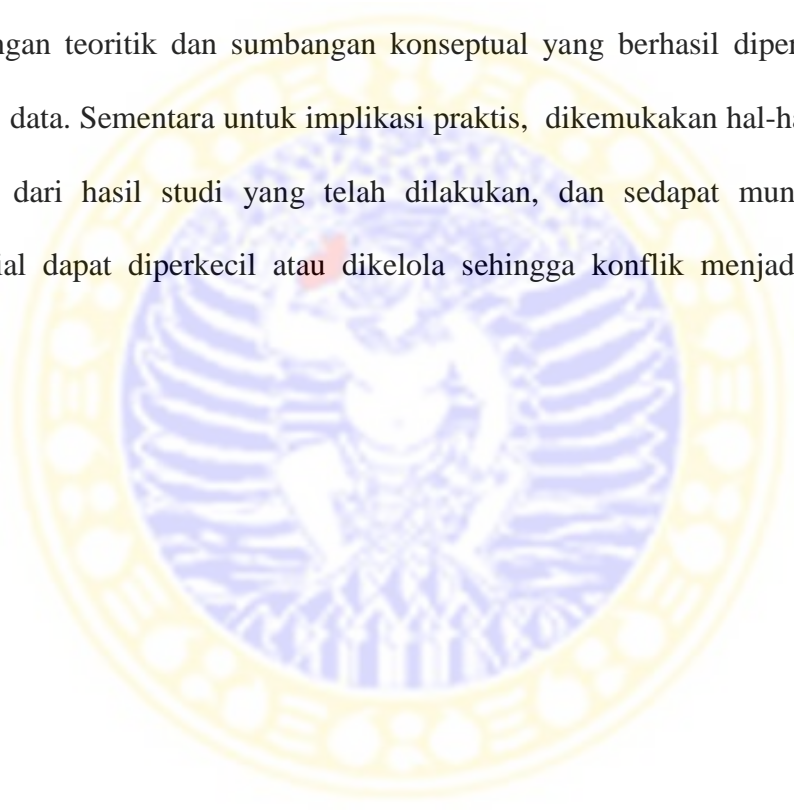
Langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi tentang isu penelitian dan dianalisis serta diinterpretasikan sesuai dengan fokus penelitian. Di akhir analisis peneliti mencoba untuk menyusun proposisi atas dasar temuan/data dan pada tahap ini peneliti mulai membuka bracketing dan bisa membandingkan antara temuan dan teori, hasil-hasil studi terdahulu atau informasi dari para ahli.

Laporan penelitian disusun, tidak hanya mendeskripsikan dinamika dan bentuk-bentuk konflik industrial, dan sebagainya. Akan tetapi yang terpenting dalam pengolahan dan analisis adalah bagaimana informan memberi makna

terhadap setiap informasi, ungkapan atau data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian kualitatif khususnya fenomenologi tidak sekadar menyajikan data empiris yang diperoleh peneliti di lapangan, tetapi lebih dari itu adalah mengungkap makna yang ada di balik yang dilihat atau diamati peneliti.

Dalam laporan akhir, dikemukakan beberapa temuan penelitian berupa proposisi-proposisi, selain itu juga akan dikemukakan implikasi teoritik dari hasil analisis, serta implikasi praktis. Dalam implikasi teoritik, dikemukakan sumbangan teoritik dan sumbangan konseptual yang berhasil diperoleh melalui analisis data. Sementara untuk implikasi praktis, dikemukakan hal-hal yang dapat dipetik dari hasil studi yang telah dilakukan, dan sedapat mungkin konflik industrial dapat diperkecil atau dikelola sehingga konflik menjadi produktif.

(***)



Tabel 1.1: Identitas Informan

NAMA	USIA	PENDIDIKAN	STATUS PERKAWINAN	SP
Jamal	31	SMA	L	FSPMI
Dony	24	SMA	L	FSPMI
Fiki	23	SMEA	L	FSPMI
Khoir	33	SMA	L	SPBI
Sunarto	40	SMA	M	SPN
Hari	33	SMA	M	SBSI
Sandi	45	SMA	M	SBSI
Mukhlas	50	S1	M	SARBUMUSI
Amik	32	SMK	L	SARBUMUSI
Priyo	35	SD	M	SARBUMUSI
Dendy	53	S2	M	SPSI
Kadiri	68	SMA	M	SPSI
Dwi Haryanti	42	S1 (SH)	M	PPMI
Slamet	52	S1	L	PBI
Eko	35	S1	M	SPSI
Rojiin	45	SMA	M	SPSI
Samsuni	40	SMA	M	SPSI
Irvan	50	S2	M	PNS
Bambang	54	S1	M	PNS
Mardjono	53	S1	M	APINDO

Sumber: wawancara dengan informan

NB: Untuk kepentingan dan memudahkan perijinan guna mencari data terutama ke dinas/instansi terkait peneliti merubah judul dengan Dinamika hubungan industrial di era reformasi, agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Dari mbak Erma dikenalkan dengan mas Khoir dari SPBI dan Mas Jamaludin Malik dari FSPMI. Dari pak Bambang Budiono dikenalkan dengan pak Slamet Yuliyanto dan mas Dipo yang kemudian memberi no kontak Hariyanto dari SBSI, Sarbumusi. Dari ketua DPC Sarumusi yang dikenalkan ketua SPSI Surabaya.